



TRIWULAN II

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin serta rahmat-Nya penyusunan **“Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan II Tahun 2025”** dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.

Penyusunan laporan ini mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dengan dasar tersebut, laporan ini diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program dan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selama triwulan kedua tahun 2025.

Laporan ini tidak hanya menampilkan data dan informasi capaian secara kuantitatif, tetapi juga dimaksudkan sebagai alat ukur dan evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelabuhan, dan kinerja kelembagaan secara makro dan mikro. Melalui laporan ini, kami berupaya mengidentifikasi berbagai pencapaian sekaligus tantangan yang masih perlu dibenahi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pelabuhan yang baik (*good governance*).

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara ideal. Namun, berkat kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari seluruh jajaran, pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan evaluasi yang konstruktif, serta mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan yang lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan anggaran, maupun koordinasi pelaksanaan program di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Cilacap, **17** Juli 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,




Imas Masriah, S.Pi., M.Pi.
NIP. 19750414 200212 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
PENDAHULUAN.....	11
Latar Belakang	11
Tujuan.....	12
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	13
Keragaan Pegawai.....	20
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2025	22
PERENCANAAN KINERJA.....	24
Rencana Strategis.....	24
Rencana Kerja Tahun 2025.....	25
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
Pengukuran Kinerja.....	29
AKUNTABILITAS KINERJA	32
Capaian Kinerja Organisasi	32
Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	33
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	64
PENUTUP.....	65
Kesimpulan	65
Permasalahan dan Tindaklanjut	66
Penutup.....	68
LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2025	26
Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2025.....	27
Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 Revisi April	29
Tabel 4 Bobot validasi IKU	30
Tabel 5 Klasifikasi target indikator kinerja	30
Tabel 6 Status Capaian Nilai Kinerja	31
Tabel 7 Capaian IKU PPS Cilacap Triwulan II Tahun 2025	35
Tabel 8 Capaian IKU 1- Nilai PNBP Non SDA PPS Cilacap (Rupiah Juta)	37
Tabel 9 Perbandingan capaian realisasi Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2025	37
Tabel 10 Capaian Realisasi Triwulan II terhadap target Tahun 2025.....	37
Tabel 11 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 1	39
Tabel 12 Target dan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan II Tahun 2025.....	40
Tabel 13 Perbandingan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024	40
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025.....	40
Tabel 15 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 2	42
Tabel 16 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kinerja PPS Cilacap (Nilai).....	43
Tabel 17 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024	43
Tabel 18 Capaian Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025	43
Tabel 19 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 4	46
Tabel 20 Target dan Realisasi Nilai pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap	46
Tabel 21 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024	47
Tabel 22 Capaian Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2024	47
Tabel 23 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 7	48
Tabel 24 Target dan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	49
Tabel 25 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024	49
Tabel 26 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025.....	49
Tabel 27 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap.....	51
Tabel 28 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024	51
Tabel 29 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025.....	52
Tabel 30 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11	53
Tabel 31 Indeks Profesionalitas ASN PPS Cilacap (Indeks)	54

Tabel 32 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024	54
Tabel 33 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025	54
Tabel 34 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11	56
Tabel 35 Target dan Realisasi IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap (Persen)	57
Tabel 36 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai).....	58
Tabel 37 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024	58
Tabel 38 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025	59
Tabel 39 Kegiatan yang menunjang capaian IKU16	61
Tabel 40 Target dan Realisasi IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	61
Tabel 41 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024	61
Tabel 42 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025	62
Tabel 43 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 18	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pelabuhan Samudera Cilacap Tahun 2025.....	19
Gambar 2 Diagram Pie Jumlah Pegawai PPS Cilacap	20
Gambar 3 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di PPS Cilacap	21
Gambar 4 Diagram Tingkat Pendidikan Pegawai di PPS Cilacap	21
Gambar 5 Diagram perbandingan gender pegawai di PPS Cilacap.....	22
Gambar 6 Nilai NKO PPS Cilacap Aplikasi Kinerjaku Periode Triwulan II Tahun 2025	32
Gambar 7 <i>Screen shot</i> Aplikasi SIDAK per 15 Juli 2025	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

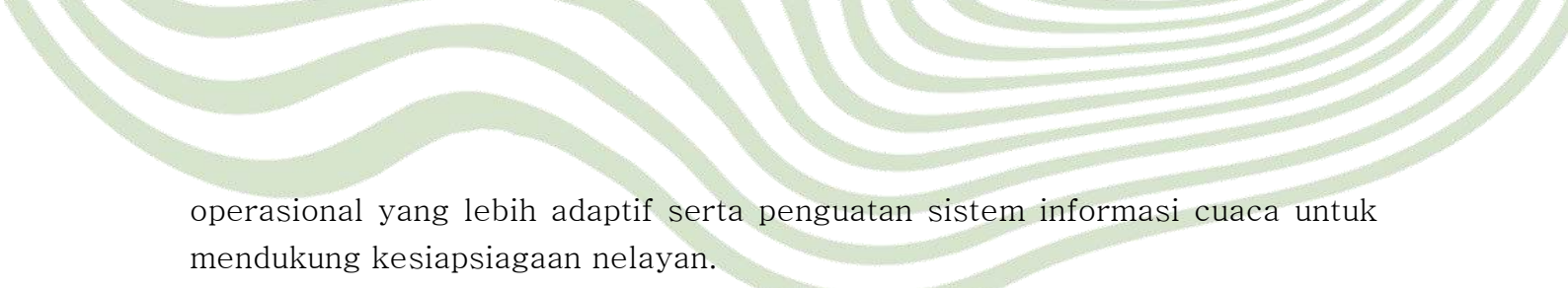
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) merupakan unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap tanggal 30 Desember 2020.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020–2024, yang diikuti dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Tahunan secara konsisten, terus menerus, dan berkesinambungan PPS Cilacap berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Kegiatan. Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PPS Cilacap telah menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam Tahun 2025. Kelima sasaran kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan rincian 8 (delapan) indikator kinerja dengan periode pengukuran triwulanan, 3 (tiga) indikator kinerja semesteran, dan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan periode perhitungan tahunan. Periode Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari lima sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis yang dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2025 ini tercapai dengan baik dalam pencapaian progres kegiatan. Capaian kinerja tersebut tercermin dalam hasil pengukuran melalui aplikasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id), di mana PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 114,43% pada Triwulan II. Sementara itu, akumulasi capaian hingga akhir Triwulan II mencapai 114,24%. Kedua nilai tersebut berada dalam kategori “Istimewa” (rentang nilai 110–120) dan ditandai dengan indikator berwarna biru, dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak Rp. 2.766,04 Juta atau 120,00% dari target Triwulan II yaitu Rp. 1.686,78 Juta;
2. IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak 11.926,84 Ton atau 108,43% dari target Triwulan II yaitu 11.000 Ton;
3. IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai dengan Nilai 91,75 atau sebesar 109,23% dari target Triwulan II yaitu Nilai 84;
4. IKU 7 - Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 96,24 atau sebesar 120% dari target Triwulan II yaitu Nilai 30,1;
5. IKU 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan tercapai sebanyak 1.259 Kapal atau 120% dari target Triwulan II yaitu 670 Kapal;
6. IKU 9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan tercapai Nilai 0,36 atau 120% dari target Triwulan II yaitu Nilai 0,26;
7. IKU 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100 Persen atau 117,65% dari target Triwulan II yaitu 85%;
8. IKU 13 - Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Indeks 83,42 atau 101,73% dari target Triwulan II yaitu Indeks 82;
9. IKU 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai 100 Persen atau 120,00% dari target Triwulan II yaitu 76%;
10. IKU 16 - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 91,11 atau 107,19% dari target Triwulan II yaitu Nilai 85; dan
11. IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Nilai 92,35 atau 104,35% dari target Triwulan II yaitu Nilai 88,5.

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selama Triwulan II Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik, meskipun terdapat beberapa kendala signifikan yang memengaruhi pencapaian indikator utama. Pada aspek volume produksi perikanan tangkap, terjadi penurunan cukup tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penundaan keberangkatan kapal pasca hari besar keagamaan dan tradisi lokal, serta cuaca buruk yang membatasi aktivitas melaut. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perencanaan musim



operasional yang lebih adaptif serta penguatan sistem informasi cuaca untuk mendukung kesiapsiagaan nelayan.

Di sisi lain, dukungan anggaran sebesar Rp 136,05 miliar yang dialokasikan untuk tiga kegiatan strategis belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan realisasi hingga akhir Triwulan II baru mencapai 6,08%. Hal ini disebabkan oleh belum terserapnya dana PHLN akibat proses kontraktual yang masih berjalan, serta sebagian anggaran yang masih terblokir karena kebijakan efisiensi belanja berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Untuk itu, diperlukan percepatan penyelesaian administrasi, pembukaan blokir anggaran, dan koordinasi lintas pihak guna mengoptimalkan pelaksanaan program serta mendukung pencapaian target kinerja tahun anggaran berjalan.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja PPS Cilacap dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen PPS Cilacap dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) atau Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan PPS Cilacap.

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan, sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPT tahun 2020-2024.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah menetapkan rencana kerja tahun 2025, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj PPS Cilacap untuk periode Triwulan II Tahun

2025 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban oleh PPS Cilacap.

Acuan dalam penyusunan LKj Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Negara telah menetapkan target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut kemudian disusun dalam Laporan Kinerja PPS Cilacap sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja PPS Cilacap Triwulan II Tahun 2025 ini, yaitu :

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Triwulan II Tahun 2025 dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan
3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap tanggal 30 Desember 2020.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS Cilacap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;

- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Subbagian Umum.

Subbagian Umum dalam hal ini sebagai Tim Kerja Dukungan Manajerial yang mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK PPS Cilacap;
- b. Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparaturnya pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup PPS Cilacap;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup PPS Cilacap;
- d. Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup PPS Cilacap;
- e. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap;
- f. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Cilacap;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup PPS Cilacap;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup PPS Cilacap;
- i. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup PPS Cilacap;
- j. Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup PPS Cilacap;
- k. Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup PPS Cilacap;
- l. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparaturnya lingkup PPS Cilacap;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di PPS Cilacap;

- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di PPS Cilacap;
 - o. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup PPS Cilacap;
 - p. Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup PPS Cilacap;
 - q. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup PPS Cilacap.
2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tergabung dalam Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Cilacap Nomor B.104/PPC/KP.440/I/2025 tanggal 6 Januari 2025.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
- mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk tim kerja dengan ketua tim kerja sebagaimana ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.104/PPC/KP.440/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai berikut:
- a. Tim Kerja Operasional Pelabuhan;
Tim Kerja Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Operasional Pelabuhan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan data dan statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
 - Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
 - Melakukan evaluasi terkait kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
 - Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
 - Menyiapkan data mutu perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
 - Menyiapkan Kegiatan pembinaan dan pemeriksaan terhadap mutu ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;

- Menyiapkan Kegiatan pengujian mutu hasil perikanan dan melaporkan hasil pengujian mutu yang telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP.

b. Tim Kerja Kesyahbandaran;

Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Kesyahbandaran menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pemeriksaan Log Book di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PPS Cilacap;
- Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di PPS Cilacap;
- Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawasan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap.

c. Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana;

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak swasta;
- Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap.

d. Tim Kerja Pelayanan Usaha;

Tim Kerja Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Tim Kerja Pelayanan Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan pengusahaan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan analisis atas rencana kerja pengusahaan (investasi) di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di PPS Cilacap.

e. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Tim Kerja Dukungan Manajerial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tata usaha di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Dukungan manajerial menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

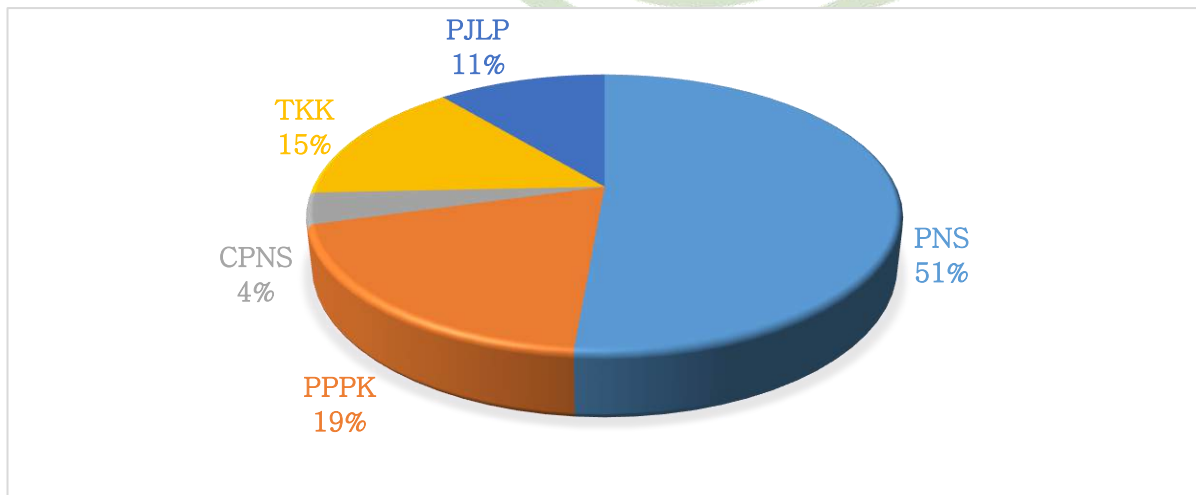
- Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai);
- Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparaturnya pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;

- Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pelabuhan Samudera Cilacap Tahun 2025

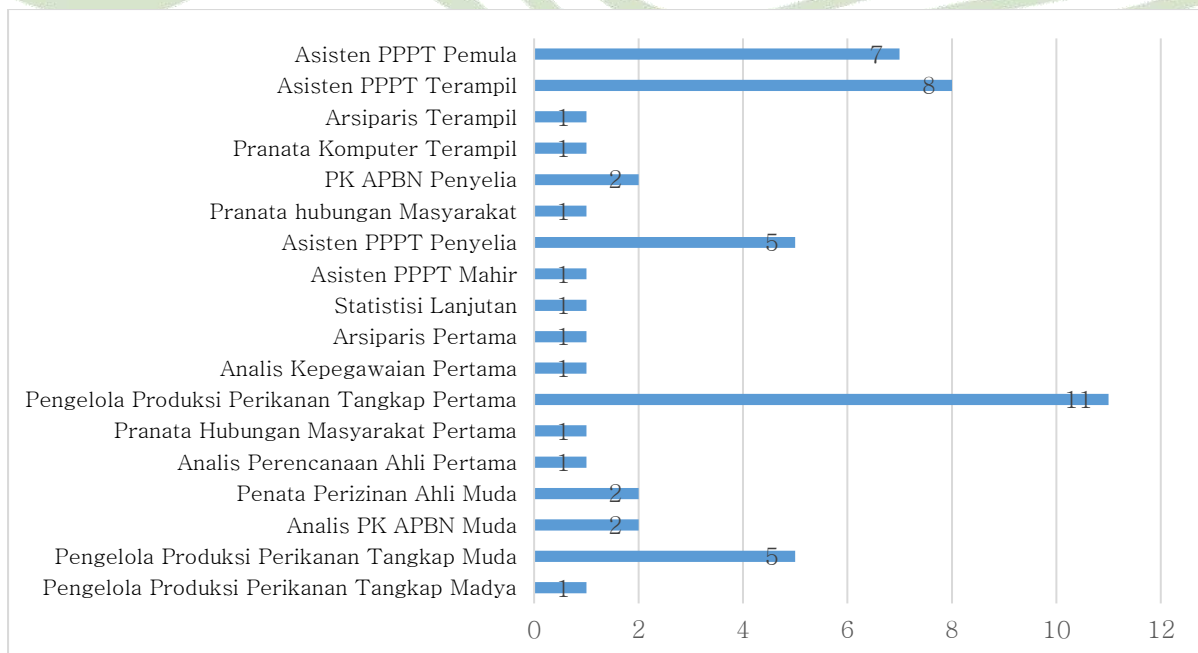
Keragaan Pegawai



Gambar 2 Diagram Pie Jumlah Pegawai PPS Cilacap

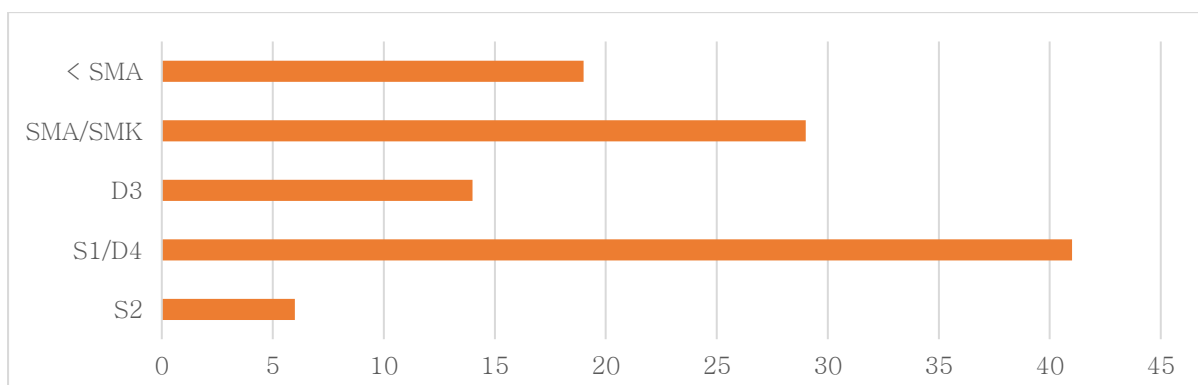
Jika dilihat dari Gambar 2, keragaan pegawai lingkup PPS Cilacap sampai dengan 17 Juli 2025 berjumlah 109 orang. Dengan jumlah PNS sebanyak 56 orang, PPPK sebanyak 22 orang, CPNS Sebanyak 4 orang, TKK sebanyak 16 orang, dan PJP sebanyak 12 orang. Komposisi ini mencerminkan struktur kepegawaian yang cukup beragam dan adaptif terhadap kebutuhan operasional pelabuhan.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), proporsi terbesar diisi oleh pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), yakni mencapai 64,2%, disusul oleh Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 33,3%, dan Jabatan Struktural sebesar 2,5%. Komposisi ini menunjukkan bahwa PPS Cilacap sangat bergantung pada peran teknis dan profesional yang diemban oleh JFT dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan operasional di sektor perikanan tangkap. Sebanyak 18 jenis jabatan fungsional tertentu tercatat aktif di PPS Cilacap, dengan jumlah terbanyak adalah jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama, yaitu sebanyak 11 orang, yang dapat dilihat di gambar 3. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan PPS Cilacap sebagai pelabuhan perikanan strategis yang membutuhkan tenaga teknis lapangan dan manajerial produksi perikanan.



Gambar 3 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di PPS Cilacap

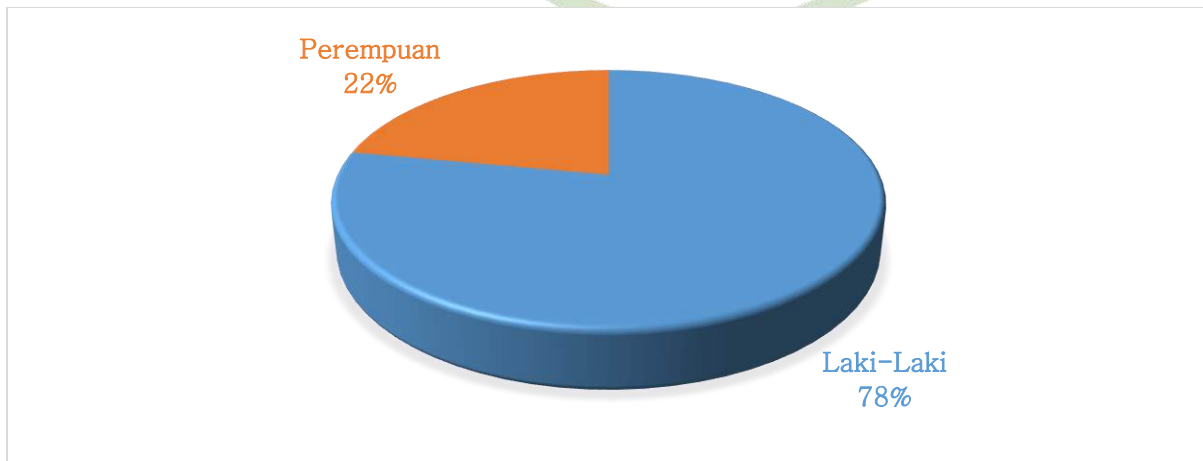
Ditinjau dari jenjang pendidikan (gambar 4), mayoritas pegawai PPS Cilacap telah menempuh pendidikan tinggi, dengan rincian: 6 orang berpendidikan S2, 41 orang berpendidikan S1/D4, 14 orang lulusan D3, serta sisanya merupakan lulusan SMA sebanyak 29 orang dan pendidikan $\leq$ SMA sebanyak 19 orang. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa SDM di PPS Cilacap memiliki potensi intelektual dan keterampilan yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun administratif. Keberadaan pegawai dengan pendidikan tinggi juga memberikan peluang bagi organisasi untuk terus mengembangkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan inovasi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan tata kelola.



Gambar 4 Diagram Tingkat Pendidikan Pegawai di PPS Cilacap

Dari aspek gender (gambar 5), proporsi pegawai laki-laki masih mendominasi sebesar 78%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 22%. Meskipun terjadi ketimpangan gender, namun peran perempuan tetap signifikan

dalam mendukung kegiatan organisasi, baik pada aspek administratif maupun teknis.



Gambar 5 Diagram perbandingan gender pegawai di PPS Cilacap

Secara keseluruhan, keragaan pegawai di PPS Cilacap mencerminkan struktur SDM yang cukup solid dan berpotensi besar untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan komposisi kepegawaian yang didominasi oleh tenaga fungsional serta tingkat pendidikan yang relatif tinggi, PPS Cilacap memiliki modal sumber daya manusia yang strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan efektivitas pengelolaan pelabuhan perikanan ke depan. Optimalisasi kapasitas, pemerataan tugas sesuai kompetensi, serta peningkatan profesionalisme pegawai menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan organisasi secara berkelanjutan.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2025

Sistem Penyajian Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban yang dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mengenai keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban kinerja PPS Cilacap dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2025 sendiri dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana dan atau penetapan kinerja (komitmen kinerja) yang telah dilakukan akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan membandingkan hasil. Demikian pula akan disajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun berjalan, selain juga melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dalam mengaitkan dengan anggaran maka, realisasinya akan digunakan untuk membahas perwujudan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Adapun sistemetika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan II Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang PPS Cilacap seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di PPS Cilacap.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis PPS Cilacap 2020–2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja PPS Cilacap Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan menyangkut dengan persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni untuk mewujudkan Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera yang tertuang dalam Renstra DJPT Tahun 2020–2024, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun.

Visi

Dengan mempertimbangkan dan merupakan penjabaran visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2020–2024 adalah "Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu"

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah:

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;

4. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Tujuan

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/lembaga lain yang beraktifitas di dalam pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi. Dengan mengacu pada tujuan pembangunan perikanan tangkap, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Sasaran

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2025 dengan mengacu pada sasaran program DJPT yang diturunkan dari sasaran strategis KKP yaitu :

- SK-1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- SK-2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat
- SK-3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
- SK-4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- SK-5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 1.

No	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	119.172.546.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	39.235.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.837.604.000
TOTAL		136.049.385.000

Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU PPS Cilacap pada Tahun 2025 untuk semua SK berjumlah 18 (delapan belas) IKU. Sebagai alat ukur pencapaian SK, target 18 (delapan belas) IKU PPS Cilacap yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 terlihat pada Tabel di bawah ini.

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.373,57
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	35.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	81
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5

Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2025

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah mengajukan permohonan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui surat Kepala PPS Cilacap nomor B.1243/PPSC/RC.610/IV/2025 tanggal 8 April 2025. Permohonan ini khususnya menyangkut penyesuaian target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 2, yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Cilacap. Langkah ini diambil untuk memastikan agar target kinerja tetap realistis dan selaras dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Penyesuaian indikator dan target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.373,57
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	27.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	81
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5

Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 Revisi April

Perubahan target indikator kinerja pada tahun 2025 tidak terlepas dari beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Salah satunya adalah kondisi alam, yaitu adanya angin Monsun Tenggara yang terjadi pada periode Juni hingga September 2025. Fenomena ini menyebabkan gelombang laut di kawasan selatan mencapai ketinggian 2,5 hingga 4 meter. Kondisi tersebut menimbulkan risiko keselamatan yang cukup tinggi bagi para nelayan, sehingga banyak dari mereka memilih untuk tidak melaut. Akibatnya, hari melaut berkurang secara signifikan, yang berdampak langsung pada penurunan produktivitas kapal penangkap ikan. Hal ini tercermin dari menurunnya volume produksi perikanan tangkap pada yakni hanya mencapai 3.048 ton atau turun sebesar 50,91% dibandingkan periode sebelumnya.

Di samping faktor cuaca ekstrem, proyeksi jangka panjang berdasarkan rerata tren produksi tahun 2018 hingga 2027 menunjukkan bahwa PPS Cilacap diperkirakan memiliki potensi produksi sekitar 20 ribu ton per tahun untuk seluruh jenis ikan. Namun, hingga triwulan II tahun 2025, capaian volume produksi perikanan tangkap baru mencapai 11.927 ton atau sekitar 34,08% dari total target tahunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun potensi produksi masih terbuka, namun tantangan eksternal seperti kondisi alam tetap menjadi faktor dominan yang mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Pengukuran Kinerja

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU. Status capaian yang ditunjukan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antara capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU, terdiri dari *Outcome*, *Output* Kendali Rendah, *Output* Kendali Tinggi, dengan bobot seperti Tabel 4.

No	Validitas IKU	Bobot
1	Outcome	5
2	Output Kendali Rendah	3
3	Output Kendali Tinggi	2

Tabel 4 Bobot validasi IKU

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas *Outcome* yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh *stakeholder/customer* pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas *Output* Kendali Rendah yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas *Output* Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja. Pola Perhitungan terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk nilai kinerja dengan klasifikasi polarisasi. Polarisasi terdiri dari *Maximize*, *Minimize*, atau *Stabilize*. *Maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk. *Minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk. *Stabilize* yaitu semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Berikut klasifikasi polarisasi yang ditentukan sesuai Tabel 5

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Sangat Baik

Tabel 5 Klasifikasi target indikator kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Status capaian nilai kinerja ditentukan oleh nilai indeks pada Tabel 6.

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110–120
Baik	Nilai 90–<110
Cukup	Nilai 70–<90
Kurang	Nilai 50–<70
Sangat Kurang	Untuk Nilai <50
Belum Ada Penilaian	

Tabel 6 Status Capaian Nilai Kinerja

BAB III

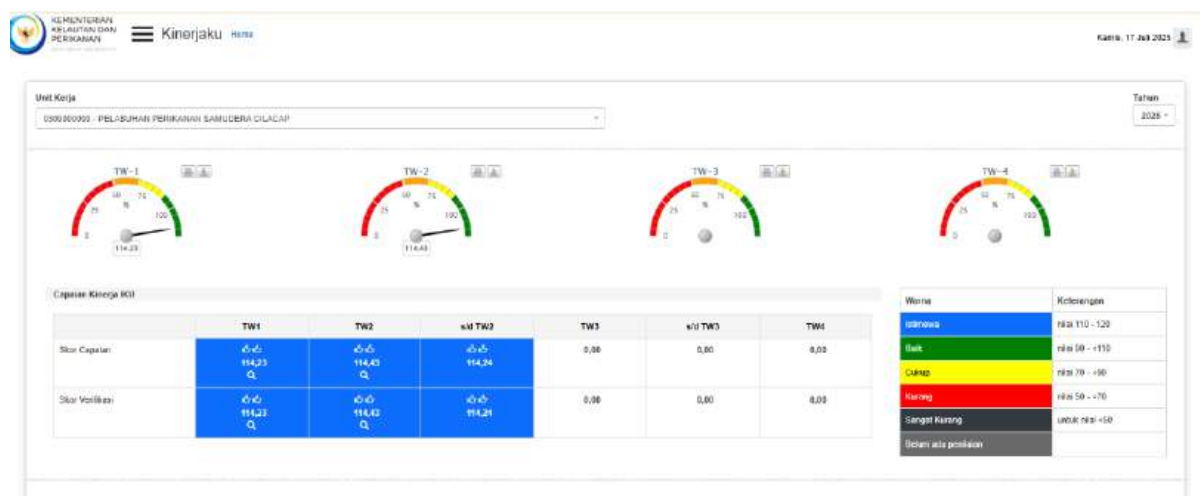
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) menerima mandat untuk melaksanakan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SK dan IKU ini menjadi pedoman utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja di lingkungan PPS Cilacap.

Memasuki akhir Triwulan II, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh sasaran dan indikator tidak hanya berhasil dicapai, tetapi melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

Capaian tersebut tercermin secara kuantitatif melalui sistem monitoring resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan data sistem, PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 114,43% pada Triwulan II. Sementara itu, akumulasi capaian kinerja hingga akhir Triwulan II tercatat sebesar 114,24%. Dengan nilai tersebut, PPS Cilacap berhasil masuk dalam kategori “Istimewa” (rentang nilai 110–120), yang ditandai dengan indikator warna biru, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6 berikut ini:



Gambar 6 Nilai NKO PPS Cilacap Aplikasi Kinerjaku Periode Triwulan II Tahun 2025

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dan kontribusi seluruh pegawai PPS Cilacap yang terus berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kolaborasi tim yang solid, tata kelola yang baik, serta penguatan pengawasan dan evaluasi internal menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja yang unggul.

Pencapaian ini diharapkan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan semata, tetapi juga menjadi motivasi untuk menjaga konsistensi kinerja hingga akhir tahun anggaran. Dengan semangat kerja kolektif dan orientasi pada hasil, PPS Cilacap siap menjawab tantangan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) dilakukan secara sistematis dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran kinerja berperan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan telah selaras dengan sasaran yang ditetapkan dan turut mendukung pencapaian visi dan misi PPS Cilacap sebagai pelabuhan perikanan yang andal, modern, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja disusun berdasarkan IKU yang telah diidentifikasi secara cermat sejak awal perencanaan. IKU tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran strategis dan tujuan organisasi dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat menjadi acuan dalam kontrak kinerja pada Triwulan II Tahun 2025.

Hasil pengukuran ini menjadi salah satu instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial, serta memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi berbasis regulasi dan data, PPS Cilacap dapat terus memperkuat akuntabilitas kinerjanya dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada hasil.

Capaian IKU PPS Cilacap

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi PPS Cilacap. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja PPS Cilacap Tahun 2025 dapat tercapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	CAPAIAN TW II	PERSENTASE %	
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	1.686,78	2.766,04	120	
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	11.000,00	11.926,84	108,43	
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)				
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	91,75	109,23	
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)				
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)				
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1	96,24	120	
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	670	1259	120	
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	0,36	120	
5	Terwujudnya Layanan Dukungan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan				

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	CAPAIAN TW II	PERSENTASE %	
Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap			Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)				
	11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85	100	117,65	
	12		Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)				
	13		Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	82	83,42	101,73	
	14		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76	100	120	
	15		Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)				
	16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	85	91,11	107,19	
	17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)				
	18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5	92,21	104,19	

Tabel 7 Capaian IKU PPS Cilacap Triwulan II Tahun 2025

Sumber : Kinerjaku PPS Cilacap

SASARAN KEGIATAN 1

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sasaran kegiatan Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan II Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

Nilai PNBP Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rupiah Milyar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Indikator Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021 serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Kegiatan pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah sebagai berikut:

- pelayanan jasa tambat labuh;
- pelayanan jasa air;
- pelayanan jasa *cold room* dan *freezer*;
- pelayanan jasa kendaraan (*crane, truck refrigerator, dump truck* dll);
- pelayanan jasa alat (gerobak, penghancur es, dll);
- pelayanan jasa penggunaan tanah dan/atau bangunan;
- pelayanan jasa penumpukan barang/penjemuran jaring/ikan;
- pelayanan jasa pas masuk;
- pelayanan jasa kebersihan pelabuhan;
- pelayanan jasa penggunaan sarana dan prasarana;
- pelayanan jasa listrik;
- pelayanan jasa dock.

IKU ini, pada Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ditetapkan target 1.686,78 (Rupiah Juta). Capaian Nilai PNBP Non SDA di PPS Cilacap 2.766,04 (Rupiah Juta) tersaji pada Tabel 8.

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp Juta)	1.686,78	2.766,04	163,98

Tabel 8 Capaian IKU 1- Nilai PNBP Non SDA PPS Cilacap (Rupiah Juta)

Penerimaan PNBP PPS Cilacap terbesar masih berasal dari penerimaan tambat sebesar Rp. 1.874.199.090,- dan penerimaan terbesar kedua berasal dari Penerimaan Penggunaan Tanah/Bangunan yaitu sebesar Rp. 322.382.675.

Nama IKU	Realisasi TW II 2024	Realisasi TW II 2025	Naik/Turun (%)
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)	3.565,22	2.766,04	(22,42)

Tabel 9 Perbandingan capaian realisasi Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahun 2025
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)	3.373,57	2.766,04	81,99

Tabel 10 Capaian Realisasi Triwulan II terhadap target Tahun 2025

Target Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.373,57 Juta. Sampai dengan Triwulan II ini, capaian terhadap target Tahunan adalah sebesar 81,99%.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) mencatat adanya penurunan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 22,42% dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan pola

pemanfaatan layanan, serta dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pembayaran yang berdampak langsung terhadap waktu dan besaran penerimaan yang masuk pada periode tersebut.

Secara umum, penurunan ini bersumber dari turunnya nilai PNBP di sejumlah jenis pelayanan, antara lain: Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan; Pelayanan *cold storage*; Penggunaan transportasi internal pelabuhan; Pelayanan peralatan bongkar muat; Jasa pas masuk pelabuhan; Jasa kebersihan area pelabuhan; Jasa dock kapal; dan Jasa kelistrikan di kawasan pelabuhan. Setiap layanan tersebut berkontribusi terhadap total penerimaan PNBP, sehingga penurunan pada beberapa sektor sekaligus secara langsung berdampak pada turunnya penerimaan keseluruhan.

Penurunan paling signifikan terjadi pada layanan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, yang berkaitan erat dengan pemberlakuan mekanisme pembayaran baru, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Sebelumnya, pengguna jasa membayar sewa atau retribusi setiap tahun. Namun, sesuai ketentuan baru, pembayaran dilakukan sekaligus diawal untuk seluruh masa berlaku perjanjian. Akibatnya, jadwal pembayaran antar pengguna menjadi tidak seragam, bergantung pada tanggal dimulainya kontrak masing-masing. Hal ini menyebabkan penerimaan yang semula merata per bulan atau per tahun kini menjadi tidak merata, dan sebagian besar penerimaan bergeser ke periode saat kontrak pertama kali ditandatangani.

Meskipun tujuan perubahan sistem pembayaran ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian administrasi, dalam jangka pendek perubahan ini menimbulkan fluktuasi penerimaan PNBP, yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kestabilan arus kas negara. Dengan memahami secara menyeluruh akar permasalahan dan dampak dari kebijakan yang diterapkan, PPS Cilacap dapat menyusun langkah korektif yang terarah dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan stabilitas penerimaan PNBP, tetapi juga untuk memastikan bahwa aspek pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan negara tetap berjalan seimbang.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW II	Capaian Realisasi (%)
Tim Kerja Pelayanan Usaha	Sosialisasi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan di Pelabuhan	13.960.000	-	-

	Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	10.720.000	-	-
Cikidang	Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan di PP Cikidang Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	45.400.000	2.600.00	5,73
	Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Pelabuhan Perikanan di PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	34.480.000	-	-
TOTAL		104.560.000	2.600.000	2,49

Tabel 11 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 1

SASARAN KEGIATAN 2

Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat

Sasaran kegiatan Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan II Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap

Indikator ini menunjukkan jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di PPS Cilacap dalam bentuk basah di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. IKU ini memiliki periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun secara harian. Capaian realisasi volume produksi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 11.926,84 ton dari target sebesar 11.000 ton.

Capaian realisasi terhadap target Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	11.000	11.926,84	108,43

Tabel 12 Target dan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan II Tahun 2025

Capaian Triwulan II Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2025

Nama IKU	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan II 2025	Naik/Turun (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	18.047,76	11.926,84	(33,91)

Tabel 13 Perbandingan Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Perbandingan indikator Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan penurunan sebesar 33,91%.

Capaian Triwulan II terhadap target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	27.000	11.926,84	44,17

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Realisasi indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 44,17% terhadap target Tahun 2025.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Volume produksi perikanan pada Triwulan II Tahun 2025 didominasi oleh beberapa jenis ikan utama, yaitu Cumi Karet, Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, dan Layur. Jenis-jenis ikan tersebut merupakan komoditas unggulan yang secara konsisten menyumbang proporsi terbesar dalam total hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Namun demikian, pada periode tersebut terjadi penurunan volume produksi yang cukup signifikan. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang menghambat kegiatan operasional kapal perikanan. Salah satu penyebab utamanya adalah penundaan keberangkatan kapal setelah perayaan hari besar seperti Idul Fitri, Tahun Baru Imlek, dan tradisi Sedekah Laut. Selain itu, kondisi cuaca buruk yang terjadi selama sebagian besar periode Triwulan II juga menyebabkan banyak kapal tidak dapat melaut, sehingga mengganggu jadwal operasi penangkapan ikan.

Jika dibandingkan dengan volume produksi pada Triwulan II Tahun 2024, terjadi penurunan yang lebih tajam di tahun 2025. Meskipun pola penyebabnya relatif sama yaitu pergeseran waktu operasi kapal pasca hari raya dan kondisi cuaca ekstrem namun intensitas dan durasi gangguan yang terjadi pada tahun 2025 lebih besar. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dan berdampak langsung terhadap total volume produksi yang berhasil dicatatkan.

Keterkaitan antara faktor cuaca, tradisi tahunan, dan aktivitas operasional kapal menjadi kunci penting dalam memahami fluktuasi produksi perikanan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan perencanaan musim operasi yang lebih adaptif, serta peningkatan sistem informasi cuaca dan peringatan dini agar para nelayan dapat lebih siap dalam menyikapi perubahan kondisi alam. Dengan langkah antisipatif tersebut, diharapkan gangguan terhadap volume produksi dapat diminimalkan dan keberlanjutan usaha penangkapan tetap terjaga.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW II	Capaian Realisasi (%)
Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 573 dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur di Zona Industri Perikanan	28.726.000	2.340.000	8,15
Tim Kerja Kesyahbandaran	Pembinaan Nahkoda Dalam Pengisian Logbook	10.509.000	–	–

	Rapat Evaluasi dalam rangka implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	80.796.000	-	-
	Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan/ Penerapan PNBP Pasca Produksi	8.073.000	-	-
	Rapat Evaluasi PIPP dan Harga Acuan Ikan	26.344.000	-	-
Tim Kerja Dukungan Manajerial	Penyiapan Tenaga Pendataan Dalam Menunjang pelaksanaan PNBP Pasca Produksi	145.600.000	49.976.850	34,32
TOTAL		300.048.000	52.316.850	17,44

Tabel 15 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 2

SASARAN KEGIATAN 3

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab

Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan II Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi :

1. administrasi dan sistem informasi;
2. fasilitas pelabuhan perikanan;

3. pelayanan umum; dan
4. investasi dan industri.

Target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	91,75	109,23

Tabel 16 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kinerja PPS Cilacap (Nilai)

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan II 2025	Naik/ Turun (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	87,42	91,75	4,95

Tabel 17 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Indikator Tingkat Operasional Pelabuhan tercapai sebesar 91,75 atau kategori kinerja sangat baik. Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024, capaian pada Triwulan II Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,95%.

Capaian terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	91,75	109,23

Tabel 18 Capaian Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan II ini tercapai sebesar 109,23% terhadap target Tahun 2025.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian Indikator Tingkat Operasional Pelabuhan pada Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar 91,75, yang berada dalam kategori kinerja sangat baik. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Kinerja Pelabuhan (EVKIN), yang mengukur kinerja melalui 27 (dua puluh tujuh) komponen penilaian utama.

Setiap komponen tersebut merepresentasikan aspek penting dalam operasional pelabuhan, mulai dari pelayanan kapal hingga distribusi logistik perikanan.

Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa operasional pelabuhan berjalan secara optimal, dengan sejumlah indikator kunci yang mengalami peningkatan signifikan. Faktor-faktor yang mendorong capaian tersebut meliputi meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, volume produksi hasil perikanan, layanan tambat labuh yang semakin efisien, peningkatan frekuensi pengiriman data melalui sistem PIPP, serta kelancaran penyaluran BBM kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan. Peningkatan di berbagai sektor ini tidak hanya mencerminkan naiknya aktivitas pelabuhan, tetapi juga menunjukkan perbaikan tata kelola layanan yang lebih terintegrasi dan responsif.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Triwulan II Tahun 2024, terdapat peningkatan capaian sebesar 4,95%. Kenaikan ini menunjukkan tren kinerja yang positif dan berkelanjutan dari PPS Cilacap, yang mampu menjaga bahkan meningkatkan efektivitas operasional pelabuhan dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan, baik dari sisi teknis maupun manajerial, telah memberikan dampak nyata terhadap kinerja keseluruhan pelabuhan.

Dengan capaian ini, PPS Cilacap tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam memenuhi target operasional, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kelancaran rantai pasok perikanan tangkap secara nasional. Selanjutnya konsistensi dalam penguatan layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelabuhan secara berkelanjutan.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW II	Capaian Realisasi (%)
Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pengelolaan dan Operasional Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan	7.400.000	–	–
	pelaksanaan pelayanan CPIB	24.720.000	–	–
	Bimbingan Tekni/Sosialisasi CPIB Bagi Awak Kapal	8.523.000	6.153.500	72,20

	Pembinaan Operator PIPP bagi PP binaan	17.520.000	-	-
	Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan	164.492.000	1.880.000	1,14
Tim Kerja Dukungan Manajerial	Operasional Pelabuhan Perikanan	192.240.000	14.550.055	7,57
	Peningkatan Kecakapan Komunikasi bagi Petugas PTSA dalam mendukung Penerapan Budaya Pelayanan Prima di PPS Cilacap	12.147.000	-	-
	Pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO14001:2015	77.647.000	-	-
	Pelaksanaan Pengamanan Terpadu PNBPN Pascaproduksi di PPS Cilacap	51.370.000	-	-
	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBPN Pasca Produksi	233.401.000	159.978.000	68,54
	Video Profil Pelabuhan	62.921.000	-	-
	Video Profil Pelabuhan (RO Cadangan)	118.100.000	-	-
	Penyusunan Laporan Tahunan Operasional Pelabuhan Perikanan	800.000	-	-
	Pameran/Promosi Pelabuhan Perikanan/Publikasi	44.132.000	-	-
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.521.865.000	1.308.075.655	37,14
	Langganan Daya dan Jasa	1.444.107.000	538.480.812	37,29
	Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	231.624.000	82.650.000	35,68
Cikidang	Pelaksanaan K5 di PP Cikidang	92.282.000	2.700.000	2,93
	Pelaksanaan Pengamanan Terpadu dalam rangka mendukung K5 di PP Cikidang	23.100.00	-	-

	Peningkatan Kapasitas SDM PP Cikidang dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBK Pasca Produksi	18.452.000	-	-
Tim Kerja Pelayanan Usaha	Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan	31.512.000	-	-
Timja Tata Kelola, Sarana, dan Prasarana	Pemeliharaan Kantor	1.086.774.000	194.557.619	17,90
TOTAL		7.465.129.000	2.309.025.641	30,93

Tabel 19 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus:

1. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan
2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Dalam mendukung hal tersebut, dilakukan melalui penggunaan aplikasi SELARASKAN. SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang *diupdate* berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.

Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1	96,24	319,73

Tabel 20 Target dan Realisasi Nilai pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan II 2025	Naik/ Turun (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	99,47	96,24	(3,25)

Tabel 21 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian thd Target Tahun 2024 (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1	96,24	319,73

Tabel 22 Capaian Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2024

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, hasil realisasi penilaian keselarasan mencapai angka sebesar 319,73%, yang dikategorikan SANGAT BAIK. Pencapaian ini mencerminkan kinerja yang sangat optimal, terutama karena sebagian besar dokumen pendukung (*evidence*) berhasil dikumpulkan dan memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan konsistensi dalam pengelolaan dokumen serta pelaksanaan program sesuai standar akuntabilitas kinerja.

Namun demikian, pada aspek pengendalian lingkungan, terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian. Realisasi nilai pada komponen ini belum mencapai 100%, disebabkan oleh indikator hasil yang tidak maksimal, yaitu hanya mencapai kurang dari 40%. Ketidaktercapaian ini berkaitan langsung dengan meningkatnya konsumsi listrik pada bulan Juni dibandingkan bulan Mei, serta tingginya pemakaian air pada bulan Mei yang melebihi konsumsi di bulan April.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya optimal pada aspek lingkungan kerja. Oleh karena itu, evaluasi lanjutan terhadap perilaku konsumsi energi dan air, serta penerapan kebijakan penghematan yang lebih ketat, menjadi langkah penting untuk menjaga konsistensi kinerja lingkungan dalam periode berikutnya.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan pada aspek pengendalian lingkungan, capaian kinerja keselarasan secara umum tetap

menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan melakukan perbaikan pada area yang belum maksimal, PPS Cilacap diharapkan dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja secara menyeluruh pada triwulan-triwulan selanjutnya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW II	Capaian Realisasi (%)
Tim Kerja Dukungan Manjerial	Gerakan Bersih Pantai	29.576.000	-	-
Tim Kerja Tata Kelola, Sarana, dan Prasarana	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelabuhan dan Bandar Usaha Sehat (PBUS)	8.760.000		
	Pelaksanaan Tata Kelola Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	36.225.000	4.550.000	12,56
TOTAL		74.561.000	4.550.000	6,10

Tabel 23 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 7

SASARAN KEGIATAN 4

Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (surat ukur dan/atau sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. IKU ini merupakan IKU dengan periode pengukuran triwulanan.

Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	670	1.259	187,91

Tabel 24 Target dan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan II 2025	Naik/Turun (%)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	851	1.259	47,93

Tabel 25 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pelaksanaan Penerbitan SKKP pada kapal Izin Daerah dapat dilaksanakan secara optimal salah satunya dikarenakan adanya kebijakan penerbitan melalui mekanisme pembaruan tanpa dilakukan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024, jumlah sertifikat kelaikan kapal yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap naik sebesar 47,93%.

Capaian realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700	1.259	179,85

Tabel 26 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian kinerja pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Kelaikan Penangkapan Ikan (SKKP) untuk kapal dengan izin daerah pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu faktor utama yang mendukung capaian ini adalah adanya kebijakan penerbitan SKKP melalui mekanisme pembaruan, yang dilakukan tanpa pemeriksaan ulang kelaikan kapal secara fisik, selama persyaratan administratif terpenuhi dan tidak terdapat perubahan signifikan pada kondisi kapal. Kebijakan ini dinilai efektif dalam

mempercepat proses penerbitan serta mengurangi beban kerja teknis di lapangan.

Selain itu, seluruh proses penerbitan SKKP pada Triwulan II telah dilakukan secara *online* melalui aplikasi SICEFI, yang memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan surat secara digital. Mekanisme ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses.

Dalam pelaksanaannya, Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) tetap menjalankan tugas pemeriksaan secara bergantian dan terjadwal, menyesuaikan dengan beban pekerjaan aktual serta jumlah permohonan yang masuk. Fleksibilitas ini memungkinkan distribusi kerja yang merata, sekaligus memastikan bahwa permohonan yang memerlukan pemeriksaan fisik tetap dapat dilayani tanpa mengganggu proses lainnya.

Keterpaduan antara kebijakan pembaruan tanpa pemeriksaan fisik, pemanfaatan teknologi informasi melalui SICEFI, serta pengelolaan beban kerja secara adaptif menjadi kombinasi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan penerbitan SKKP. Dengan pendekatan ini, PPS Cilacap mampu menjaga kinerja layanan perizinan kapal tetap optimal meskipun di tengah berbagai keterbatasan sumber daya.

SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan II Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut;

INDIKATOR KINERJA UTAMA 11

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)

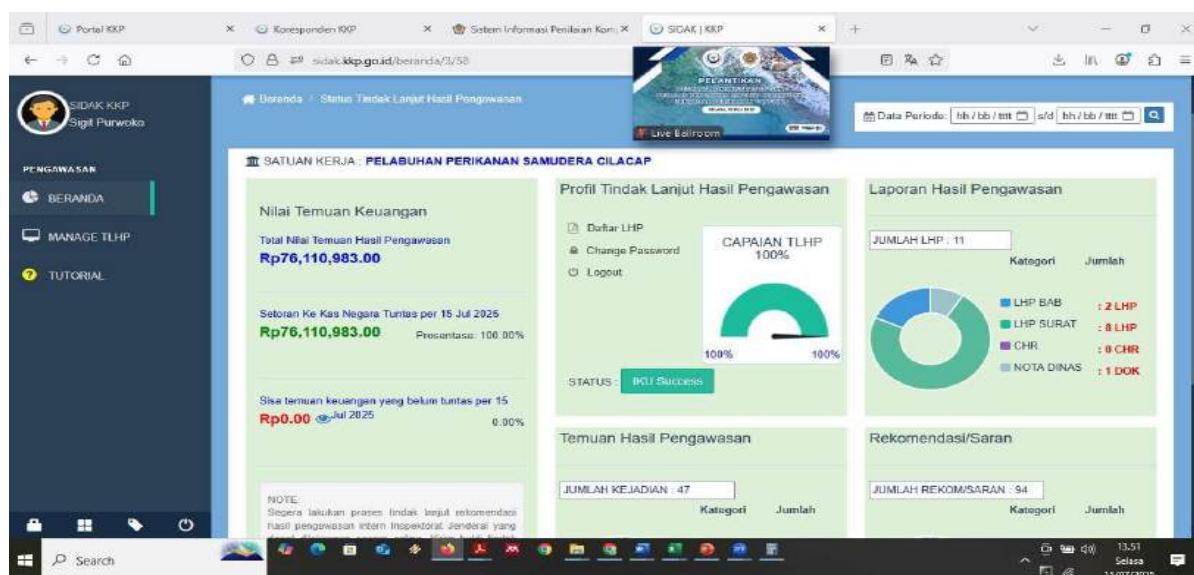
Indikator ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada tahun 2019 s.d. tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85	100	117,65

Tabel 27 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100%. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP, seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan aplikasi SIDAK KKP sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 7 Screen shot Aplikasi SIDAK per 15 Juli 2025

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan II 2025	Naik/Turun (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	100	100	—

Tabel 28 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini tetap pada capaian maksimal yakni 100% dan semua hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti.

Capaian Triwulan II terhadap target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85	100	117,65

Tabel 29 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Terhadap target Tahun 2025, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah melebihi angka target dengan capaian sebesar 117,65%.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Hasil rekomendasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh PPS Cilacap. Tindak lanjut ini mencerminkan komitmen PPS Cilacap dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Langkah cepat dalam merespons rekomendasi pengawasan juga menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal dan koordinasi antarunit di PPS Cilacap berjalan secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap temuan atau potensi perbaikan yang diidentifikasi dapat segera ditangani secara tuntas.

Selain itu, penyelesaian seluruh rekomendasi pengawasan menjadi indikator bahwa PPS Cilacap memiliki sistem manajemen kinerja dan tata kelola yang responsif, yang tidak hanya fokus pada pencapaian *output*, tetapi juga memperhatikan proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian, tindak lanjut atas hasil pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan integritas kelembagaan. Selanjutnya, konsistensi dalam merespons pengawasan dan melakukan perbaikan akan menjadi kekuatan penting bagi PPS Cilacap dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja sektor perikanan tangkap secara menyeluruh.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW II	Capaian Realisasi (%)
Tim Kerja Dukungan Manajerial	'Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit	16.980.000	–	–
	Laporan Keuangan dan BMN	28.280.000	1.110.000	3,93
TOTAL		45.260.000	1.110.000	2,45

Tabel 30 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11

INDIKATOR KINERJA UTAMA 13

Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indikator ini diperoleh dari nilai yang diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan IKU dengan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh seluruh ASN PPS Cilacap sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat hasil pengukuran IP ASN dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan nilainya dapat diakses melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/250>.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan target 82 (delapan puluh dua) indeks profesional ASN PPS Cilacap. Sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, nomor B. 2761 /DJPT.1/TU.410/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama IP ASN Semester I Tahun 2025 lingkup DJPT, capaian

kinerja PPS Cilacap dalam penilaian indeks profesionalisme adalah indeks 83,42.

Target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	82	83,42	101,73

Tabel 31 Indeks Profesionalitas ASN PPS Cilacap (Indeks)

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan II 2025	Naik/Turun (%)
Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	81,7	83,42	2,10

Tabel 32 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	92	83,42	90,67

Tabel 33 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengelolaan sumber daya manusia di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) didukung oleh sejumlah faktor strategis. Salah satunya adalah tersedianya aplikasi Emilea, yang mempermudah proses administrasi kepegawaian dan pelaporan kinerja. Selain itu, banyaknya pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek), *workshop*, dan seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mendorong peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.

Dari sisi dimensi kualifikasi, PPS Cilacap secara aktif mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya ini masih terus berjalan, sejalan dengan semangat pengembangan kapasitas individu yang

menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional.

Sementara dalam dimensi kompetensi, pegawai diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pelatihan teknis, manajerial, dan sosial kultural, baik melalui kerja sama dengan Balai Diklat Aparatur Sukamandi maupun dengan lembaga dan instansi lain yang relevan. Untuk mendukung hal ini, telah diterbitkan Memorandum Kepala Pelabuhan Nomor 326/PPSC/KP.510/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang menginstruksikan seluruh pegawai PPS Cilacap untuk mengikuti sejumlah diklat, antara lain:

1. Diklat Pengelolaan Konflik Kepentingan (8 JP),
2. Diklat Pelatihan Pengantar Empati untuk Pelayanan Prima (12 JP),
3. Diklat Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Mendukung Implementasi EPIT dan PNBK Pasca Produksi (16 JP).

Melalui pelatihan-pelatihan tersebut, pegawai PPS Cilacap berhasil menunjukkan hasil pengembangan kompetensi yang maksimal, sejalan dengan kebutuhan organisasi. Pada dimensi kinerja, pegawai juga didorong untuk memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan IKU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memperoleh penilaian dengan kategori Baik hingga Sangat Baik, yang menunjukkan konsistensi antara target dan capaian kinerja.

Sedangkan dalam dimensi kedisiplinan, berbagai upaya dilakukan seperti sosialisasi kode etik, pengawasan, dan penanaman nilai-nilai integritas, agar hasil pada akhir tahun, PPS Cilacap dapat berhasil meraih penilaian kedisiplinan yang maksimal. Hal ini juga didukung oleh kesadaran pegawai untuk memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dan mengikuti seminar setiap tahun anggaran. Peran aktif pimpinan satuan kerja dalam memberikan contoh nyata dan mengawal capaian kompetensi individu turut menjadi faktor penting dalam terciptanya budaya kerja yang progresif.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan teknis, seperti adanya *gap* waktu pengunggahan data ke aplikasi MyASN/SIASN dan penarikan data oleh Biro SDM Aparatur, yang menyebabkan keterlambatan pembaruan nilai. Selain itu, kesalahan dalam penginputan kategori diklat, seperti mencantumkan webinar sebagai bimbingan teknis, juga masih ditemukan.

Sebagai saran perbaikan ke depan, perlu dilakukan sosialisasi ulang mengenai tata cara penginputan data di aplikasi MyASN/SIASN, serta koordinasi yang lebih erat dengan pengelola aplikasi kepegawaian, agar data yang diunggah dapat ditarik secara sempurna oleh Biro SDMAO KKP. Tak hanya itu, koordinasi dengan unit Eselon I juga diperlukan agar ke depan dapat

dihadirkan rangkaian diklat yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), baik untuk Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu, maupun Jabatan Struktural.

Dengan penguatan berkelanjutan di berbagai dimensi dan dukungan sistem yang lebih terintegrasi, PPS Cilacap diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara konsisten, guna mendukung pencapaian kinerja organisasi yang optimal dan berkelanjutan.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW II	Capaian Realisasi (%)
Tim Kerja Dukungan Manajerial	Dukungan Pengembangan, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional)	30.000.000	–	–

Tabel 34 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11

INDIKATOR KINERJA UTAMA 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76	100	131,58

Tabel 35 Target dan Realisasi IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap (Persen)

Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

IKU ini belum dapat dibandingkan karena IKU ini baru ditetapkan menjadi IKU di awal Tahun 2025 dan IKU Tahun 2024 tidak terdapat IKU ini.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), diketahui bahwa capaian pengumuman RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2025 telah dievaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana satuan kerja di lingkungan KKP telah menyusun dan mengumumkan rencana pengadaannya secara transparan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian indikator kinerja ini menjadi bagian penting dalam mengukur kepatuhan terhadap proses perencanaan pengadaan barang/jasa, serta menjadi salah satu instrumen akuntabilitas dalam tata kelola anggaran.

Hasil evaluasi tersebut memberikan gambaran tentang keseriusan dan kesiapan unit kerja dalam merencanakan pengadaan, sekaligus menjadi dasar untuk pembinaan dan perbaikan berkelanjutan. Dengan pengumuman RUP yang semakin terintegrasi melalui SIRUP, diharapkan proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KKP.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 16

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran diperoleh dari konversi nilai indikator dan bobot indikatornya, terdapat 8 (delapan) indikator antara lain revisi DIPA, deviasi RDP, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh PPS Cilacap sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Nota Dinas penyampaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025 Tanggal 9 Juli 2025 Hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target nilai 85 (delapan puluh lima). Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PPS Cilacap (Nilai) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	85	91,11	107,19

Tabel 36 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan II 2025	Naik/Turun (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	98,90	91,11	(7,87)

Tabel 37 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Realisasi Triwulan II	Target Tahun 2025	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	91,11	92	99,03

Tabel 38 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja Kementerian/Lembaga, yang mengacu pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L. Penilaian IKPA dilakukan dengan mempertimbangkan 13 indikator yang terbagi ke dalam aspek-aspek utama pelaksanaan anggaran, yakni: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Data Kontrak, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Konfirmasi Capaian Output, (5) Pengelolaan UP dan TUP, (6) Revisi DIPA, (7) Deviasi Halaman III DIPA, (8) LPJ Bendahara, (9) Rencana Kas (Renkas), (10) Kesalahan SPM, (11) Retur SP2D, (12) Pagu Minus, dan (13) Dispensasi.

Berdasarkan hasil penarikan data capaian IKPA Semester I Tahun 2025 melalui aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal penetapan target indikator IKPA di lingkungan KKP, diperoleh capaian IKPA untuk Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) pada Triwulan II adalah nilai 91,11.

Capaian penilaian IKPA PPS Cilacap mencakup 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja

1. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari:

- Revisi DIPA
- Deviasi Halaman III DIPA

Capaian nilai aspek ini adalah 100, yang menunjukkan perencanaan telah disusun secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

2. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari:

- Penyerapan Anggaran
- Belanja Kontraktual
- Penyelesaian Tagihan
- Pengelolaan UP dan TUP

- Dispensasi SPM
Capaian nilai aspek ini sebesar 88,82, dengan beberapa indikator masih belum mencapai nilai maksimal.
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari:
- Konfirmasi Capaian *Output*
Aspek ini mendapatkan nilai capaian sempurna yaitu 100, menunjukkan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan output yang direncanakan.

Namun demikian, dari hasil penilaian tersebut, masih terdapat indikator yang belum optimal, khususnya pada Deviasi Halaman III DIPA, yang hanya memperoleh nilai 13,47 dari bobot maksimal 15. Deviasi ini berpengaruh langsung terhadap nilai penyerapan anggaran, yang hanya mencapai nilai 55,86 dengan nilai akhir 11,17, jauh dari standar ideal. Selain itu, indikator Pengelolaan UP dan TUP walaupun sudah tinggi, yakni 99,41, namun nilai akhirnya tetap 9,94, menunjukkan adanya ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh adanya kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, serta realisasi anggaran yang belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tertuang dalam Halaman III DIPA. Selain itu, terdapat kendala dalam pengelolaan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang belum terealisasi secara optimal karena terkendala waktu dan proses kontraktual.

Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan, PPS Cilacap perlu meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan RPD yang telah direncanakan, meminimalisasi deviasi terhadap Halaman III DIPA, serta terus mengoptimalkan pengelolaan UP dan TUP. Dengan demikian, diharapkan capaian IKPA pada semester berikutnya dapat lebih maksimal dan mendukung kinerja keuangan yang lebih baik, akuntabel, dan tepat sasaran.

Saran masukan untuk perbaikan ke depan adalah guna meningkatkan capaian Nilai IKPA ke depan masih perlu ditingkatkan melalui konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan RPD yang ditetapkan sebagaimana pada halaman III DIPA serta melakukan pengelolaan UP dan TUP dengan baik dan optimal pada semester berikutnya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW II	Capaian Realisasi (%)
Tim Kerja Dukungan Manajerial	Laporan Program dan Kegiatan	40.000.000	–	–
	Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan BMN	45.080.000	–	–
TOTAL		85.080.000	–	–

Tabel 39 Kegiatan yang menunjang capaian IKU16

INDIKATOR KINERJA UTAMA 18

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5	92,35	104,35

Tabel 40 Target dan Realisasi IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan II 2025	Naik/Turun (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,89	92,35	3,89

Tabel 41 Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5	92,35	104,35

Tabel 42 Capaian Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) mencapai skor 92,35, yang termasuk dalam kategori A (Sangat Baik). Capaian ini mencerminkan kinerja pelayanan publik yang prima, berdasarkan penilaian dari 188 responden terhadap 11 jenis layanan yang tersedia.

Namun demikian, pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi nilai SKM PPS Cilacap tercatat mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan, nilai IKM PPS Cilacap masih tetap berada dalam kategori kinerja Sangat Baik, yang menandakan bahwa pelayanan secara umum masih mampu memenuhi harapan pengguna layanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data SKM, dapat disimpulkan bahwa:

- Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai dengan mutu kategori A (Sangat Baik), menandakan konsistensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah sarana dan prasarana (91,31) serta waktu penyelesaian (92,16), meskipun keduanya masih berada dalam kategori sangat baik dan menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan;
- Unsur persyaratan pelayanan tercatat sebagai unsur dengan nilai tertinggi, yaitu 3,75, menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap informasi dan dokumen persyaratan telah berjalan dengan baik;
- Jenis layanan yang mendapatkan IKM tertinggi adalah Pelayanan Penggunaan Transportasi, yang menandakan efektivitas layanan tersebut dalam memenuhi ekspektasi pengguna.

Untuk mendukung keberhasilan capaian IKM, PPS Cilacap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis, salah satunya adalah dengan menerbitkan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.102/PPSC/KP.440/I/2025 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Publik. Dalam surat tugas tersebut, petugas pelayanan diberikan mandat untuk secara

langsung melakukan survei kepada pengguna layanan segera setelah pelayanan diberikan. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang aktual dan objektif sebagai dasar evaluasi dan peningkatan layanan.

Langkah tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelayanan kepada publik. Dengan pelaksanaan survei yang terstruktur dan responsif, PPS Cilacap terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan agar kepuasan masyarakat dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada periode-periode berikutnya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW II	Capaian Realisasi (%)
Tim Kerja Kesyahbandaran	Koordinasi lintas sektor monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu satu atap	11.827.000	–	–
TOTAL		11.827.000	–	–

Tabel 43 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 18

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada tahun anggaran 2025, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 136.049.385.000 untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam tiga kegiatan utama, yakni Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, serta Dukungan Manajemen Internal di bawah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Namun hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp 82.771.866.587 atau sekitar 6,08% dari total pagu yang telah ditetapkan. Rendahnya tingkat penyerapan ini menjadi perhatian, mengingat pentingnya peran pelabuhan dalam mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan efisien.

Salah satu penyebab utama belum optimalnya serapan anggaran adalah belum terserapnya dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 116.849.000.000. Hal ini terjadi karena proses kontraktual untuk kegiatan *Technical Assistance to the Owner* (TAO) masih dalam tahap penyelesaian, sehingga dana tersebut belum dapat digunakan.

Selain itu, sebesar Rp 3.691.324.000 dari total anggaran tidak dapat dicairkan karena masih berada dalam status blokir, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kondisi ini semakin membatasi ruang gerak pelaksanaan program-program di lapangan.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, diperlukan upaya percepatan dalam penyelesaian proses administrasi dan kontraktual, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait. Hal ini penting agar target-target kinerja yang telah direncanakan pada tahun ini dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan sektor perikanan tangkap nasional.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 5 (lima) Sasaran Kinerja (SK) yang ingin dicapai dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk setiap Sasaran Kinerja (SK) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Memasuki akhir Triwulan II Tahun 2025, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif. Seluruh SK dan IKU berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan kinerja yang tidak hanya efektif namun juga efisien. Hal ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional.

Capaian kinerja tersebut tercermin dalam hasil pengukuran melalui aplikasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id), di mana PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 114,43% pada Triwulan II. Sementara itu, akumulasi capaian hingga akhir Triwulan II mencapai 114,24%. Kedua nilai tersebut berada dalam kategori “Istimewa” (rentang nilai 110–120) dan ditandai dengan indikator berwarna biru, dengan rincian sebagai berikut:

12. IKU 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak Rp. 2.766,04 Juta atau 120,00% dari target Triwulan II yaitu Rp. 1.686,78 Juta;
13. IKU 2 – Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak 11.926,84 Ton atau 108,43% dari target Triwulan II yaitu 11.000 Ton;
14. IKU 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai dengan Nilai 91,75 atau sebesar 109,23% dari target Triwulan II yaitu Nilai 84;
15. IKU 7 – Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 96,24 atau sebesar 120% dari target Triwulan II yaitu Nilai 30,1;

16. IKU 8 – Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan tercapai sebanyak 1.259 Kapal atau 120% dari target Triwulan II yaitu 670 Kapal;
17. IKU 9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan tercapai Nilai 0,36 atau 120% dari target Triwulan II yaitu Nilai 0,26;
18. IKU 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100 Persen atau 117,65% dari target Triwulan II yaitu 85%;
19. IKU 13 – Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Indeks 83,42 atau 101,73% dari target Triwulan II yaitu Indeks 82;
20. IKU 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai 100 Persen atau 120,00% dari target Triwulan II yaitu 76%;
21. IKU 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 91,11 atau 107,19% dari target Triwulan II yaitu Nilai 85; dan
22. IKU 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Nilai 92,35 atau 104,35% dari target Triwulan II yaitu Nilai 88,5.

Dengan demikian, meskipun secara umum capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selama Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Pemetaan tantangan dan langkah korektif yang tepat, PPS Cilacap diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.

Permasalahan dan Tindaklanjuti

Meskipun capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap pada Triwulan II Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dan berada pada kategori "Istimewa", terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan segera agar tidak berdampak terhadap keberlanjutan capaian kinerja di periode selanjutnya. Berikut adalah beberapa tantangan beserta langkah tindak lanjut yang telah dan akan diambil:

1. Penurunan Penerimaan PNBP (IKU 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)

Penurunan sebesar 22,42% pada penerimaan PNBP dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi indikator awal adanya dinamika dalam pola pelayanan. Meskipun target triwulan tetap tercapai, perubahan sistem pembayaran serta penurunan pada beberapa jenis layanan seperti

penggunaan tanah dan bangunan, cold storage, serta jasa pelabuhan lainnya berpengaruh terhadap total penerimaan.

Tindak Lanjut: PPS Cilacap akan melakukan evaluasi terhadap layanan yang mengalami penurunan kontribusi, dan menyusun strategi penyesuaian model penerimaan guna menjaga stabilitas arus kas serta mengantisipasi fluktuasi pada periode selanjutnya.

2. Penurunan Produksi Perikanan Akibat Cuaca (IKU 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap)

Volume produksi perikanan tangkap mengalami penurunan signifikan akibat faktor cuaca ekstrem, terutama adanya angin Monsun Tenggara, serta tradisi tahunan nelayan untuk tidak melaut pada bulan-bulan tertentu. Hal ini mengurangi hari melaut dan berdampak langsung pada hasil tangkapan.

Tindak Lanjut: PPS Cilacap akan mengembangkan perencanaan operasional yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap pola cuaca, serta memanfaatkan sistem informasi cuaca secara lebih intensif guna mendukung keputusan waktu melaut yang lebih tepat dan aman bagi nelayan.

3. Tingginya Konsumsi Listrik dan Air (IKU 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan)

Capaian nilai pengendalian lingkungan belum maksimal, ditandai dengan indikator hasil yang hanya mencapai kurang dari 40%. Peningkatan konsumsi listrik di bulan Juni dan pemakaian air berlebih di bulan Mei mengindikasikan bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya masih perlu ditingkatkan.

Tindak Lanjut: Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pola konsumsi energi dan air, serta implementasi kebijakan penghematan yang lebih disiplin. Kampanye internal dan sistem pemantauan berkala juga akan diperkuat guna mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

4. Penurunan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKU 18 – Survei Kepuasan Masyarakat)

Meskipun nilai kepuasan masyarakat tetap berada dalam kategori "Sangat Baik", terdapat penurunan skor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sinyal awal bahwa kualitas pelayanan perlu ditingkatkan secara lebih konsisten.

Tindak Lanjut: PPS Cilacap akan melakukan survei lanjutan untuk mengidentifikasi area pelayanan yang perlu ditingkatkan, serta menindaklanjuti setiap masukan masyarakat secara cepat dan solutif guna membangun kepercayaan dan kepuasan publik secara berkelanjutan.

5. Realisasi Anggaran Masih Rendah

Sampai akhir Triwulan II, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 6,08%. Hal ini terutama disebabkan oleh belum selesainya sejumlah kontrak kegiatan serta masih adanya dana yang terblokir.

Tindak Lanjut: Untuk mengatasi hal ini, diperlukan percepatan proses administrasi, penyelesaian kontrak kegiatan tepat waktu, serta peningkatan koordinasi antarunit dalam pelaksanaan program-program strategis agar realisasi anggaran dapat lebih optimal di triwulan berikutnya.

Dengan mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan mengambil langkah korektif yang terarah, PPS Cilacap optimis dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja di Triwulan III dan IV. Keterlibatan aktif seluruh tim kerja, sinergi antar unit, serta penguatan tata kelola menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan dan mencapai target tahunan secara menyeluruh.

Penutup

Selaras dengan capaian terhadap Target Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan telah melakukan penyelesaian kendala agar terkendali. Kinerja pada dasarnya adalah Komitmen, Konsistensi dan Konsekuensi dalam merencanakan, melaksanakan, mencapai dan menghasilkan output yang berkualitas, yang akan berdampak pada kualitas hasil yang diharapkan. Untuk mencapainya, akan selalu diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak dalam melaksanakan komitmen yang telah ditetapkan. Komitmen harus direncanakan dengan cermat, intuitif, solusif, konstruktif dan inovatif untuk mengemban amanah (visi, misi, tujuan dan sasaran). Hasil kinerja yang tercapai tentu tidak hanya menjadi laporan yang selanjutnya akan didokumentasikan dan kemudian diarsipkan, namun harus menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan kedepan, dan dapat memberikan dampak dalam aplikasi nyata kebijakan pembangunan KP serta pemenuhan Komitmen dalam RPJM RI 2021-2024, Visi KKP, Misi Diektorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 2020-2024.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan harus dilakukan lebih cermat dan matang, dengan mempertimbangkan sasaran dan tujuan organisasi secara tepat sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dan faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan yang terjadi. Strategi dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan wawasan



untuk mengetahui perkembangan issue dan permasalahan terkini harus selalu diupayakan dalam memulai langkah di periode mendatang.

Akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) PPS Cilacap Periode Triwulan II Tahun 2025 diharapkan menjadi “cermin” sekaligus pertanggung jawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah dan tindakan kedepan dalam perencanaan. Dengan demikian harapan bahwa terbentuknya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud. Selain itu, LKj ini dapat juga menjadi salah satu kontribusi dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di periode mendatang.



LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Imas Masriah**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

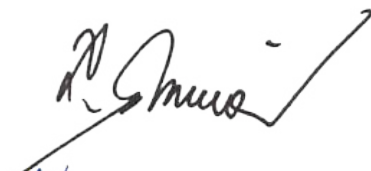
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap



Imas Masriah

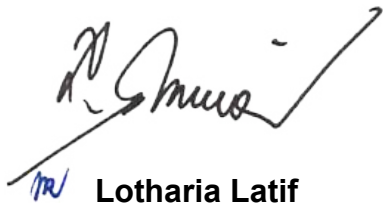
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.373,57
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	27.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	81
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5

NO	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	119.172.546.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	39.235.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.837.604.000
TOTAL		136.049.385.000

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap



Imas Masriah



MANUAL INDIKATOR KINERJA 2025



PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Kata Pengantar

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesehatan sehingga Manual IKU Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 dapat tersusun. Manual IKU ini disusun sebagai pedoman dalam mengukur Indikator Kinerja Utama PPS Cilacap, sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat dipantau pencapaiannya.

Cilacap, 16 April 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the top inner edge of the stamp reads "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN". The text in the center of the stamp reads "DIREKTORAT JENDERAL", "PELABUHAN", "PERIKANAN SAMUDERA", and "CILACAP". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Imas Masriah, S.Pi" is printed.

Imas Masriah, S.Pi

Daftar Isi

1. Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
7. Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan
9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK)
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
15. Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Cilacap
Nama IKU	: Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap
Definisi	: • Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
Formula Perhitungan	: Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: $\text{Nilai TW I} = \text{capaian TW I}$; $\text{Nilai TW II} = \text{capaian TW I} + \text{TW II}$; $\text{Nilai TW III} = \text{capaian TW I} + \text{TW II} + \text{TW III}$; $\text{Nilai TW IV} = \text{capaian TW I} + \text{TW II} + \text{TW III} + \text{TW IV}$
Satuan	: Juta Rupiah
Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 3.373,57 Juta

2. Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap meningkat
Nama IKU	:	Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap
Definisi	:	Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.
Formula Perhitungan	:	$Prod_{Perikanan\ Tangkap} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$
		Keterangan: Prod_{PTL} = Produksi Perikanan Tangkap Laut Prod_{PTPD} = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I Nilai TW II = capaian TW I + TW II Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	:	Ton
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	27.000 Ton

3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	: Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap
Definisi	: • Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. • Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNPB yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.
Formula Perhitungan	: Indikator I : $\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker)}} \times 80\%$ Indikator II : Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 % Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator 2
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 100 %

4. Tingkat Kinerja PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	: Tingkat Kinerja PPS Cilacap
Definisi	: Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Formula Perhitungan

$$NK = \frac{\text{Bobot(A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$$

Keterangan :

1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Parameter penilaian meliputi:

Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah	Periode Pelaporan	: Triwulanan
Sumber Data	: PPS Cilacap	Metode Cascading	: Buat Baru
Pola Perhitungan	: Rata-rata	Target	: 84

***Penentuan target berdasarkan capaian tahun sebelumnya**
Jika tercapai kategori Sangat Baik, maka target min. 87
Jika tercapai kategori Baik, maka target min. 66

5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	: Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap
Definisi	: Merupakan indikator yang menunjukkan: 1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula Perhitungan	: 1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = $100 - [(jumlah\ permintaan\ verifikasi\ SHTI / jumlah\ SHTI\ yang\ diterbitkan) \times 100]$ (x3) Tingkat Pelayanan = $x1 + x2 + x3$
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 85

6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	: Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap
Definisi	: Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
Formula Perhitungan	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 33

7. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap
Definisi	:	- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. - SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.

Formula Perhitungan	:	Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)
		Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN)
		Kategori
		Kurang : 0-30 Baik : >61 - 80
		Cukup : >30-60 Sangat Baik : >81 – 100

Keterangan:

Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)

Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	:	Nilai	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi	Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Sumber Data	:	PPS Cilacap	Metode Cascading	:	Buat Baru
Pola Perhitungan	:	Rata-rata	Target	:	30,1

8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Cilacap
Nama IKU	: Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
Definisi	: Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh (nama satker)
Formula Perhitungan	: Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh (nama satker)
	Keterangan: Nilai TW I = capaian 2023 + 2024 + TW I; Nilai TW II = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II; Nilai TW III = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	: Kapal
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 700 Kapal

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Cilacap
Nama IKU	: Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
Definisi	: • Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. • Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. • Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut: - Nilai $\leq 0,25$ kategori "Kurang"; - Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori "Cukup"; - Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori "Baik"; - Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori "Sangat Baik";

Formula Perhitungan : Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.

(1) Kepatuhan s.d. 5 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$
(2) Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$
(3) Kepatuhan >30 s.d. 100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$
(4) Kepatuhan ≥ 100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT}}$
(5) Kepatuhan ≥ 100 GT Laut Lepas	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT Laut Lepas}}$
(6) Kepatuhan ≥ 300 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 300 \text{ GT}}$
Total Nilai	$= \frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{6 \text{ (sesuai range ukuran kapal yg ada di pelabuhan)}}$

Keterangan :

- (a) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB
- (b) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE)
- (c) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas)
- (d) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT)
- (e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a)
- (f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b)
- (g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c)
- (h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan



Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Timja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	0,26 (Kategori Cukup)

10. Nilai PM Pembangunan ZI PPS Cilacap (yang telah dinilai WBK)



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	: Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan PPS Cilacap
Definisi	: Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di (nama satker) yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
Formula Perhitungan	: Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 75,5

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap
Definisi	: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan
Formula Perhitungan	: $RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$ Keterangan: RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 85

12.Nilai PM SAKIP PPS Cilacap



- Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
- Nama IKU : Nilai PM SAKIP PPS Cilacap
- Definisi : Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
- Formula Perhitungan : Nilai PM SAKIP (nama satker) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di (nama satker).

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

- Satuan : Nilai
- Tingkat Validitas : Output kendali tinggi
- Sumber Data : PPS Cilacap
- Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
- Polarisasi : Maximize
- Periode Pelaporan : Tahunan
- Metode Cascading : Dipersempit
- Target : 88

13. Indeks Profesionalitas ASN di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	: Indeks Profesionalitas ASN di PPS Cilacap
Definisi	: Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Formula Perhitungan	: Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).
Satuan	: Indeks
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Biro Kepegawaian
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Semesteran
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 87

14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	: Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap
Definisi	: Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Komponen Pembentuk
Target	: 76

15.Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	: Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap
Definisi	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: • Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%); • Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%); • Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); • Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); • Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 81

16.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPS Cilacap
Definisi	: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Formula Perhitungan	: Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Semesteran
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 92

17.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap



- Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
- Nama IKU : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap
- Definisi : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
- Formula Perhitungan : NKPA (nama satker) didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:
- | Variabel | Uraian | Bobot |
|------------------|-------------------|-------|
| Efektivitas (75) | 1. Capaian RO | 75 |
| | 1. Penggunaan SBK | 10 |
| Efisiensi (25) | 2. Efisiensi SBK | 15 |
- Satuan : Nilai
- Tingkat Validitas : Output kendali rendah
- Sumber Data : PPS Cilacap
- Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
- Polarisasi : Maximize
- Periode Pelaporan : Tahunan
- Metode Cascading : Komponen Pembentuk
- Target : 71,5

18.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap
Definisi	: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Formula Perhitungan	: $\text{Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)} / \text{diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP}$
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPS Cilacap
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 88,5



Terima Kasih

NKO Juni - 2025

Download

Unit Kerja : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Skor Kinerja : 114.43

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 🗑
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung➕

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Juni	Capaian Juni	%	Target s/d Juni	Capaian s/d Juni	%	Tgl Input
SK.01	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap						128,00			128,00		
IKSK.01.01	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Juta	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3.373,57	1.886,78	2.766,04	120,00	1.886,78	2.766,04	120,00	04-Jul-2025 15:04
SK.02	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat						108,43			108,43		
IKSK.02.02	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	27.000,00	11.000,00	11.928,84	108,43	11.000,00	11.928,84	108,43	04-Jul-2025 15:04
SK.03	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab						112,58			112,54		
IKSK.03.03	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tambah Data Dukung➕	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2025 15:04
IKSK.03.04	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Rata-rata	84,00	84,00	91,75	109,23	188,00	180,83	107,04	04-Jul-2025 15:04
IKSK.03.05	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tambah Data Dukung➕	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2025 15:04
IKSK.03.06	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tambah Data Dukung➕	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	33,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2025 15:04
IKSK.03.07	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Rata-rata	30,10	30,10	98,24	120,00	80,20	187,23	120,00	04-Jul-2025 15:04
SK.04	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap						120,00			120,00		
IKSK.04.08	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	700,00	670,00	1.259,00	120,00	670,00	1.259,00	120,00	04-Jul-2025 15:04
IKSK.04.09	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Tambah Data Dukung➕ Data Dukung1 🗑	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0,28	0,28	0,38	120,00	0,28	0,38	120,00	04-Jul-2025 15:04
SK.05	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap						110,19			110,19		
IKSK.05.10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,50	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2025 15:04
IKSK.05.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,85	85,00	100,00	117,85	04-Jul-2025 15:04
IKSK.05.12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2025 15:04
IKSK.05.13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	82,00	83,42	101,73	82,00	83,42	101,73	04-Jul-2025 15:04
IKSK.05.14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76,00	76,00	100,00	120,00	76,00	100,00	120,00	04-Jul-2025 15:04
IKSK.05.15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tambah Data Dukung➕	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2025 15:04
IKSK.05.16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	85,00	91,11	107,19	85,00	91,11	107,19	04-Jul-2025 15:04
IKSK.05.17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	0,00			0,00	0,00		04-Jul-2025 15:04
IKSK.05.18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,50	88,50	92,35	104,35	88,50	92,35	104,35	04-Jul-2025 15:04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

MEMORANDUM
NOMOR 417 /PPSC/PI.310/VII/2025

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
Hal : Data dukung capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025
Lampiran : Satu Lembar
Tanggal : 3 Juli 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada Tim Kerja Pelayanan Usaha dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)

- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA di PPS Cilacap adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan target dan capaian Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	1.686,78	2.766,04	163,98

Penerimaan PNBP PPS Cilacap terbesar masih berasal dari penerimaan tambat sebesar Rp. 1.874.199.090,- dan penerimaan terbesar kedua berasal dari Penerimaan Penggunaan Tanah/Bangunan yaitu sebesar Rp. 322.382.675.

- Perbandingan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024:

IKU	REALISASI TW II Tahun 2024	REALISASI TW II Tahun 2025	NAIK/TURUN (%)
Nilai PNBPNon SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	3.565,22	2.766,04	(22,42)

Apabila dibandingkan dengan penerimaan PNBPNon SDA Triwulan II Tahun 2024, penerimaan PNBPNon SDA di Triwulan II Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 22.42 %. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai PNBPNon SDA dari sektor Pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan, pelayanan cold storage penggunaan transportasi, pelayanan peralatan, pelayanan tambat labuh, pelayanan jasa kebersihan, pelayanan jasa dock dan jasa listrik.

Terkait dengan capaian IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukungnya. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.


Daniel Wahyu Setyawan

AKUN	URAIAN	Sd bulan Mei 2025	Juni 2025	Jml	% Bln	% Thn	Triwulan II 2024	Kenaikan / Penurunan
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	335.403.947	19.966.210	355.370.157				
	Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster	227.804.994	10.750.000	238.554.994	15,36	28,40	549.969.300	-311.414.306
	Pemeliharaan Prasarana	56.951.244	2.687.500	59.638.744	15,36	28,40	138.109.825	-78.471.081
	Bangunan	19.124.227	5.064.710	24.188.937	23,83	9,49	179.081.100	-154.892.163
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penumpukan. Barang	0	0	0	0,00	0,00	82.610.000	-82.610.000
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penjemuran jaring / ikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	Pelayanan Jasa Cold Room dan Freezer	24.714.982	0	24.714.982	0,00	52,84	49.764.940	-25.049.958
	Pelayanan Jasa Penggunaan Transportasi	6.000.000	1.200.000	7.200.000	34,66	17,33	26.150.000	-18.950.000
	Pelayanan Jasa Peralatan dan Gerobak Dorong	808.500	264.000	1.072.500	105,60	35,75	2.376.000	-1.303.500
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	2.074.417.658	336.253.496	2.410.671.154				
	Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh	1.626.921.640	247.277.450	1.874.199.090	292,35	184,65	1.943.967.207	-69.768.117
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian	119.721.000	25.565.000	145.286.000	101,49	48,06	139.461.000	5.825.000
	Pelayanan Jasa Pas Langganan	71.175.000	14.235.000	85.410.000	143,72	71,86	80.580.000	4.830.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan	33.308.076	8.446.520	41.754.596	67,57	27,84	81.475.392	-39.720.796
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam	111.550.100	17.763.900	129.314.000	142,11	86,21	141.189.700	-11.875.700
	Pelayanan Jasa Air	2.112.990	490.980	2.603.970	170,78	75,48	1.499.390	1.104.580
	Pelayanan Jasa Dock	25.640.000	7.840.000	33.480.000	1176,00	418,50	41.640.000	-8.160.000
	Pelayanan Jasa Listrik	83.988.852	14.634.646	98.623.498	104,17	58,50	106.651.043	-8.027.545
	JUMLAH PNBPFUNGSIONAL	2.409.821.605	356.219.706	2.766.041.311	126,71	81,99		

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

MEMORANDUM
NOMOR 457/PPSC/PI.310/VII/2025

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Hal : Data dukung capaian kinerja TW II Tahun 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Tanggal : 16 Juli 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan di Tim Kerja Operasional Pelabuhan dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut:

1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap (Ton)

- Indikator ini merupakan jumlah produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) dalam bentuk basah yang tercatat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	11.000	11.926,84	108,43

Volume produksi pada Triwulan II Tahun 2025 didominasi oleh jenis ikan seperti Cumi Karet, Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, dan Layur. Meski capaian kumulatif mencapai 108,43%, terjadi penurunan produksi pada Triwulan II dibandingkan dengan triwulan I karena penundaan keberangkatan kapal pasca perayaan Idul Fitri, Tahun Baru Imlek, dan Sedekah Laut, serta akibat kondisi cuaca buruk yang menghambat operasi penangkapan.

- Perbandingan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2024:

IKU	REALISASI TW II 2024	REALISASI TW II 2025	NAIK/ TURUN (%)
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	10.778,91	6.684,49	62.01

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan signifikan sebesar 38%. Hal ini terutama disebabkan oleh penundaan aktivitas melaut dan kondisi cuaca ekstrem yang membatasi kegiatan penangkapan ikan.

2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

- Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja operasional pelabuhan berdasarkan kriteria teknis dan operasional sesuai dengan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan. Penilaian meliputi aspek administrasi dan sistem informasi, fasilitas pelabuhan, pelayanan umum, serta investasi dan industri.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	91,75	109,23

Capaian kinerja operasional pelabuhan pada Triwulan II tahun 2025 mencapai nilai 91,75, yang termasuk dalam kategori *sangat baik*. Nilai tersebut merupakan hasil dari Evaluasi Kinerja (EVKIN) yang mencakup 27 komponen penilaian. Capaian ini didorong oleh meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, pelayanan tambat-labuh, frekuensi pengiriman data (PIPP), dan distribusi BBM.

- Perbandingan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024

NO	IKU	REALISASI TW II 2024	REALISASI TW II 2025	NAIK/ TURUN (%)
1	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	87,83	91,75	4,46

Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 4,46%. Kenaikan ini merupakan hasil dari upaya peningkatan pelayanan dan operasional pelabuhan secara berkelanjutan.

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukung kedua IKU tersebut untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yatim Kurniadi



**DATA DUKUNG IKU 2
VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TRIWULAN II
(BULAN JANUARI S.D JUND)
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan Pihak kedua, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 24 Januari 2025, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

- a. Sasaran Program : Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- b. IKU 2 : Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton);
- c. Deskripsi : Merupakan indikator volume produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- d. Formula perhitungan : Penjumlahan volume produksi perikanan di laut dan di perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- e. Data Dukung berupa : Rekapitulasi data jumlah produksi di PPS Cilacap.
- f. Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terdiri dari ikan yang didaratkan dari kapal-kapal yang bongkar di PPS Cilacap maupun ikan yang berasal dari luar Cilacap yang diangkut ke PPS Cilacap dengan angkutan darat untuk dipasarkan ke konsumen di Cilacap.

2. Lokasi

Lokasi pendataan terkait data produksi adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Pelaksanaan kegiatan pengambilan data produksi di lakukan dengan metode Sampling dan Sensus.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan pendataan produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap sebanyak 11 orang, untuk pendataan kapal > 5 GT sebanyak 10 orang dan untuk pendataan kapal < 5 GT sebanyak 1 orang. Dalam Kegiatan pendataan produksi, form yang digunakan sebagai alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL3;

3. HASIL KEGIATAN

Hasil Kegiatan Pendataan ini dilakukan proses pengolahan data, kemudian dituangkan dalam laporan harian, berupa laporan produksi harian, yang akan dibuat sebagai dasar laporan mingguan dan bulanan, dapat kita lihat data volume produksi sampai dengan triwulan II, Sampai dengan bulan Juni 2025 dan Jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap :

No	Bulan	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	Januari	1.306,27	28.994.199.000
2	Februari	935,71	24.094.214.000
3	Maret	3.000,37	79.282.409.000
4	April	1.193,95	33.914.437.000
5	Mei	2.442,46	69.522.135.000
6	Juni	3.048,08	88.066.303.640
7	Juli		
8	Agustus		
9	September		
10	Oktober		
11	November		
12	Desember		
	Jumlah	11.926,84	323.873.697.640

Perbandingan Volume dan Nilai Produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan antara tahun 2025 dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah. Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk volume produksi pada tahun 2025 mengalami penurunan meskipun jumlah kapal yang mendaratkan mengalami peningkatan. Namun untuk nilai produksi pada periode Triwulan II tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari nilai produksi pada Triwulan II tahun 2024 yang disebabkan karena harga ikan lebih tinggi dibandingkan dengan harga ikan pada Tri Wulan II tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya penundaan kapal yang melakukan keberangkatan kapal setelah perayaan Idul Fitri, Tahun Baru Imlek dan Sedekah Laut serta adanya cuaca yang buruk yang menyebabkan produksi setiap kapal mengalami penurunan/sedikit dan menyebabkan harga ikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan volume dan nilai produksi pada tahun 2024.

BULAN	VOLUME(Kg)		NILAI PRODUKSI (Rp)	
	2024	2025	2024	2025
JANUARI	3.172.338	1.306.271	52.855.122.000	28.994.199.000
FEBRUARI	2.098.375	935.705	37.456.810.000	24.094.214.000
MARET	1.998.137	3.000.368	36.469.275.000	79.282.409.000
APRIL	2.173.253	1.193.954	37.442.789.000	33.914.437.000
MEI	2.396.563	2.442.462	43.106.840.000	69.522.135.000
JUNI	6.209.098	3.048.076	108.083.211.000	88.066.303.640
JUMLAH	18.047.764	11.926.836	315.414.047.000	323.873.697.640

4. Jenis Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap antara lain adalah :

Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, Lemadang, Layur, Albakora, Ikan Pedang (meka), Ikan Setan (Gindara), Setuhuk hitam, Setuhuk Loreng, Nyunglas, Hiu Lalaek (Cucut Selendang), Hiu Lanjam (Cucut lanjaman), Hiu Tikus (Cucut pahitan), Cumi Karet, Layang Benggol, Manyung, Tongkol Pisang Cerutu (Lisong), Hiu

Anjing (Cucut Cakilan), Hiu Monyet (Cucut Tikusan), Ikan Layaran, Sunglir, dan lain-lain.

Demikian laporan data produksi dan nilai produksi yang dapat kami laporkan dan sebagai bahan kepentingan lebih lanjut.

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'Y' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Yatim Kurniadi

NO	PELABUHAN PERIKANAN	TAHUN		
		2024	2025	
		VOLUME (Kg)	VOLUME (Kg)	TON
4	PPS CILACAP	18.047.764	11.926.836	11.926,84
JANUARI		3.172.338	1.306.271	
FEBRUARI		2.098.375	935.705	
MARET		1.998.137	3.000.368	
APRIL		2.173.253	1.193.954	
MEI		2.396.563	2.442.462	
JUNI		6.209.098	3.048.076	

NO	PELABUHAN PERIKANAN	TAHUN		
		2024	2025	
		NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	Milyar
4	PPS CILACAP	315.414.047.000	323.873.697.640	323,87
JANUARI		52.855.122.000	28.994.199.000	
FEBRUARI		37.456.810.000	24.094.214.000	
MARET		36.469.275.000	79.282.409.0005	
APRIL		37.442.789.000	33.914.437.000	
MEI		43.106.840.000	69.522.135.000	
JUNI		108.083.211.000	88.066.303.640	

DATA BULAN JANUARI 2025

No	JENIS IKAN	JANUARI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	ALBAKORA	1.698	50.940.000	30.000
2	ALU-ALU	32	768.000	24.000
3	BARAKUDA	16	384.000	24.000
4	BAWAL HITAM	213	9.585.000	45.000
5	BAWAL PUTIH	536	101.840.000	190.000
6	BAWAL SABIT (CASPER)	8	144.000	18.000
7	BELO/SELANGET	3.783	11.349.000	3.000
8	BILIS	7.714	23.142.000	3.000
9	CAKALANG	261.941	4.191.056.000	16.000
10	CUMI KARET	420.052	10.501.300.000	25.000
11	GABUS LAUT	439	7.902.000	18.000
12	GULAMAH	2.941	44.115.000	15.000
13	HIU ANJING (C. CAKILAN)	284	3.408.000	12.000
14	HIU LALAEK (C. SELENDANG)	1.907	15.256.000	8.000
15	HIU LANJAM (C. LANJAMAN)	2.509	35.126.000	14.000
16	HIU MONYET (C. TIKUSAN)	1.852	22.224.000	12.000
17	HIU TIKUS (C. PAITAN)	1.701	20.412.000	12.000
18	IKAN AYAM-AYAM	100	1.800.000	18.000
19	IKAN LIDAH	162	4.050.000	25.000
20	IKAN PEDANG	20.133	601.749.000	29.889
21	IKAN SEBELAH	53	1.325.000	25.000
22	IKAN SETAN (GINDARA)	501	10.521.000	21.000
23	JAMBRET	5.729	114.580.000	20.000
24	KEMBUNG	2.325	58.125.000	25.000
25	KERONG	1.116	33.480.000	30.000
26	KEROSOK	2.641	92.435.000	35.000
27	KUWE	408	12.240.000	30.000
28	LAYANG BENGGOL	39.972	559.608.000	14.000
29	LAYARAN	3.450	75.900.000	22.000
30	LEMADANG	80.391	1.286.256.000	16.000
31	MADIDIHANG	114.137	3.880.658.000	34.000
32	MANYUNG/JAHAN	6.810	102.150.000	15.000
33	NYUNGLAS (TENGGIRI)	2.337	70.162.000	30.022
34	OPAH (SEMAR)	50	500.000	10.000
35	PARI KELAPA	294	2.058.000	7.000

36	PARI KELELAWAR (PLAMPANGAN)	89	1.068.000	12.000
37	REMANG	2.132	59.696.000	28.000
38	SELAR BENTONG	1.140	17.100.000	15.000
39	SETUHUK HITAM (MARLIN)	6.374	203.910.000	31.991
40	SETUHUK LORENG (GEPENG)	1.583	44.324.000	28.000
41	SUNGLIR	440	7.920.000	18.000
42	TETENGKEK	147	1.911.000	13.000
43	TIGAWAJA	865	21.625.000	25.000
44	TK. MADIDIHANG	28.497	541.443.000	19.000
45	TK. MATA BESAR	178.698	3.395.262.000	19.000
46	TONGKOL PISANG CERUTU (LISONG)	26.899	292.220.000	10.864
47	TUNA MATA BESAR	68.531	2.192.992.000	32.000
48	TUNA SIRIP BIRU SELATAN	340	11.560.000	34.000
49	UDANG DOGOL	1.389	83.340.000	60.000
50	UDANG JERBUNG	912	173.280.000	190.000
TOTAL		1.306.271	28.994.199.000	

DATA BULAN FEBRUARI 2025

No	JENIS IKAN	FEBRUARI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	ALBAKORA	5.768	184.502.000	31.987
2	ALU-ALU	39	969.000	24.846
3	BARAKUDA	63	1.890.000	30.000
4	BAWAL PUTIH	397	79.400.000	200.000
5	BAWAL SABIT (CASPER)	2.893	66.539.000	23.000
6	BELO/SELANGET	3.414	10.242.000	3.000
7	BILIS	7.448	22.344.000	3.000
8	CAKALANG	68.400	1.075.966.000	15.730
9	COBIA	311	5.598.000	18.000
10	CUCUT BASTER (C. CAKILAN AIR)	255	2.805.000	11.000
11	CUMI KARET	233.128	6.870.900.000	29.473
12	DOGOL	627	37.620.000	60.000
13	GABUS LAUT	22	396.000	18.000
14	GULAMAH	1.640	24.600.000	15.000
15	HIU ANJING (C. CAKILAN)	308	3.589.000	11.653
16	HIU KODOK	395	4.495.000	11.380
17	HIU LALAEK (C. SELENDANG)	3.891	38.768.000	9.964
18	HIU LANJAM (C. LANJAMAN)	3.997	63.653.000	15.925
19	HIU MACAN (C. BUAS)	616	7.392.000	12.000
20	HIU MONYET (C. TIKUSAN)	739	10.202.000	13.805
21	HIU TAJI	1.005	4.020.000	4.000
22	HIU TIKUS (C. PAITAN)	1.920	26.880.000	14.000

23	IKAN LIDAH	136	3.400.000	25.000
24	IKAN PEDANG	21.311	680.578.000	31.936
25	IKAN SEBELAH	176	4.400.000	25.000
26	IKAN SETAN (GINDARA)	6.746	161.814.000	23.987
27	JAMBRET	5.239	104.780.000	20.000
28	JERBUNG	357	67.830.000	190.000
29	KEMBUNG	1.559	38.975.000	25.000
30	KERONG	1.525	45.750.000	30.000
31	KEROSOK	2.309	80.815.000	35.000
32	LAYANG BENGGOL	47.836	861.048.000	18.000
33	LAYARAN	2.210	52.658.000	23.827
34	LEMADANG	78.076	1.521.588.000	19.489
35	LAYUR	9.198	275.940.000	30.000
36	MADIDIHANG	135.389	5.365.862.000	39.633
37	MANYUNG/JAHAN	9.670	145.050.000	15.000
38	NYUNGLAS (TENGGIRI)	4.013	127.944.000	31.882
39	OPAH (SEMAR)	770	7.700.000	10.000
40	PARI BURUNG	30	210.000	7.000
41	PARI KAMPRET	12	144.000	12.000
42	PARI KEKEH	38	380.000	10.000
43	PARI KELAPA	310	2.170.000	7.000
44	PARI KELELAWAR (PLAMPANGAN)	322	3.426.000	10.640
45	REMANG	603	16.884.000	28.000
46	SELAR BENTONG	11.655	174.825.000	15.000
47	SETUHUK HITAM (MARLIN)	7.124	234.062.000	32.855

48	SETUHK LORENG (GEPENG)	1.316	43.344.000	32.936
49	SUNGLIR	1.494	31.524.000	21.100
50	TIGAWAJA	883	22.075.000	25.000
51	TK. MADIDIHANG	26.064	495.216.000	19.000
52	TK. MATA BESAR	172.348	3.274.612.000	19.000
53	TONGKOL BANYAR	88	880.000	10.000
54	TONGKOL PISANG CERUTU (LISONG)	2.472	20.594.000	8.331
55	TUNA MATA BESAR	45.625	1.624.536.000	35.606
56	TUNA SIRIP BIRU SELATAN	1.525	60.430.000	39.626
TOTAL		935.705	24.094.214.000	

DATA BULAN MARET 2025

No	JENIS IKAN	MARET		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	ALBAKORA	5.080	157.656.000	31.035
2	ALU-ALU	315	6.101.000	19.368
3	BARAKUDA	164	4.646.000	28.329
4	BAWAL HITAM	200	8.000.000	40.000
5	BAWAL PUTIH	293	58.600.000	200.000
6	BAWAL SABIT (CASPER)	694	13.904.000	20.035
7	BELO/SELANGET	5.663	16.989.000	3.000
8	BIJI NANGKA	9	135.000	15.000
9	BILIS	10.452	31.356.000	3.000
10	CAKALANG	343.981	4.973.800.000	14.460
11	CUCUT BASTER (C. CAKILAN AIR)	790	9.402.000	11.901
12	CUMI KARET	544.009	16.320.270.000	30.000
13	GULAMAH	1.872	28.770.000	15.369
14	HIU ANJING (C. CAKILAN)	4.865	55.065.000	11.319
15	HIU KODOK	11	99.000	9.000
16	HIU LALAEK (C. SELENDANG)	2.872	24.578.000	8.558
17	HIU LANJAM (C. LANJAMAN)	12.941	192.510.000	14.876
18	HIU MACAN (C. BUAS)	2.281	26.700.000	11.705
19	HIU MONYET (C. TIKUSAN)	10.505	111.043.000	10.570
20	HIU TAJI	22	88.000	4.000
21	HIU TETERI	424	9.540.000	22.500
22	HIU TIKUS (C. PAITAN)	15.865	222.110.000	14.000
23	IKAN AYAM-AYAM	53	477.000	9.000
24	IKAN LIDAH	340	8.500.000	25.000
25	IKAN PEDANG	60.364	1.849.059.300	30.632
26	IKAN SETAN (GINDARA)	3.251	86.641.300	26.651
27	KAKAP MERAH	913	50.035.000	54.803
28	JAMBRET	6.304	126.080.000	20.000
29	KEMBUNG	140	3.550.000	25.357
30	KERAPU	1.659	78.896.300	47.557
31	KERAPU BALONG	104	3.640.000	35.000
32	KURISI	3.052	57.698.000	18.905
33	KERONG	1.383	41.490.000	30.000
34	KEROSOK	2.962	103.670.000	35.000
35	KUWE	41	1.230.000	30.000
36	LAYANG BENGGOL	60.287	718.445.300	11.917
37	LAYARAN	3.320	78.651.300	23.690

38	LEMADANG	127.662	2.441.103.000	19.122
39	LAYUR	597.825	20.095.978.000	33.615
40	MADIDIHANG	366.933	14.677.320.000	40.000
41	MANYUNG/JAHAN	4.608	69.120.000	15.000
42	NYUNGLAS (TENGGIRI)	7.878	251.520.000	31.927
43	OPAH (SEMAR)	306	3.060.000	10.000
44	PARI KELAPA	119	833.000	7.000
45	PARI KELELAWAR (PLAMPANGAN)	403	3.660.000	9.082
46	REMANG	386	10.808.000	28.000
47	SELAR BENTONG	11.202	179.741.300	16.045
48	SETUHUK HITAM (MARLIN)	14.650	369.704.300	25.236
49	SETUHUK LORENG (GEPENG)	2.828	88.097.000	31.152
50	SUNGLIR	4.470	89.422.000	20.005
51	TIGAWAJA	977	24.425.000	25.000
52	TK. MADIDIHANG	74.981	1.365.363.300	18.209
53	TK. MATA BESAR	550.444	9.957.711.300	18.090
54	TONGKOL PISANG CERUTU (LISONG)	15.542	120.721.300	7.767
55	TUNA MATA BESAR	103.131	3.712.716.000	36.000
56	TUNA SIRIP BIRU SELATAN	8.542	341.680.000	40.000
TOTAL		3.000.368	79.282.409.000	

DATA BULAN APRIL 2025

No	JENIS IKAN	APRIL		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	8.617	267.127.000	31.000
2	Alu-alu	321	5.778.000	18.000
3	Bawal Hitam	144	6.480.000	45.000
4	Belo/selanget	4.664	20.877.000	4.476
5	Bilis	9.967	29.901.000	3.000
6	Cakalang	94.663	1.325.282.000	14.000
7	Cobia	51	918.000	18.000
8	Cucut baster	51	612.000	12.000
9	Cumi karet	250.659	7.519.770.000	30.000
10	Gindara/Ikan setan	262	6.026.000	23.000
11	Gulamah	542	8.130.000	15.000
12	Hiu air	39	468.000	12.000
13	Hiu anjing	188	2.180.000	11.596
14	Hiu koboi	12	192.000	16.000
15	Hiu lalaek	1.461	11.688.000	8.000
16	Hiu lanjam	2.924	40.936.000	14.000
17	Hiu macan	63	756.000	12.000
18	Hiu monyet	512	4.608.000	9.000
19	Hiu tikus	1.851	25.914.000	14.000
20	Ikan layaran	1.595	31.969.000	20.043
21	Ikan pedang	21.296	642.160.000	30.154
22	Jambret	7.983	159.660.000	20.000
23	Kerong	1.061	31.830.000	30.000
24	Kerosok	3.537	123.795.000	35.000
25	Layang	2.210	22.100.000	10.000
26	Layang benggol	15.143	151.430.000	10.000
27	Layur	313.481	10.610.398.000	33.847
28	Lemadang	16.898	321.062.000	19.000
29	Madidihang	180.492	7.216.868.000	39.984
30	Tk Madidihang	37.537	675.666.000	18.000
31	Manyung	3.577	53.655.000	15.000
32	Nyunglas	1.557	49.752.000	31.954
33	Selar bentong	377	5.655.000	15.000
34	Setuhuk hitam	5.996	189.676.000	31.634
35	Setuhuk loreng	541	16.771.000	31.000
36	Sunglir	241	4.820.000	20.000
37	Tigawaja	405	10.125.000	25.000
38	Tongkol Pisang	46	322.000	7.000

	Balaki			
39	Tongkol pisang-cerutu	2.658	18.606.000	7.000
40	Tuna mata besar	34.644	1.247.184.000	36.000
41	Tk Mata Besar	162.465	2.924.370.000	18.000
42	Tuna sirip biru selatan	3.223	128.920.000	40.000
TOTAL		1.193.954	33.914.437.000	

DATA BULAN MEI 2025

No	JENIS IKAN	MEI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	27.573	854.763.000	31.000
2	Alu-alu	357	6.426.000	18.000
3	Barakuda	105	2.964.000	28.229
4	Bawal sabit	30	600.000	20.000
5	Belo/selanget	5.719	17.157.000	3.000
6	Bilis	15.101	45.303.000	3.000
7	Cakalang	263.555	3.690.514.000	14.003
8	Cucut baster	645	7.683.000	11.912
9	Cumi karet	402.695	12.103.110.000	30.055
10	Dogol	286	17.160.000	60.000
11	Gulamah	3.370	50.550.000	15.000
12	Hiu anjing	578	6.926.000	11.983
13	Hiu koboi	8	128.000	16.000
14	Hiu lalaek	3.517	28.136.000	8.000
15	Hiu lanjam	6.895	96.530.000	14.000
16	Hiu macan	206	1.644.000	7.981
17	Hiu monyet	10.515	95.370.000	9.070
18	Hiu tetari	424	9.540.000	22.500
19	Hiu tikus	27.171	380.300.000	13.997
20	Ikan Layaran	4.529	93.610.000	20.669
21	Ikan Pedang	42.577	1.277.190.000	29.997
22	Ikan setan	2.165	49.795.000	23.000

23	Jambret	12.868	257.360.000	20.000
24	Jerbung	522	99.180.000	190.000
25	Kerong	1.694	50.820.000	30.000
26	Kerosok	5.134	179.690.000	35.000
27	Layang	75.888	758.880.000	10.000
28	Layur	770.446	26.028.630.000	33.784
29	Lemadang	20.765	399.046.000	19.217
30	Lendra/lidah	638	13.970.000	21.897
31	Madidihang	351.835	14.073.400.000	40.000
32	Manyung	2.658	39.870.000	15.000
33	Nyunglas	2.223	70.876.000	31.883
34	Pari kelelawar	77	616.000	8.000
35	Pari Plampangan	93	930.000	10.000
36	Selar bentong	54	810.000	15.000
37	Setuhuk hitam	10.731	342.285.000	31.897
38	Setuhuk loreng	961	29.791.000	31.000
39	Sunglir	684	13.680.000	20.000
40	Tigawaja	2.126	53.150.000	25.000
41	Tk Madidihang	56.985	1.322.224.000	23.203
42	Tk Mata Besar	211.947	3.915.432.000	18.474
43	Tongkol banyar	480	4.800.000	10.000
44	Tongkol pisang cerutu	15.831	155.136.000	9.800
45	Tuna Mata Besar	78.970	2.842.920.000	36.000
46	Tuna sirip biru selatan	831	33.240.000	40.000
TOTAL		2.442.462	69.522.135.000	

DATA BULAN JUNI 2025

No	JENIS IKAN	JUNI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	45.418	1.408.388.000	31.009
2	Alu-alu	774	14.450.000	18.669
3	Aruan tasek	30	600.000	20.000
4	Barakuda	38	1.064.000	28.000
5	Bawal putih	777	155.400.000	200.000
6	Bawal sabit	27	540.000	20.000
7	Belo/Selanget	6.716	20.148.000	3.000
8	Bilis	17.176	51.528.000	3.000
9	Cakalang	465.552	6.671.363.000	14.330
10	Cobia	21	378.000	18.000
11	Cucut baster	177	2.046.000	11.559
12	Cumi karet	629.968	19.952.605.440	31.672
13	Dogol	1.265	75.900.000	60.000
14	Gabus laut	169	3.042.000	18.000
15	Gulamah	5.658	84.870.000	15.000
16	Hiu anjing	1.288	15.089.000	11.715
17	Hiu lalaek	5.646	45.366.000	8.035
18	Hiu lanjam	2.282	31.948.000	14.000
19	Hiu macan	598	9.120.000	15.251
20	Hiu monyet	7.388	66.331.000	8.978
21	Hiu tikus	10.179	142.301.000	13.980
22	Ikan ayam-ayam	41	369.000	9.000
23	Ikan layaran	5.917	120.755.000	20.408
24	Ikan lidah	220	5.500.000	25.000
25	Ikan pedang	65.451	1.969.008.000	30.084
26	Ikan setan	1.751	40.345.000	23.041
27	Jambret	14.106	282.120.000	20.000
28	Jerbung	2.093	397.670.000	190.000
29	Kenyar	407	7.014.000	17.233
30	Kerapu	1.822	81.645.000	44.811
31	Kerong	2.170	65.100.000	30.000
32	Kerosok	5.213	182.455.000	35.000
33	Kurisi	2.752	54.304.000	19.733
34	Layang	11.058	110.580.000	10.000
35	Layang anggur	3.728	37.280.000	10.000
36	Layang benggol	38.598	385.980.000	10.000
37	Layur	740.537	24.992.298.200	33.749
38	Lemadang	28.963	548.292.000	18.931
39	Madidihang	516.611	20.664.440.000	40.000

40	Manyung	6.150	92.250.000	15.000
41	Nyunglas	2.381	75.708.000	31.797
42	Pari kelapa	175	1.225.000	7.000
43	Pari kelelawar	293	2.576.000	8.792
44	Remang	581	16.268.000	28.000
45	Setuhuk hitam	11.080	354.560.000	32.000
46	Setuhuk loreng	3.523	109.236.000	31.007
47	Sunglir	1.635	32.566.000	19.918
48	Tigawaja	410	10.250.000	25.000
49	Tk madidihang	41.962	822.354.000	19.598
50	Tk mata besar	220.358	3.966.444.000	18.000
51	Tongkol banyar	12.027	120.270.000	10.000
52	Tongkol pisang cerutu	2.521	18.076.000	7.170
53	Tuna mata besar	102.213	3.739.608.000	36.586
54	Tuna sirip biru selatan	182	7.280.000	40.000
TOTAL		3.048.076	88.066.303.640	



**DATA DUKUNG IKU 4
TINGKAT OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN (EVKIN SAMUDERA
CILACAP (PERSEN) EVKIN) TRIWULAN II (APRIL sd JUNI)
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan pihak kedua, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 24 Januari tahun 2025, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

- a. Sasaran Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing dan berkelanjutan ;
- b. IKU 4 : Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen);
- c. Deskripsi : Tingkat capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ;
- d. Formula perhitungan : Prosentase rata rata capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui Aplikasi Evaluasi Kinerja (EVKIN) ;
- e. Data Dukung berupa : Laporan Evkin .

2. Lokasi

Lokasi pendataan terkait data produksi adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Melakukan entri data kedalam Aplikasi PIPP.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan (EVKIN) terdiri dari 12 orang yaitu penginputan PIPP untuk kapal < 5 GT dan penginputan dalam aplikasi PIPP untuk kapal > 5 GT. Alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL 3.

3. Hasil Kegiatan

Hasil Kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) pada triwulan I sampai dengan bulan Maret 2025

No	Bulan	Nilai EVKIN (%)	Keterangan
1.	April	90,25	Sangat Baik
2.	Mei	92,50	Sangat Baik
3.	Juni	92,50	Sangat Baik
	Jumlah rata-rata Tri Wulan II	91,75	Sangat Baik

Demikian laporan data dukung IKU 4, Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk Tri Wulan II (April s.d Juni 2025) adalah sebesar **91,75 % (Kategori : Sangat Baik)**.

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional
Pelabuhan



Yatim Kurniadi

Evaluasi Kinerja (Evkin)
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Bulan : April 2025

No.	Kriteria	Satuan	April		
			90,25 = SANGAT BAIK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	25	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	94,37	4	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	291,05	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	6.610,00	4	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	414	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	33,56	3,75	Antara 30 - 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	741	5	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	21,72	1,25	Kapal yang masuk kurang dari 50%

18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	2	2	Antara 2 - 2 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	1	2	Antara 1 - 2 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	76	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.032,89	2,25	Antara 2000 - 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (151)	2	---
Jumlah				90.25	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

Evaluasi Kinerja (Evkin)
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Bulan : Mei 2025

No.	Kriteria	Satuan	May		
			95,5 = SANGAT BAIK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	29	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	84,87	4	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	94,12	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	12.700,00	4	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	594	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	74,64	5	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.189,00	5	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	27,67	1,25	Kapal yang masuk kurang dari 50%

18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	3	3	Antara 3 - 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	1	2	Antara 1 - 2 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	77	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.157,67	2,25	Antara 2000 - 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	2 (152)	2	---
Jumlah			92.5		
Kesimpulan dan Rekomendasi			SANGAT BAIK		

Evaluasi Kinerja (Evkin)
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Bulan : Juni 2025

No.	Kriteria	Satuan	June		
			92,5 = SANGAT BAIK		
			Realisasi	Nilai	Ket.
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	28	5	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	80,01	4	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	126,7	4	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	15.393,00	4	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	1.726,00	4	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	300	4	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	30,7	4	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	597	5	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	88,87	5	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1.256,00	5	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	32,96	1,25	Kapal yang masuk kurang dari 50%

18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	2	2	Antara 2 - 2 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	3	3	Antara 3 - 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100	4	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100	5	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	80	4	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	91,97	3	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.232,37	2,25	Antara 2000 - 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (152)	2	---
Jumlah				92.5	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

MEMORANDUM
NOMOR 408/PPSC/TU.140/VII/2025

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama lingkup
Tim Kerja Kesyahbandaran Triwulan II Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) halaman
Tanggal : 1 Juli 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada Tim Kerja Kesyahbandaran dengan periode pengukuran Triwulan II atau Semester I sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang Optimal dan Bertanggung Jawab

1. IKU.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah Persetujuan Berlayar (PB) yang diterbitkan, jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) yang diterbitkan dan jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Pengukuran kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilakukan secara tahunan.

2. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

2.1 IKU.8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (surat ukur dan/atau sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. IKU ini merupakan IKU dengan periode pengukuran triwulanan.

IKU	Target	Realisasi Sd TW II	Capaian (%)
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	670	1.259	187,91

Capaian kinerja pelaksanaan Penerbitan SKKP pada kapal Izin Daerah dapat dilaksanakan secara optimal salah satunya diakrenakan adanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kebijakan penerbitan melalui mekanisme pembaruan tanpa dilakukan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan.

IKU	Realisasi TW I	Realisasi S.d SM I	Capaian (%)
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	150	225	70

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TWI tahun 2025, penerbitan SKKP mengalami kenaikan 70%.

Penerbitan SKKP Triwulan II seluruhnya dilakukan dengan mekanisme Online melalui aplikasi SICEFI serta PPKKP dapat melakukan pemeriksaan secara bergantian disesuaikan dengan beban pekerjaan pada saat adanya permohonan penerbitan SKKP dari pemilik kapal yang telah tersampaikan.

2.2 IKU.9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan persentase kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini memiliki periode pengukuran semesteran.

IKU	Target	Realisasi S.d SM I	Capaian (%)
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26 (kategori cukup)	0,36	119,23

Capaian kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai) telah dilaksanakan secara optimal. Rrealisasi pada Semester I mencapai 0,31 dari target tahunan 0,26 atau 119,23% dengan predikat capaian tahunan telah terealisasi.

Kapal izin Daerah yang beroperasi di atas 12 Mile sebagian besar telah melakukan migrasi ke Izin kewenangan Pusat mengakibatkan meningkatnya pemenuhan sertifikasi awak kapal perikanan termasuk kepemilikan Buku Kapal Perikanan.

Matriks capaian dan dukung pengukuran IKU periode Triwulan II atau Semester I Tahun 2025 terlampir kami sampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Abdul Iman

PENILAIAN TINGKAT PEMENUHAN PERSYARATAN BEKERJA AWAK KAPAL PERIKANAN

A. LOKASI
Nama UPT : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Periode : Semester I
Tahun : 2025

B. Kategori Target Nilai Kepatuhan :

Status	Nilai	Batas Bawah	Kategori Pemenuhan Persyaratan	Batas Bawah	Status	Keterangan
Tingkat Kepatuhan 1	≤0,25	0	Kurang	0	Tingkat Kepatuhan 1	
Tingkat Kepatuhan 2	>0,25 s.d. <0,50	0,26	Cukup	0,26	Tingkat Kepatuhan 2	TARGET 2025
Tingkat Kepatuhan 3	>0,50 s.d. <0,75	0,51	Baik	0,51	Tingkat Kepatuhan 3	
Tingkat Kepatuhan 4	>0,75 s.d. 1,00	0,76	Sangat Baik	0,76	Tingkat Kepatuhan 4	

C. Capaian Tingkat Kepatuhan

No.	Jenis Kriteria Ukuran	Rata2 Nilai k	Kategori Pemenuhan Persyaratan
1	s.d. 5 GT	0,00	Kurang
2	> 5 s.d. 30 GT	0,47	Cukup
3	>30 s.d. 100 GT	0,75	Baik
4	≥100 GT	0,71	Baik
5	≥100 GT Laut Lepas	0,25	Kurang
6	≥300 GT	0,00	Kurang
Nilai Rata-Rata		2,18	
Jumlah jenis kriteria range data (menyesuaikan dgn kondisi di pelabuhan)		6	0,36

Tingkat Pemenuhan
s.d. 5 GT (Kurang)
> 5 s.d. 30 GT (Cukup)
>30 s.d. 100 GT (Baik)
≥100 GT (Baik)
≥100 GT Laut Lepas (Kurang)
≥300 GT (Kurang)



Nilai Rata-Rata (nilai rata-rata g/nilai rata-rata f)	0,36	Cukup	Tingkat Kepatuhan 2

Catatan:
Pembobotan nilai ini sesuai dengan hasil pengamatan pada pemenuhan persyaratan bekerja di UPT sesuai dengan Krulis/Sijil dan SPB yang diterbitkan
Self declare dari hasil dokumen yang ada, jadi untuk penentuannya hanya didasarkan pada ceklist dokumen yang masuk tanpa ada pendalaman)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.1887/DJPT.4/PI.310/VII/2025 11 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan II TA. 2025 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Versi 2, bersama ini kami sampaikan capaian dan hasil evaluasi SELARASKAN triwulan II TA. 2025 di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

1. Capaian implementasi SELARASKAN bulan April s.d Juni 2025 yang dievaluasi pada bulan Juli 2025 dengan skor setelah koreksi *evidence* oleh Tim Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut:

No.	Pelabuhan Perikanan	April	Mei	Juni	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
1.	PPN Pemangkat	96.03	97.03	96.41	289.47	96.49	SANGAT BAIK
2.	PPS Cilacap	96.46	96.65	95.62	288.73	96.24	SANGAT BAIK
3.	PPN Prigi	96.34	94.33	96.30	286.97	95.66	SANGAT BAIK
4.	PPN Sibolga	97.03	96.12	92.85	286.01	95.34	SANGAT BAIK
5.	PPS Bungus	95.75	93.65	93.91	283.31	94.44	SANGAT BAIK
6.	PPN Pengambengan	93.82	88.92	95.63	278.37	92.79	SANGAT BAIK
7.	PPN Ternate	91.19	89.54	89.59	270.32	90.11	SANGAT BAIK

No.	Pelabuhan Perikanan	April	Mei	Juni	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
8.	PPN Kejawanan	88.62	87.26	88.45	264.32	88.11	SANGAT BAIK
9.	PPN Palabuhanratu	82.79	87.39	94.05	264.23	88.08	SANGAT BAIK
10.	PPS Nizam Zachman Jakarta	90.38	87.09	85.51	262.99	87.66	SANGAT BAIK
11.	PPS Kendari	87.69	86.54	87.93	262.16	87.39	SANGAT BAIK
12.	PPN Tanjung Pandan	71.45	94.03	94.25	259.74	86.58	SANGAT BAIK
13.	PPN Brondong	89.12	83.44	81.82	254.37	84.79	SANGAT BAIK
14.	PPN Pekalongan	78.80	85.35	86.22	250.37	83.46	SANGAT BAIK
15.	PPS Bitung	83.54	82.90	80.05	246.49	82.16	SANGAT BAIK
16.	PPN Karangantu	83.80	81.33	80.63	245.76	81.92	SANGAT BAIK
17.	PPN Sungailiat	79.30	85.37	81.01	245.68	81.89	SANGAT BAIK
18.	PPN Ambon	70.66	82.30	84.24	237.21	79.07	BAIK
19.	PPS Belawan	80.18	76.34	77.83	234.35	78.12	BAIK
20.	PPP Teluk Batang	73.94	79.60	80.38	233.92	77.97	BAIK
21.	PPN Kwandang	80.21	76.01	77.68	233.90	77.96	BAIK
22.	PPN Tual	71.88	76.68	80.36	228.92	76.31	BAIK

2. Hasil evaluasi implementasi SELARASKAN bulan April s.d Juni 2025 secara detail dapat diakses melalui tautan berikut https://bit.ly/SELARASKAN_TWII_2025; dan

3. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan capaian nilai SELARASKAN dibawah SANGAT BAIK agar lebih meningkatkan kinerjanya di bidang kebersihan dan lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ady Candra

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1.

Nomor : B.1887/DJPT.4/PI.310/VII/2025

Tanggal : 11 Juli 2025

DAFTAR PELABUHAN PERIKANAN

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
4. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
5. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
10. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
11. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

MEMORANDUM
NOMOR 453/PPSC/TU.140/VII/2025

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Lingkup Tim Kerja
Dukungan Manajerial Triwulan II
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Juli 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 Triwulan II, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Dukungan Manajerial sebagai berikut:

- IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
- IKU 13. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)
- IKU 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
- IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)
- IKU 18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Adapun pencapaiannya terhadap Sasaran strategis Tata kelola Pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dapat kami sampaikan sebagai berikut :

IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)

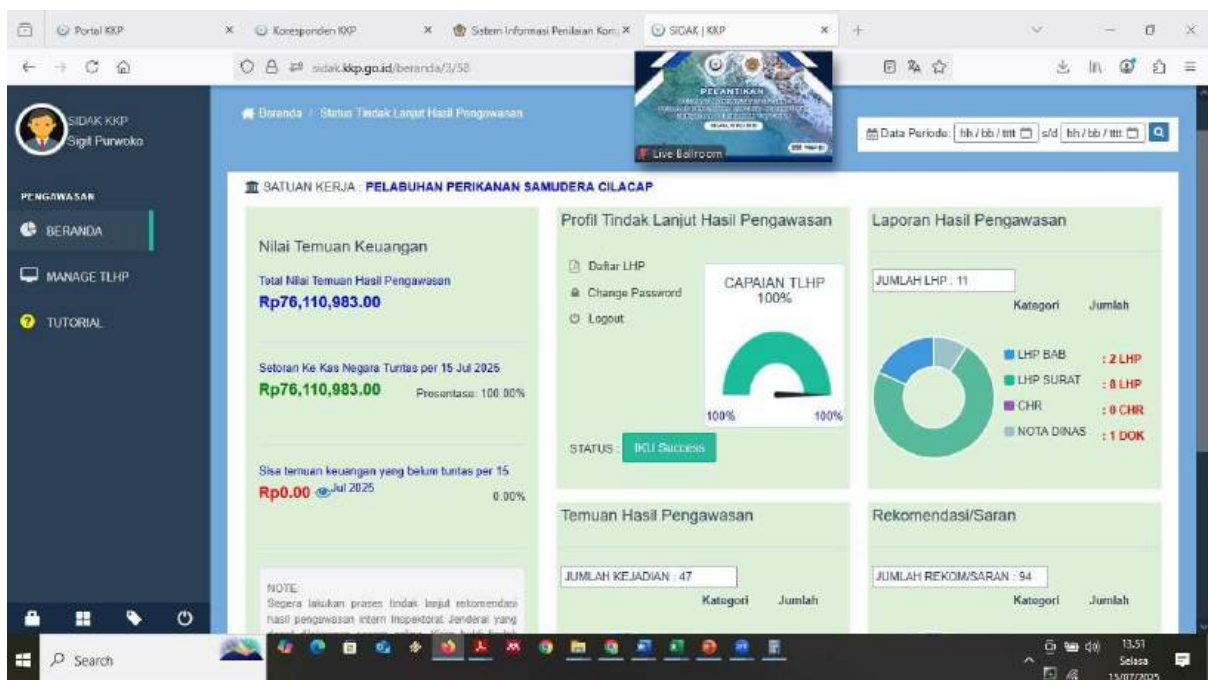
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel . Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	85	100	117,65

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100%. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP, seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan aplikasi SIDAK KKP sebagaimana pada gambar dibawah ini.



Gambar . Screen shot Aplikasi SIDAK per 15 Juli 2025

Sampai periode Triwulan II Tahun 2025 telah ditindaklanjuti seluruh hasil audit dan evaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Adapun data dukung sebagaimana terlampir.

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Tabel . Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Naik/Turun (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	100	100	-

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini tetap pada capaian maksimal yakni 100% dan semua hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Hasil rekomendasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

IKU 13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja indeks profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan indikator untuk mengukur kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : (1) Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3; (2) Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara; (3) Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; (4) Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan

hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
- d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
- e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Angka capaian indikator kinerja ini diperoleh dan diukur oleh Biro SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dihitung secara semesteran.

Data IP ASN dapat diambil di dashboard pengukuran IP ASN KKP pada laman : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/250>

Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel. Target dan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	82	83,42	101,73

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Tabel. Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Naik/Turun (%)
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	81,7	83,42	2,10

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian IP ASN PPS Cilacap terjadi karena terpenuhinya dimensi dalam penghitungan IP ASN tersebut. Dimensi Kualifikasi, PPS Cilacap mendorong para pegawai untuk melanjutkan peningkatan jenjang pendidikan, sampai saat ini masih mendorong agar pegawai dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dimensi Kompetensi dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya baik teknis, manajerial dan sosial kultural dengan bekerjasama dengan Balai Diklat Aparatur Sukamandi maupun Lembaga dan Instansi lain. Dalam dimensi ini telah instruksikan kepada pegawai PPS Cilacap untuk menempuh diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi yang meliputi Diklat Pengelolaan Konflik Kepentingan sebanyak 8 JP dan Diklat Pelatihan Pengantar Empati untuk Pelayanan Prima sebanyak 12 JP serta Diklat Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Mendukung Implementasi EPIT dan PNPB Pasca Produksi sebanyak 16 JP. Dalam dimensi kompetensi ini telah semua pegawai memperoleh hasil maksimal dalam pengembangan kompetensinya. Dimensi Kinerja telah mendorong para pegawai agar mempunyai Sasaran Kerja Pegawai yang sejalan dengan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dan rata rata mendapatkan nilai Baik dan Sangat Baik. Dimensi Kedisiplinan pegawai dilaksanakan sosialisasi, pengawasan, penanaman integritas terkait kode etik pegawai dan kedisiplinan dan di akhir tahun mendapatkan penilaian maksimal. Disamping itu juga dikarekanakan mulai timbulnya kesadaran dalam mendapatkan kewajiban 20 JP serta seminar dalam setiap Tahun Anggaran. Selain itu pimpinan satker memberikan contoh dalam antusiasme mendapatkan pengembangan kompetensi lalu mengawal capaian individu setiap periode.

Adanya gap waktu pengunggahan di myasn/siasn dengan penarikan data oleh Biro SDM Aparatur sehingga sering ada keterlambatan update nilainya. Kesalahan dalam penginputan kategori diklat, terkadang masih ada pencantuman kategori diklat yang belum tepat, webinar terinput sebagai bimbingan teknis.

Saran dan perbaikan kedepan yaitu perlunya dilakukan sosialisasi lagi dalam cara penginputan di myasn/siasn serta koordinasi dengan pemangku aplikasi kepegawaian sehingga tidak ada kesalahan dan data yg ada di MyASN bisa ditarik sempurna oleh Biro SDMAO KKP.

Selain itu juga perlu koordinasi dengan Eselon I untuk dapat menghadirkan rangkaian diklat yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) setiap Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu hingga Jabatan Struktural.

Data dukung IKU IP ASN PPS Cilacap sebagaimana terlampir.

IKU 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel. Target dan Realisasi IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang di Umumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	76	100	131,58

Capaian Triwulan II Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Triwulan II Tahun 2025

IKU ini belum dapat dibandingkan karena IKU ini baru ditetapkan menjadi IKU di awal Tahun 2025 dan IKU Tahun 2024 tidak terdapat IKU ini.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi Prosentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang di Umumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah diumumkan melalui Aplikasi SiRUP dan data dukung sebagaimana terlampir.

IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerpan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Perencanaan Kas. IKU ini memiliki periode pengukuran semesteran.

Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel . Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	85	91,11	107,19

Capaian Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024

Tabel . Perbandingan capaian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Nama IKU	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Naik/Turun (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	98,90	91,11	(-) 7,87

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Sehubungan dengan Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan;
4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi

Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025).

Capaian Triwulan II Tahun 2025, PPS Cilacap mendapatkan penilaian IKPA yang meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu: Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA dengan capaian nilai aspek sebesar 100; Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan capaian nilai aspek sebesar 88,82; serta Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output dengan capaian nilai aspek sebesar 100.

Dari hasil penilaian IKPA masih terdapat Nilai indikator deviasi halaman III DIPA masih belum optimal yaitu sebesar 13.47 dari bobot sebesar 15, sehingga mempengaruhi nilai capaian Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran yaitu Penyerapan anggaran yang mendapatkan nilai 55,86 dan nilai akhir 11,17 dan Pengelolaan UP dan TUP yang mendapatkan nilai 99,41 dan nilai akhir 9,94. Penyerapan anggaran yang masih jauh dibawah nilai normalnya disebabkan karena terdapat realisasi kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dan tidak sesuai Rencana Penarikan Dana dan disamping itu terdapat pengelolaan anggaran PHLN yang belum sepenuhnya terealisasi sesuai waktunya.

Saran masukan untuk perbaikan ke depan adalah guna meningkatkan capaian Nilai IKPA ke depan masih perlu ditingkatkan melalui konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan RPD yang ditetapkan sebagaimana pada halaman III DIPA serta melakukan pengelolaan UP dan TUP dengan baik dan optimal pada semester berikutnya. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

IKU 18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel . Target dan Realisasi IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

Nama IKU	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,5	92,35	104,35

Capaian Triwulan II Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025

Tabel . Perbandingan capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2025

Nama IKU	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Naik/Turun (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,89	92,35	3,89

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Hasil SKM Triwulan II Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 92,35 (kriteria A) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data pada periode selama Triwulan II Tahun 2025.

Data dukung sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapakan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sigit Purwoko

JUMLAH							1.531	3.290	10.009.719.056	1.451	3.141	7.669.393.351	80	148	2.340.325.706	
Jenis							Temuan Awal			Jumlah Tindak Lanjut			Sisa Temuan			
No	Tahun	Penugasan	Jenis LHP	Satker/UPT	No LHP	LHP	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2013	Audit	BAB	PPN PRIGI	R.24801TJ /RC.320/V/2013	LHA Tujuan Tertentu atas Bidang Pengelolaan Tanah Negara dan Rumah Negara Pada PPN Prigi TA 2012	2	9	-	2	9	-	-	-	-	TUNTAS
2	2014	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	2991/ITJHP.410/V/2014	LHR Renja Dijen Perkenan Tangkap Tahun 2015 LHE Atas Implementasi SAKIP pada Dijen Perkenan Tangkap	7	7	-	7	7	-	-	-	-	TUNTAS
3	2014	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.3005/ITJHP.440/V/2014		4	6	-	4	6	-	-	-	-	TUNTAS
4	2014	Audit	BAB	SEKRETARIAT DJPT	3048/ITJHP.410/VIII/2014	LHA Kinerja pada Dijen Perkenan Tangkap TA 2013	7	15	236.408.397	7	15	236.408.397	-	-	-	TUNTAS
5	2014	Evaluasi	BAB	PPN TANJUNGPANDAN	3129/ITJHP.410/XII/2014	LHE atas Pengelolaan Pelabuhan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan Tahun 2013-2014	7	13	32.717.695	7	13	32.717.695	-	-	-	TUNTAS
6	2014	Audit	BAB	DIT PP	3131/ITJHP.230/XII/2014	LHA atas Pengadaa Barang dan Jasa Pada Direktorat Pelabuhan Perikanan Dijen Perkenan Tangkap Tahun 2013-2014	7	9	28.628.402	7	9	28.628.402	-	-	-	TUNTAS
7	2015	Audit	BAB	SEKRETARIAT DJPT	3168/ITJHP.110/III/2015	LHA atas Kinerja Dijen Perkenan Tangkap TA 2014	16	34	74.704.149	14	31	-	2	3	74.704.149	PROSES
8	2015	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	3245/ITJHP.0/PI.440/VIII/2015	LHE atas SRPP pada Dijen Perkenan Tangkap	3	3	-	3	3	-	-	-	-	TUNTAS
9	2015	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	3246/ITJHP.440/VII/2015	LHE atas Implementasi SAKIP pada Dijen Perkenan Tangkap	4	7	-	4	7	-	-	-	-	TUNTAS
10	2015	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	3259/ITJHP.430/VII/2015	LHE atas Pelayanan Publik pada Dijen Perkenan Tangkap	6	10	-	6	10	-	-	-	-	TUNTAS
11	2015	Audit	BAB	SEKRETARIAT DJPT	3262/ITJHP.110/VII/2015	LHA atas Pemanfaatan Hasil Pengadaan TA 2009-2014 pada Dijen Perkenan Tangkap	5	17	-	5	17	-	-	-	-	TUNTAS
12	2015	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	3263/ITJHP.410/VII/2015	LHE atas Program Lanjutan dan Direktif Menteri KP pada Dijen Perkenan Tangkap	4	9	-	4	9	-	-	-	-	TUNTAS
13	2015	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	3293/ITJHP.440/X/2015	LHE atas Implementasi SAKIP pada Dijen Perkenan Tangkap	4	4	-	4	4	-	-	-	-	TUNTAS
14	2016	Audit	BAB	SEKRETARIAT DJPT	3320/ITJHP.110/II/2016	LHA atas Pengelolaan Asest per 31 Desember 2014 dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	8	12	-	8	12	-	-	-	-	TUNTAS
15	2016	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	R.3362/ITJHP.110/V/2016	LHE Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA 2015 dan Pemanfaatan Pelaksanaan TA 2016 Lingkup DJPT	11	14	740.102.240	9	12	149.552.240	2	2	590.550.000	PROSES
16	2016	Evaluasi	SURAT	PPS BUNGUS	R.3375/ITJHP.440/VII/2016	LHE atas Implementasi SAKIP pada PPS Bungus tahun 2016	3	3	-	3	3	-	-	-	-	TUNTAS
17	2016	Evaluasi	SURAT	PPS BUNGUS	R.3387/ITJHP.320/VIII/2016	LHE Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus	4	4	-	4	4	-	-	-	-	TUNTAS
18	2016	Evaluasi	BAB	PPN SIBOLGA	3409/ITJHP.320/X/2016	LHE PNBSP TA 2013-2016 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	5	12	23.358.461	5	12	23.358.461	-	-	-	TUNTAS
19	2016	Audit	BAB	BBPI SEMARANG	3395/ITJHP.320/VIII/2016	Audit Kinerja pada Balai Besar Penangkapan Penangkaran Ikan (BBPI Semarang TA 2015-2016	9	21	30.120.000	9	21	30.120.000	-	-	-	TUNTAS
20	2016	Evaluasi	BAB	PPN KEJAWANAN	3435/ITJHP.410/X/2016	LHE PNBSP TA 2013-2016 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan, Prov. Jawa Barat	5	7	1.909.926	5	7	1.909.926	-	-	-	TUNTAS
21	2017	Evaluasi	BAB	DIT POK	R.3445/ITJHP.430/I/2017	LHE PNBSP atas PHP di Direktorat Pengendalian Penangkaran Ikan (DIT PPI) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	4	152.396.757	-	3	20.495.385	1	1	131.901.372	PROSES
22	2017	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	3478/ITJHP.430/III/2017	LHE Pelayanan Publik Dijen Perkenan Tangkap TA 2016	5	8	-	5	8	-	-	-	-	TUNTAS
23	2017	Audit	SURAT	DIT KAPI	3497/ITJHP.310/V/2017	LH Proby Audit Pembangunan Kapal Perikanan TA 2017	6	7	-	6	7	-	-	-	-	TUNTAS
24	2017	Evaluasi	BAB	DIT PP	R.3513/ITJHP.320/VII/2017	LHE Peningkatan Kegiatan Prioritas TA 2017 pada Direktorat Pelabuhan Perikanan	4	11	-	4	11	-	-	-	-	TUNTAS
25	2017	Evaluasi	BAB	DIT KAPI	R.3552/ITJHP.120/X/2017	LH Entry Evaluasi pengadaian alat penangkapan ikan TA 2017 di KAPI Dijen Perkenan Tangkap	5	10	-	5	10	-	-	-	-	TUNTAS
26	2017	Audit	BAB	SEKRETARIAT DJPT	3553/ITJHP.120/X/2017	LHA Hasil Kegiatan Bantuan Pemerintah TA 2016 dan Pemanfaatan hasil Kegiatan TA 2009-2015 lingkup Dijen Perkenan Tangkap	8	18	7.875.000	8	18	7.875.000	-	-	-	TUNTAS
27	2017	Evaluasi	BAB	DIT POK	3560/ITJHP.410/X/2017	LHE Kegiatan Prioritas TA 2017 di Direktorat Perikanan dan Kelayakan	2	6	-	1	5	-	1	1	-	PROSES
28	2017	Evaluasi	BAB	DIT PP	3561/ITJHP.410/X/2017	LHE Kegiatan Prioritas TA 2017 di Direktorat Pelabuhan Perikanan	8	12	-	8	12	-	-	-	-	TUNTAS
29	2017	Audit	BAB	DIT KAPI	R.3584/ITJHP.120/VIII/2017	Laporan Hasil Audit Pengadaan Kapal Perikanan Lanjutan Tahun Anggaran 2016	8	19	4.704.938.998	6	17	4.352.055.618	2	2	352.883.380	PROSES
30	2017	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT PSDI	3500/ITJHP.310/V/2017	Hasil Pemantauan terhadap persiapan kegiatan strategis di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI)	5	5	-	5	5	-	-	-	-	TUNTAS
31	2018	Evaluasi	BAB	PPS BELAWAN	3665/ITJHP.460/V/2018	LHE Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPS Belawan TA 2016 s.d. Maret 2018	6	15	16.644.900	6	15	16.644.900	-	-	-	TUNTAS
32	2018	Audit	BAB	PPN SIBOLGA	3668/ITJHP.120/V/2018	LHA Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan BMN pada PPN Sibolga	6	13	14.624.671	6	13	14.624.671	-	-	-	TUNTAS
33	2018	Audit	BAB	PPS BITUNG	3673/ITJHP.120/V/2018	LHA Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan BMN pada PPS Bitung	4	15	27.639.050	4	15	27.639.050	-	-	-	TUNTAS
34	2018	Audit	SURAT	DIT KAPI	3691/ITJHP.230/VII/2018	LH Proby Audit Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan Ukuritan di SKPT Saumlaki TA 2018 pada Direktorat KAPI	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
35	2018	Audit	BAB	DIT PP	3705/ITJHP.120/VIII/2018	LHA Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Pada Direktorat Pelabuhan Perikanan Dijen Tangkap	3	5	-	3	5	-	-	-	-	TUNTAS
36	2018	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	3721/ITJHP.410/VIII/2018	Hasil Evaluasi Ases/BMN Satker Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015 s.d. 2017	6	36	-	6	36	-	-	-	-	TUNTAS
37	2018	Audit	BAB	PPN TUAL	3750/ITJHP.120/X/2018	LHA Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada PPN Tual Trwulan IV TA 2017 s.d. 30 April 2018	3	4	134.514.500	3	4	134.514.500	-	-	-	TUNTAS
38	2018	Pemantauan	SURAT	PPN AMBON	310.2/ITJHP.210/X/2018	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pegelolaan Keuangan Tahun 2018 di PPN Ambon, Prov. Maluku	4	6	-	4	6	-	-	-	-	TUNTAS
39	2018	Reviu	SURAT	PPN PALABUHANRATU	19.10.2/ITJHP.210/X/2018	Hasil Reviu Barang Milik Negara (BMN) terhadap Barang yang Tidak Diketahui Keberadaannya pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu	3	3	-	3	3	-	-	-	-	TUNTAS
40	2018	Pemantauan	SURAT	BBPI SEMARANG	25.10.4/ITJHP.210/X/2018	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2018 di BBPI Semarang	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
41	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT KAPI	3.10.1/ITJHP.210/X/2018	Hasil Pemantauan Kapal Perikanan TA 2017 di Kota Tual, Provinsi Maluku	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
42	2018	Reviu	SURAT	DIT KAPI	9.10.1/ITJHP.210/X/2018	Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Kapal 60 GT di Direktorat Kapal Perikanan dan API	1	5	-	1	5	-	-	-	-	TUNTAS
43	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT KAPI	10.10.1/ITJHP.210/X/2018	Hasil Pemantauan Penyelesaian Pengadaan Kapal Perikanan TA 2016 oleh CV Karya Bahari dan PT Yasa Ayu Abadi	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
44	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT KAPI	11.10.1/ITJHP.210/X/2018	Hasil Pemantauan Pembangunan Kapal Perikanan Kurang dari 5 GT TA 2018 di PT Jelajah Samudera Internasional Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	4	5	-	4	5	-	-	-	-	TUNTAS
45	2018	Reviu	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	18.10.6/ITJHP.210/X/2018	Hasil Reviu Penyusunan RKBMN Tahun 2020 Lingkup Dijen Perkenan Tangkap di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
46	2018	Reviu	NOTA DINAS	DIT KAPI	25.10.1/ITJHP.210/X/2018	Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan Mesin Kapal Perikanan 3 GT Tahun 2018	2	3	-	2	3	-	-	-	-	TUNTAS
47	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT KAPI	2.11.2/ITJHP.210/X/2018	Hasil Pemantauan Pembangunan Kapal Perikanan <5 GT di Galangan PT. Siagan Boats Kota Makassar dan 5 GT di Galangan PT. Fajar Raya Maros Kabupaten Maros TA 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan	5	6	-	5	6	-	-	-	-	TUNTAS
48	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	7.11.2/ITJHP.550/X/2018	Hasil Pemantauan terhadap Kepatuhan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Sekretariat Dijen Perkenan Tangkap	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
49	2018	Reviu	NOTA DINAS	DIT KAPI	23.11.1/ITJHP.210/X/2018	Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Pekerjaan Supervisi Pembangunan Kapal Perangkap Ikan Kurang dari 5 GT Tahun 2018 PT. Mula Arthaloka						Pengelolaan				L a n g s u n g
50	2018	Reviu	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	26.11.2/ITJHP.360/X/2018	Hasil Reviu Revisi Penambahan Pagu Penggunaan Dana PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan, PPN Tual, PPN Ambon, PPN Sibolga, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari dan PPS Cilacap										
51	2018	Audit	BAB	SEKRETARIAT DJPT	3828/ITJHP.250/X/2018	LHA Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Dijen Tangkap TA 2018	53	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	PPN PERKALONGAN	6.12.5/ITJHP.210/X/2018				
52	2018	Reviu	NOTA DINAS	DIT KAPI	5.17/ITJHP.210/X/2018	Hasil Reviu Pelaksanaan Pengadaan Mesin Kapal Perikanan Kurang dari 5 GT TA 2018 di PT. Jelajah Samudera Internasional Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah										

						rgan	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
							3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
							8	32	205.875.850	8	32	205.875.850	-	-	-	-	TUNTAS
							1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
							1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
54	2018	Evaluasi	NOTA DINAS	PPS CILACAP	10.12.2/IT.J.2/TU.210/XII/2018	Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada PPS Cilacap dan PPN Kelabangan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
55	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT PP	20.12.2/IT.J.2/TU.210/XII/2018	Hasil Pemantauan TPI Higienis PPP Labuhan Maringgis, Kab. Lampung Timur dan PP Buangan, Kab. Lebak	1	6	-	1	6	-	-	-	-	-	TUNTAS
56	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT PSDI	21.12.2/IT.J.2/TU.210/XII/2018	Hasil Pemantauan Dalam Rangka Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan Pembangunan TPA-PD Jakabaring di Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
57	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT KAPI	26.12.3/IT.J.2/TU.210/XII/2018	Hasil Pemantauan Terhadap Pemenuhan Kekurangan Spesifikasi Teknik Pada Pengadaan Kapal Perikanan Tahun 2017	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
58	2018	Audit	BAB	DIT PSDI	3826/IT.JHP.410/XI/2018	Laporan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan	2	7	5.460.000	2	7	5.460.000	-	-	-	-	TUNTAS
59	2018	Audit	BAB	DIT PDK	3801/IT.JHP.110/XI/2018	Laporan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan TA 2018 pada Direktorat Perizinan dan Kelayakan TA 2018	2	4	11.436.000	2	4	11.436.000	-	-	-	-	TUNTAS
60	2018	Reviu	NOTA DINAS	DIT PSDI	12.11.3/IT.J.2/TU.210/XI/2018	Hasil Reviu Penetapan Kerangka Kerja Acuan (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Penunjukan Langsung di Dit PSDI	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	TUNTAS
61	2018	Reviu	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	2.10.1/IT.J.2/TU.210/X/2018	Hasil Reviu atas Usulan Revisi Anggaran DJPT TA 2018	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
62	2018	Reviu	NOTA DINAS	DIT PP	10.12.1/IT.J.2/TU.210/XII/2018	Hasil Reviu Pembangunan SKPT Merauke Tahun 2018	3	4	-	3	4	-	-	-	-	-	TUNTAS
63	2018	Reviu	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	15.10.3/IT.J.2/TU.210/X/2018	Hasil Reviu Revisi Penambahan Pagu Penggunaan Dana PNBSP di PPN Penangkai, PPN Sibolga, PPN Tanjungpandan dan PPS Nizam Zachman	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
64	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT PSDI	9.11.3/IT.J.2/TU.210/XI/2018	Hasil Pemantauan terhadap Kepatuhan Pertanggung-jawaban Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
65	2018	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT PSDI	5.8.3/IT.JHP.510/VIII/2018	Hasil Pemantauan Perkembangan Pekerjaan Pembangunan Rehab Fasilitas Pendukung (Pasar Ikan) TPI Perikanan Dasar Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
66	2018	Evaluasi	BAB	PPS KENDARI	3051/IT.J.0/HP.470/V/2018	LHE Penemuan Negeri Bukan Pajak pada Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	8	11	102.854.413	8	11	102.854.413	-	-	-	-	TUNTAS
67	2018	Reviu	BAB	PPN PRIGI	31.10.1/IT.J.2/TU.210/X/2018	Laporan Hasil Reviu dalam Rangka Usulan Penghapusan BMN pada PPN Prigi, Provinsi Jawa Timur	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
68	2019	Pemantauan	SURAT	PPN PENGAMBENGAN	5.20/IT.J/II/2019	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan pada PPN Pengambengan, Prov. Bali	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	TUNTAS

69	2019	ngawasan Lainn	NOTA DINAS DIT PSDI	2.1.2/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perairan Darat di Kabupaten Bontol Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	5	5	11.688.162	-	-	-
70	2019	ngawasan Lainn	SURAT PPN PENGAMBENGAN	3.1.2/ITJ.2/TU.210I/2019	Inventarisasi dan Penilaian BMN (BA-06) atas Barang Tidak Ditemukan di PPN Pengambengan	3	3	-	-	-	-
71	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT PP	8.1.1/ITJ.2/TU.210I/2019	Laporan Pemantauan Pekerjaan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Menuju	8	11	-	-	-	-
72	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT PSDI	9.1.2/ITJ.2/TU.210I/2019	Laporan Hasil Pemantauan Pekerjaan Pembangunan TPI Perairan Darat di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi	5	5	-	-	-	-
73	2019	ngawasan Lainn	NOTA DINAS DIT PSDI	14.1.1/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pembangunan TPI Perairan Darat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	1	1	-	-	-	-
74	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT KAPI	25.1.2/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Kepatuhan Pertanggungjawaban Keuangan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2018 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI)	1	3	-	-	-	-
75	2019	Pemantauan	NOTA DINAS SEKRETARIAT DJPT	25.1.3/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Kepatuhan Pertanggungjawaban Keuangan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2018 pada Sekretariat Direktorat Perikanan Tangkap	2	2	-	-	-	-
76	2019	Audit	SURAT DIT KAPI	11.2.1/ITJ.2/HP.110II/2019	Hasil Audit Probity atas pengadaan mesin, pengiriman mesin dan pengadaan kapal penangkap ikan <5GT pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2019	4	8	-	-	-	-
77	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT KAPI	11.2.2/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Bantuan Kapal dan Alat Penangkapan Ikan TA 2018 di Kab. Sukabumi Prov. Jabar	1	3	-	-	-	-
78	2019	Pemantauan	SURAT PPN BRONDONG	13.2.2/ITJ.2/HP.550II/2019	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2018 di PPN Brondong	2	3	-	-	-	-
79	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT KAPI	13.2.4/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Bantuan Kapal Penangkapan Ikan Tahun 2018 di Kab. Pangandaran, Garut, dan Tasikmalaya	1	1	-	-	-	-
80	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT KAPI	18.2.4/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2018 di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sikka, Prov NTT	2	2	-	-	-	-
81	2019	Pemantauan	SURAT PPN PALABUHANRATU	18.2.6/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2018 di PPN Palabuhanratu	6	8	420.000	-	-	-
82	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT KAPI	19.2.2/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Bantuan Kapal Ikan dan Alat Tangkap Ikan Tahun 2018 di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	1	1	-	-	-	-
83	2019	Pemantauan	SURAT BBPI SEMARANG	19.2.4/ITJ.2/HP.550II/2019	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2018 di BBPI Semarang	1	6	-	-	-	-
84	2019	Pemantauan	SURAT PPS CILACAP	19.2.5/ITJ.2/HP.550II/2019	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2018 di PPS Cilacap	5	5	11.498.000	-	-	-
85	2019	ngawasan Lainn	NOTA DINAS DIT PSDI	19.2.7/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2018 oleh BPK RI di Provinsi Jambi	3	3	39.680.000	-	-	-
86	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT KAPI	19.2.9/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2018 Lirisasi Provinsi Jawa Tengah	1	1	-	-	-	-
87	2019	Pemantauan	SURAT PPN PEKALONGAN	19.2.8/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2018 di PPN Pekalongan	1	2	-	-	-	-
88	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT KAPI	25.2.6/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan TA 2018 di Provinsi Aceh	1	2	-	-	-	-
89	2019	Audit	SURAT DIT PDK	4.3.1/ITJ.2/HP.230III/2019	Hasil Probity Audit atas Penerimaan Lelang Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2019 pada Direktorat Perikanan dan Kelautan	2	4	-	-	-	-
90	2019	ngawasan Lainn	NOTA DINAS DIT KAPI	8.3.1/ITJ.2/HP.330III/2019	Hasil Pengkajian Fiak Kapal Mina Maritim di Kab. Natuna, Kota Batam dan Dinas KP Provinsi Kep. Riau	1	2	-	-	-	-
91	2019	Evaluasi	SURAT SEKRETARIAT DJPT	25.3.2/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Evaluasi PMPRB TA 2018 - 2019 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	2	16	-	-	-	-
92	2019	Audit	BAB PPN SUNGAILIAT	392.1/ITJ/HP.110III/2019	Laporan Hasil Audit Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat TA 2018	5	10	3.047.017	-	-	-
93	2019	Evaluasi	SURAT PPN PRIGI	3957/ITJ/HP.440V/2019	LHE atas Implementasi SAKIP pada PPN Prigi tahun 2019	5	5	-	-	-	-
94	2019	Evaluasi	SURAT PPN KEJAWANAN	3958/ITJ/HP.440V/2019	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada PPN Kejawan Tahun 2019	3	3	-	-	-	-
95	2019	Audit	BAB PPN PRIGI	3972/ITJ/INO.120V/2019	Laporan Hasil Audit Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi TA 2018-2019	2	5	3.805.000	-	-	-
96	2019	Audit	BAB PPN BRONDONG	3980/ITJ/HP.120VI/2019	Laporan Hasil Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong TA 2019	6	20	21.431.590	-	-	-
97	2019	Evaluasi	SURAT PPS BELAWAN	R.3882/ITJ/HP.440VI/2019	LHE atas Implementasi SAKIP pada PPS Belawan tahun 2019	4	4	-	-	-	-
98	2019	Evaluasi	SURAT PPS KENDARI	3988/ITJ/HP.440VI/2019	Hasil Implementasi SAKIP pada PPS Kendari TA 2019	4	4	-	-	-	-
99	2019	Evaluasi	SURAT PPS BITUNG	3989/ITJ/HP.440VI/2019	LHE Implementasi SAKIP pada PPS Bitung TA 2019	6	6	-	-	-	-
100	2019	Evaluasi	SURAT SEKRETARIAT DJPT	3990/ITJ/HP.440VI/2019	LHE Pengukuran Kinerja Triwulan I tahun 2019 Dijen Tangkap	5	14	-	-	-	-
101	2019	Reviu	SURAT PPN SIBOLGA	4037/ITJ/HP.380VII/2019	LHR Perbaikan Inventarisasi BMN TA 2019 pada Sakfer PPN Sibolga	2	2	-	-	-	-
102	2019	Audit	BAB PPS BELAWAN	4166/ITJ/HP.310IX/2019	Laporan Hasil Audit Kinerja Pada PPS Belawan	5	8	34.131.419	-	-	-
103	2019	Evaluasi	BAB PPS NIZAM ZACHMAN	4195/ITJ.0/HP.470X/2019	LHE PNPB Pada PPS Nizam Zachman Jakarta	3	4	9.777.261,67	-	-	-
104	2019	Evaluasi	BAB PPN PEKALONGAN	4218/ITJ.0/HP.470X/2019	Hasil Evaluasi PNPB Pada PPN Pekalongan TA 2016-Semester I 2019	5	7	-	-	-	-
105	2019	Evaluasi	BAB PPS CILACAP	4221/ITJ.0/HP.470X/2019	Laporan Hasil Evaluasi PNPB Pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	4	7	526.974	-	-	-
106	2019	Evaluasi	SURAT PPS CILACAP	4222/ITJ.0/HP.430X/2019	Evaluasi Pelayanan Publik PPS Cilacap TA 2019	1	5	-	-	-	-
107	2019	Evaluasi	BAB SEKRETARIAT DJPT	4248/ITJ.0/HP.470X/2019	LHE Kegiatan Prioritas TA 2015-2019 Pada Dijen Perikanan Tangkap	5	12	-	-	-	-
108	2019	Reviu	SURAT DIT PP	4274/ITJ/HP.350XI/2019	Hasil Reviu Kegiatan Register Hibah Tanah PPN Mirasaka	1	1	-	-	-	-
109	2019	Evaluasi	SURAT PPN PENGAMBENGAN	4280/ITJ/HP.470XI/2019	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Tahun 2019	4	4	-	-	-	-
110	2019	Evaluasi	BAB PPN PENGAMBENGAN	4289/ITJ/HP.470XI/2019	LHE PNPB Pada PPN Pengambengan TA 2019	4	10	-	-	-	-
111	2019	Evaluasi	BAB PPS BITUNG	4294/ITJ.0/HP.470XI/2019	LHE PNPB Pada PPS Bitung TA 2019	6	13	-	-	-	-
112	2019	Pemantauan	SURAT PPS BITUNG	4295/ITJ.0/HP.550XI/2019	Laporan Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan PPS Bitung Tahun 2019	5	12	5.949.995	-	-	-
113	2019	Evaluasi	SURAT PPS BITUNG	4296/ITJ.0/HP.430XI/2019	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Tahun 2019	6	8	-	-	-	-
114	2019	Pemantauan	BAB PPN PEMANGKAT	4297/ITJ.0/HP.470XII/2019	LHE PNPB Pada PPN Pemangkat TA 2019	3	3	4.432.476	-	-	-
115	2019	Pemantauan	SURAT PPN PEMANGKAT	4298/ITJ/HP.550XII/2019	Hasil Pemantauan Kepatuhan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2019 di PPN Pemangkat, Provinsi Kalimantan Barat	2	7	11.537.900	-	-	-
116	2019	Pemantauan	SURAT PPN PEMANGKAT	4299/ITJ/HP.430XII/2019	LHE Pelayanan Publik pada PPN Pemangkat Tahun 2019	6	13	-	-	-	-
117	2019	Audit	SURAT DIT KAPI	4019/ITJ.2/HP.110VII/2019	Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Mesin Kapal Perikanan Pada Direktorat KAPI	2	2	-	-	-	-
118	2019	Reviu	BAB SEKRETARIAT DJPT	3919/ITJ/HP.330III/2019	Hasil Reviu atas Laporan Kinerja DJPT Tahun 2018	6	6	-	-	-	-
119	2019	Reviu	SURAT DIT KAPI	4148/ITJ.0/HP.350VII/2019	Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (API) Tahun IV TA 2019 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (DLKAPI)	3	3	-	-	-	-
120	2019	Audit	SURAT DIT PDK	10.4.3/ITJ.2/HP.110IV/2019	Hasil Probity Audit atas Penerimaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Reviu Masterplan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Natuna Prov. Kepulauan Riau	3	3	-	-	-	-
121	2019	Audit	NOTA DINAS DIT PP	2.1.1/ITJ.2/TU.210I/2019	Probity Audit terhadap Perencanaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Okidang TA 2019 pada Direktorat Pelabuhan Perikanan	2	2	-	-	-	-
122	2019	Reviu	NOTA DINAS DIT PP	6.2.3/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Reviu Sia Pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan TPI Higienis PP Tumumpa di Prov. Sult	4	6	16.587.432	-	-	-
123	2019	Reviu	NOTA DINAS DIT PP	6.2.2/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Reviu Sia Pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan TPI Higienis PP Kurau di Kab. Bangka Tengah	3	4	-	-	-	-
124	2019	Reviu	NOTA DINAS DIT PSDI	8.2.1/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Reviu Perencanaan ke 2 Rehab Fasilitas Pendukung TPI Perairan Darat di Kota Palembang	3	3	-	-	-	-
125	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT PDK	21.1.6/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan terhadap Kepatuhan Pertanggungjawaban Keuangan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 pada Direktorat Perikanan dan Kelautan, Dijen Perikanan Tangkap	1	1	26.432.146	-	-	-
126	2019	Pemantauan	NOTA DINAS DIT PSDI	14.1.2/ITJ.2/TU.210I/2019	Hasil Pemantauan Kepatuhan Pertanggungjawaban Keuangan Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2018 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	6	73.495.000	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

										5	5	11.688.162					TUNTAS
127	2019	Audit	BAB	BBPI SEMARANG	4110HP.110/VIII/2019	Laporan Hasil Audit Kinerja pada BBPI Semarang	6	8	2.523.723				-	-	-	-	TUNTAS
128	2020	Evaluasi	SURAT	DIT PDK	4321/ITJ.0/HP.470/II/2020	Laporan Hasil Evaluasi Lanjutan atas Pengelolaan PNBSP dan Pelayanan Publik Tahun 2019 pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan	5	27		3	3	-	1	2	-	-	TUNTAS
129	2020	Audit	SURAT	DIT KAPI	4322/ITJ.0/HP.250/II/2020	Proby Audit terhadap Dokumen Tender Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan AMDAL Pengembangan Pelabuhan Perikanan Ukuran pada SKPT Saumlaki Kabupaten Tanimbar	3	3	-	8	11	-	-	-	-	-	TUNTAS
130	2020	Audit	SURAT	DIT KAPI	4343/ITJ.HP.230/II/2020	Hasil Proby Audit atas Pengadaan Kapal 5 GT TA 2020 di Direktorat KAPI	6	6		5	5	-	-	-	-	-	TUNTAS
131	2020	Reviu	SURAT	PPS BITUNG	4344/ITJ.0/HPP.350/II/2020	Laporan Hasil Reviu atas paket Kegiatan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Terpadu dan Pembangunan Rumah Negara Golongan I PPS Bitung	3	3		1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS
132	2020	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	4345/ITJ/H.P.330/II/2020	Hasil Reviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2019	3	6		1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
133	2020	Reviu	SURAT	DIT PDK	4354/ITJ.0/HP.350/III/2020	LHR Dokumen Pemekasaan dan Pembayaran Tahap I Kegiatan Penyusunan Adendum ANDAL dan RKL-RPL Pembangunan PP Selat Lampa TA 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
134	2020	Pemantauan	SURAT	PPN BRONDONG	4362/ITJ.HP.380/III/2020	Hasil Pemantauan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa TA 2020 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3	3		4	8	-	-	-	-	-	TUNTAS
										1	3	-					TUNTAS
135	2020	Reviu	SURAT	PPN PENGAMBENGAN	4364/ITJ.HP.320/III/2020	Hasil Reviu atas Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu PPN Pengambengan	4	4		2	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
136	2020	Audit	SURAT	DIT PDK	4367/ITJ.HP.230/III/2020	Hasil Proby Audit Dokumen Tender Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kenyelayanan, DJPT	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS
137	2020	Reviu	SURAT	DIT PDK	4368/ITJ.0/HP.350/III/2020	Hasil Reviu Pembayaran Tahap I Kegiatan Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Ikan SKPT Natuna TA 2020 pada Dit. PDK DJPT	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
138	2020	Reviu	SURAT	DIT PSDI	4375/ITJ.HP.350/III/2020	Hasil Reviu Dokumen KAK dan RAB untuk Rencana Kegiatan Pertemuan The 4th Bali Tuna Conference (BTC-4), The 7th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-7) dan Pertemuan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Tahun 2020 pada Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan	2	2	-	6	8	420.000	-	-	-	-	TUNTAS
139	2020	Reviu	SURAT	DIT KAPI	4376/ITJ.HP.350/III/2020	Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Termin I atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Saumlaki	3	3	-	1	6	-	-	-	-	-	TUNTAS
										5	5	11.498.000					TUNTAS
140	2020	Pemantauan	SURAT	PPN PRIGI	20.3.2/ITJ.2/HP.350/III/2020	Hasil Pemantauan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa TA 2020 di PPN Prigi, Provinsi Jawa Timur	3	4	-	3	3	39.680.000	-	-	-	-	TUNTAS
										1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS
										1	2	-					TUNTAS
										1	2	-					TUNTAS
										2	4	-					TUNTAS
										1	2	-					TUNTAS
										2	16	-					TUNTAS
										5	10	3.047.017					TUNTAS
										5	5	-					TUNTAS
										3	3	-					TUNTAS
										2	5	3.805.000					TUNTAS
										6	20	21.431.590					TUNTAS
										4	4	-					TUNTAS
										4	4	-					TUNTAS
										6	6	-					TUNTAS
										5	14	-					TUNTAS
										2	2	-					TUNTAS
										5	8	34.131.419					TUNTAS
										3	4	9.777.262					TUNTAS
										5	7	-					TUNTAS
										4	7	526.974					TUNTAS
										1	5	-					TUNTAS
										5	12	-					TUNTAS
										1	1	-					TUNTAS
										4	4	-					TUNTAS
										4	10	-					TUNTAS
										6	13	-					TUNTAS
										5	12	5.949.995					TUNTAS
										6	8	-					TUNTAS
										3	3	4.432.476					TUNTAS
										2	7	11.537.900					TUNTAS
										6	13	-					TUNTAS
										2	2	-					TUNTAS
										6	6	-					TUNTAS
										3	3	-					TUNTAS
										3	3	-					TUNTAS
										1	1	26.432.146					TUNTAS
										6	6	73.495.000					TUNTAS
										6	8	2.523.723					TUNTAS
										4	25	-					PROSES
										3	3	-					TUNTAS
										6	6	-					TUNTAS
										3	3	-					TUNTAS
										3	6	-					TUNTAS
										1	1	-					TUNTAS
										3	3	-					TUNTAS
										4	4	-					TUNTAS
										3	3	-					TUNTAS
										1	1	-					TUNTAS
										2	2	-					TUNTAS
										3	3	-					TUNTAS
										3	4	-					TUNTAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

141	2020	Pemantauan	SURAT	DIT PDK	4371/IT.JHP.550/III/2020	Hasil Pemantauan Percepatan Penerbitan SIUP/SIP/SIKPI pada Direktorat Perizinan dan Kelayakan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Jakarta	3	6	-	-	-
142	2020	Revisi	SURAT	DIT PDK	4382/IT.J.2HP.350/IV/2020	Laporan Hasil Revisi Dokumen Pemeriksaan dan Pembayaran Tahap II Pekerjaan Penyusunan Aduendum Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pembangunan Pelabuhan Perikanan (PP) Selat Lampa Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna TA 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kelayakan, Direktorat Jenderal (Dijen) Perikanan Tangkap	1	1	-	-	-
143	2020	Revisi	SURAT	PPN KEJAWANAN	4383/IT.JHP.350/IV/2020	Hasil Revisi atas Perencanaan Rehab Gedung Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Administrasi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan	3	3	-	-	-
144	2020	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	4384/IT.JHP.322/IV/2020	Hasil Revisi Penyerapan Anggaran dan Perkembangan PBJ Triwulan I Tahun 2020 lingkup Dijen Perikanan Tangkap	2	3	-	-	-
145	2020	Revisi	SURAT	PPS CILACAP	4388/IT.JHP.350/IV/2020	Hasil Revisi atas Dokumen Perencanaan Pengembangan Jalan Khusus Komplek dan Perbaikan Gedung Kantor Permanen (Kantor Lama) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap	9	9	-	-	-
146	2020	Revisi	SURAT	PPN PRIGI	4391/IT.JHP.350/IV/2020	Hasil Revisi atas Perencanaan Pembangunan Pagar Kawasan Pelabuhan serta Rehabilitasi Kantor Pelayanan Terpadu, TPI Hygiene dan Bangsal Pengelolaan PPN Prigi	3	3	-	-	-
147	2020	Revisi	SURAT	DIT PDK	4393/IT.JHP.350/IV/2020	Hasil Revisi Dokumen Pemeriksaan dan Pembayaran Tahap II Pekerjaan Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Pembangunan Pasar Ikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna TA 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kelayakan, Direktorat Jenderal (Dijen) Perikanan Tangkap	1	1	-	-	-
148	2020	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	4394/IT.JHP.323/IV/2020	Hasil Revisi Realokasi Anggaran lingkup Dijen Perikanan Tangkap (DJPT) ke Dijen Perikanan Budidaya (DJPB) TA 2020	2	3	-	-	-
149	2020	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	4420/IT.JHP.550/V/2020	Pemantauan Revisi Anggaran atas Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk Kebutuhan Penanganan Dampak Wabah COVID-19 TA 2020 lingkup Dijen Perikanan Tangkap	3	3	-	-	-
150	2020	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	4408/IT.JHP.323/IV/2020	Hasil Revisi Revisi Anggaran atas Realokasi dan Pemotongan Anggaran TA 2020 lingkup Dijen Perikanan Tangkap	2	2	-	-	-
151	2020	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	4424/IT.JHP.460/V/2020	Hasil Evaluasi Beraturan Kaperlingan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020	4	5	-	-	-
152	2020	Revisi	SURAT	PPN PALABUHANRATU	4437/IT.JHP.350/V/2020	Hasil Revisi atas Perencanaan Rehabilitasi Breakwater PPN Palabuhanratu	3	3	-	-	-
153	2020	Evaluasi	SURAT	PPS CILACAP	4475/IT.JHP.440/VI/2020	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap Tahun 2020	5	5	-	-	-
154	2020	Evaluasi	SURAT	PPN PEKALONGAN	4479/IT.JHP.440/VII/2020	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan Tahun 2020	4	4	-	-	-
155	2020	Evaluasi	SURAT	PPN PALABUHANRATU	4481/IT.JHP.440/VII/2020	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Tahun 2020	4	4	-	-	-
156	2020	Evaluasi	SURAT	PPN KARANGANTU	4487/IT.JHP.440/VII/2020	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada PPN Karangantu Tahun 2020	4	4	-	-	-
157	2020	Evaluasi	SURAT	PPS NIZAM ZACHMAN	4498/IT.JHP.440/VII/2020	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Tahun 2020	5	5	-	-	-
158	2020	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	4500. IT.JHP.440/VII/2020	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020	1	6	-	-	-
159	2020	Evaluasi	SURAT	BBPI SEMARANG	4508/IT.JHP.440/VIII/2020	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang Tahun 2020	5	11	-	-	-
160	2020	Revisi	SURAT	DIT KAPI	4536/IT.JHP.350/VIII/2020	Hasil Revisi Dokumen Pembayaran Termin II atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Saumlaki	4	5	-	-	-
161	2020	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	4544/IT.J.0HP.321/VIII/2020	Hasil Revisi RKA-K/L Pagu Indikatif TA 2021 Saker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	3	3	-	-	-
162	2020	Revisi	SURAT	PPN KEJAWANAN	4551/IT.JHP.350/VIII/2020	Hasil Revisi atas Perencanaan Rehab Pagar Kelling Kantor di PPN Kejawan	3	3	-	-	-
163	2020	Revisi	SURAT	PPS NIZAM ZACHMAN	4558/IT.JHP.350/IX/2020	Hasil Revisi atas Perencanaan Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayanan (Rambu Suar) di PPS Nizam Zachman	6	6	-	-	-
164	2020	Revisi	SURAT	DIT PDK	4572/IT.JHP.350/IX/2020	Hasil Revisi Dokumen Pemeriksaan dan Pembayaran Tahap III Kegiatan Penyusunan Aduendum ANDAL dan RKL-RPL Pembangunan PP Selat Lampa SKPT Natuna TA 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kelayakan, Dijen Perikanan Tangkap	1	1	-	-	-
165	2020	Revisi	SURAT	DIT PDK	4578/IT.JHP.350/IX/2020	Hasil Revisi Dokumen Pembayaran Termin I Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna TA 2020 (Kegiatan Hibah JICA-Jepang) pada Direktorat Perizinan dan Kelayakan, Direktorat Jenderal (Dijen) Perikanan Tangkap	1	1	-	-	-
166	2020	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	4598/IT.JHP.470/IX/2020	Hasil Evaluasi Manajemen Risiko TA 2020 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	5	10	-	-	-
167	2020	Evaluasi	SURAT	PPN TANJUNGPANDAN	4599. IT.JHP.430/IX/2020	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan Tahun 2020	1	6	-	-	-
168	2020	Evaluasi	BAB	PPN TANJUNGPANDAN	4601. IT.JHP.470/X/2020	Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan, Provinsi Kep. Bangka Belitung	5	12	2.239.153	-	-
169	2020	Pemantauan	SURAT	PPN TANJUNGPANDAN	4607/IT.JHP.550/X/2020	Hasil Pemantauan Kepatuhan Pertanggung jawaban Keuangan Tahun 2020 (termasuk Penanganan Covid-19) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan, Provinsi Kep. Bangka Belitung	5	7	1.500.000	-	-
170	2020	Audit	SURAT	DIT KAPI	4613/IT.JHP.230/X/2020	Proby Audit terhadap HPS Pengadaan Alat Penangkapan Ikan TA 2020 di Direktorat KAPI Dijen Perikanan Tangkap	3	5	-	-	-
171	2020	Evaluasi	SURAT	PPN TERNATE	4622/IT.JHP.430/X/2020	Laporan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate TA 2020	1	6	-	-	-
172	2020	Evaluasi	BAB	PPN TERNATE	4623/IT.JHP.470/X/2020	Laporan Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate TA 2019 dan 2020	6	15	679.669	-	-
173	2020	Pemantauan	SURAT	PPN TERNATE	4624/IT.JHP.550/X/2020	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan termasuk Anggaran Covid-19 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate	4	8	821.095	-	-
174	2020	Revisi	SURAT	DIT PDK	4633/IT.JHP.350/X/2020	Hasil Revisi Dokumen Pemeriksaan dan Pembayaran Tahap III Pekerjaan Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Pembangunan Pasar Ikan, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna TA 2020 pada Direktorat Perizinan dan Kelayakan, Direktorat Jenderal (Dijen) Perikanan Tangkap	1	1	-	-	-
175	2020	Evaluasi	BAB	PPN KARANGANTU	4638/IT.JHP.470/X/2020	Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Provinsi Banten	4	8	4.592.532	-	-
176	2020	Evaluasi	SURAT	PPN KARANGANTU	4637/IT.JHP.430/X/2020	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu TA 2020, Provinsi Banten	1	16	-	-	-
177	2020	Pemantauan	SURAT	PPN KARANGANTU	4638/IT.JHP.550/X/2020	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu TA 2020	2	9	7.771.000	-	-
178	2020	Pemantauan	SURAT	PPS NIZAM ZACHMAN	4645/IT.JHP.550/X/2020	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2020 pada PPS Nizam Zachman	4	5	5.847.500	-	-
179	2020	Evaluasi	BAB	PPS NIZAM ZACHMAN	4646/IT.JHP.470/X/2020	Evaluasi PNBP TA 2020 pada PPS Nizam Zachman	5	11	32.590.000	-	-
180	2020	Evaluasi	SURAT	PPS NIZAM ZACHMAN	4653/IT.JHP.430/X/2020	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020 pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta	6	10	-	-	-
181	2020	Revisi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	4671/IT.JHP.340/X/2020	Hasil Revisi Rencana Kebutuhan BUN (RIGBUN) TA 2022 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	4	5	-	-	-
182	2020	Revisi	SURAT	PPP TELUK BATANG	4685/IT.JHP.350/X/2020	Hasil Revisi atas Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Administrasi PPP Teluk Batang					
183	2020	Revisi	SURAT	DIT PDK	4689/IT.JHP.350/X/2020	Hasil Revisi Dokumen Pembayaran Termin II Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

192	2020	Revisi	SURAT	DIT KAPI	474/IT.JHP.350/XII/2020	Revisi Dokumen Pembayaran Termin IV atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Saumlaki	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS	
193	2020	Revisi	SURAT	DIT PDK	474/IT.JHP.350/XII/2020	Hasil Revisi Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sentra Pengembangan Usaha Nelayan (BSPUN) Kendaraan Roda Tiga Berinsulasi Tahap I dan Tahap II	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS	
194	2020	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	475/IT.JHP.380/XII/2020	Hasil Revisi PPK Lingkup Dijen Perikanan Tangkap TA 2020	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	TUNTAS	
195	2021	Revisi	SURAT	DIT PDK	477/IT.JHP.350/II/2021	Hasil Revisi Dokumen Pembayaran Termin IV atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Natuna TA 2020 (Kegiatan Hibah JICA Jepang) pada Direktorat Perikanan dan Kelayakan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Jakarta	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS	
196	2021	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	479/IT.JHP.330/II/2021	Hasil Revisi Laporan Kinerja Dijen Perikanan Tangkap Tahun 2020 di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS	
197	2021	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	480/IT.JHP.323/II/2021	Hasil Revisi Anggaran atas Reallocating dan Realokasi Anggaran TA 2021 lingkup Dijen Perikanan Tangkap	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS	
198	2021	Revisi	SURAT	PPN KEJAWANAN	481/IT.JHP.350/II/2021	Hasil Revisi Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Area Pengembangan Bagian Barat pada PPN Kejawanan di Jakarta	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	TUNTAS	
199	2021	Pemantauan	SURAT	PPN AMBON	4835/IT.JHP.550/III/2021	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2020 dan Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021 pada PPN Ambon	6	8	-	6	8	-	-	-	-	-	TUNTAS	
200	2021	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	488/IT.JHP.410/IV/2021	Hasil Evaluasi atas Biaya Pengiriman pada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2020	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS	
201	2021	Audit	SURAT	PPS NIZAM ZACHMAN	488/IT.JHP.110/IV/2021	UHA Kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) LHA Kinerja TA 2020 pada PPS Nizam Zachman	8	20	59.970.682	8	20	59.970.682	-	-	-	-	TUNTAS	
202	2021	Audit	SURAT	PPN TERNATE	489/IT.JHP.230/IV/2021	Probly Audit terhadap Perencanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan TA 2021 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate	2	9	-	2	9	-	-	-	-	-	TUNTAS	
203	2021	Evaluasi	BAB	PPP TELUK BATANG	490/IT.JHP.470/IV/2021	UHE PNBSP PPP Teluk Batang	4	5	-	4	5	-	-	-	-	-	TUNTAS	
204	2021	Audit	SURAT	PPN TUAL	491/IT.JHP.110/IV/2021	Probly Audit Perencanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual Tahun 2021	3	4	-	3	4	-	-	-	-	-	TUNTAS	
205	2021	Revisi	SURAT	PPS CILACAP	4932/IT.JHP.350/V/2021	Revisi KAK dan RAB Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Addendum AMDAL Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera	3	4	-	3	4	-	-	-	-	-	TUNTAS	
206	2021	Audit	BAB	PPN PEKALONGAN	4939/IT.JHP.120/V/2021	(PPS) Cilacap TA 2021	7	10	5.705.084	7	10	5.705.084	-	-	-	-	TUNTAS	
207	2021	Audit	BAB	PPS BITUNG	4942/IT.JHP.110/V/2021	Audit Kinerja pada PPS Bitung TA 2020	7	13	116.724.104	7	13	116.724.104	-	-	-	-	TUNTAS	
208	2021	Revisi	BAB	DIT KAPI	4950/IT.JHP.350/V/2021	Revisi Pelebaran Dokumen Tender Penyusunan AMDAL Pengembangan PP Ukuran, SKPT Saumlaki pada Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI)	4	7	-	4	7	-	-	-	-	-	TUNTAS	
209	2021	Evaluasi	BAB	DIT PDK	4979/IT.JHP.470/V/2021	Evaluasi atas Kegiatan Penataan Kampung Nelayan Maju TA 2021 di Kabupaten Belling, Provinsi Bangka Belitung, pada Direktorat Perikanan dan Kelayakan	5	23	-	3	13	-	2	10	-	-	PROSES	
210	2021	Audit	BAB	PPN KEJAWANAN	4981/IT.JHP.110/VI/2021	Audit Kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan TA 2020 s.d. 31 Maret 2021	6	13	6.307.000	6	13	6.307.000	-	-	-	-	TUNTAS	
211	2021	Pemantauan	SURAT	PPN AMBON	5003/IT.JHP.550/VI/2021	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon TA 2021	2	3	4.819.200	2	3	4.819.200	-	-	-	-	TUNTAS	
212	2021	Evaluasi	BAB	PPN SUNGAILIAT	5013/IT.JHP.470/VI/2021	Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2020 - 2021 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat	1	4	1.273.359	1	4	1.273.359	-	-	-	-	TUNTAS	
213	2021	Pemantauan	SURAT	PPN SUNGAILIAT	5017/IT.JHP.550/VI/2021	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2020-2021 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat	9	19	57.626.050	9	19	57.626.050	-	-	-	-	TUNTAS	
214	2021	Evaluasi	BAB	PPN AMBON	5028/IT.JHP.470/VI/2021	Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon	6	24	92.332.803	6	24	92.332.803	-	-	-	-	TUNTAS	
215	2021	Evaluasi	BAB	PPN TANJUNGPANDAN	5032/IT.JHP.470/VI/2021	Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020-2021 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan	4	16	60.075.880	4	16	60.075.880	-	-	-	-	TUNTAS	
216	2021	Audit	BAB	PPN SIBOLGA	5052/IT.JHP.110/VI/2021	Audit Kinerja TA 2021 Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	8	16	17.793.657	8	16	17.793.657	-	-	-	-	TUNTAS	
217	2021	Revisi	SURAT	PPN PALABUHANRATU	5048/IT.JHP.350/VI/2021	Revisi Atas Usulan Addendum Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Breakwater Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS	
218	2021	Audit	SURAT	DIT KAPI	5061/IT.JHP.110/VI/2021	Probly Audit Penetapan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan TA 2021 pada Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	TUNTAS	
219	2021	Audit	BAB	PPN BRONDONG	5069/IT.JHP.110/VI/2021	Audit Kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong TA 2020 s.d. 31 Mei 2021	8	20	20.496.970	8	20	20.496.970	-	-	-	-	TUNTAS	
220	2021	Audit	BAB	BBPI SEMARANG	5070/IT.JHP.210/VI/2021	Hasil Audit Kepegawaian TA 2020-2021 pada Balai Besar	3	6	-	3	6	-	-	-	-	-	TUNTAS	
221	2021	Audit	BAB	SEKRETARAT DJPT	5071/IT.JHP.210/VI/2021	Perangkapan Ikan (BSP), Provinsi Jawa Tengah	3	6	-	3	6	-	-	-	-	-	TUNTAS	
222	2021	Evaluasi	SURAT	SEKRETARAT DJPT	5090/IT.JHP.440/VI/2021	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal (Dijen) Perikanan Tangkap Tahun 2021	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	TUNTAS	
223	2021	Evaluasi	SURAT	PPN SUNGAILIAT	5117/IT.JHP.440/VII/2021	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat Tahun 2021	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS	
224	2021	Evaluasi	SURAT	PPS BELAWAN	5129/IT.JHP.440/VII/2021	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan Tahun 2021	1	4	-	1	4	-	-	-	-	-	TUNTAS	
225	2021	Evaluasi	SURAT	PPN TUAL	5127/IT.JHP.440/VII/2021	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Salkor Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	1	4	-	1	4	-	-	-	-	-	TUNTAS	
226	2021	Evaluasi	SURAT	PPS BUNGUS	5129/IT.JHP.440/VII/2021	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Tahun 2021	1	7	-	1	7	-	-	-	-	-	TUNTAS	
227	2021	Evaluasi	SURAT	PPN PENGAMBENAN	5131/IT.JHP.440/VII/2021	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambenan Tahun 2021	1	4	-	1	4	-	-	-	-	-	TUNTAS	
228	2021	Evaluasi	SURAT	PPN KWANDANG	5136/IT.JHP.440/VII/2021	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang Tahun 2021	1	6	-	1	6	-	-	-	-	-	TUNTAS	
229	2021	Revisi	SURAT	SEKRETARAT DJPT	5144/IT.JHP.310/VIII/2021	Revisi Laporan Keuangan Semester I TA 2021 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	6	38	-	6	38	-	-	-	-	-	TUNTAS	
230	2021	Audit	BAB	SEKRETARIAT DJPT	5146/IT.JHP.110/VIII/2021	Audit Pelaksanaan Barang Misk Nelayan (BMN) dan Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020	7	25	791.948.485	5	21	49.096.339	2	4	742.852.146	-	-	PROSES
231	2021	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	T.1019/IT.J.2HP.460/IX/2021	Evaluasi Penanganan Bantuan Kependidikan TA 2021 pada Dijen Perikanan Tangkap	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	TUNTAS	
232	2021	Audit	SURAT	PPN KWANDANG	R.1021/IT.J.2HP.230/X/2021	Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPN Kwandang TA 2021	2	2	4.263.265	2	2	4.263.265	-	-	-	-	TUNTAS	
233	2021	Audit	SURAT	PPN PENGAMBENAN	T.1043/IT.J.2HP.230/X/2021	Probly Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPN Pengambenan Provinsi Bali	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS	
234	2021	Audit	SURAT	PPN TERNATE	R.1044/IT.J.2HP.230/X/2021	Probly Audit Pelaksanaan Peningkatan Fasilitas PPN Ternate Provinsi Maluku Utara	2	8	4.709.137	2	8	4.709.137	-	-	-	-	TUNTAS	
235	2021	Audit	SURAT	PPN PALABUHANRATU	R.1046/IT.J.2HP.240/X/2021	Probly Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPN Palabuhanratu TA 2021	1	1	10.843.305	1	1	10.843.305	-	-	-	-	TUNTAS	
236	2021	Evaluasi	SURAT	PPN PALABUHANRATU	B.1047/IT.J.2HP.430/X/2021	Evaluasi Pelayanan Publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu TA 2021	1	9	-	1	9	-	-	-	-	-	TUNTAS	
237	2021	Audit	SURAT	PPN TANJUNGPANDAN	T.1050/IT.J.2HP.240/X/2021	Audit Pelaksanaan Pembangunan Jalan di PPN Tanjung Pandan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	4	1.307.150	2	4	1.307.150	-	-	-	-	TUNTAS	
238	2021	Audit	SURAT	PPN PEMANGKAT	R.1052/IT.J.2HP.240/X/2021	Probly Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPN Pemangkat Provinsi Kalimantan Barat	2	5	8.220.559	2	5	8.220.559	-	-	-	-	TUNTAS	
239	2021	Audit	SURAT	PPN TUAL	T.1053/IT.J.2HP.240/X/2021	Probly Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPN Tual TA 2021	4	16	-	4	16	-	-	-	-	-	TUNTAS	
240	2021	Revisi	SURAT	DIT KAPI	T.1054/IT.J.2HP.350/X/2021	Hasil Revisi Dokumen Pembayaran Termin I Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Jasa Konsultan Perencana Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Pengembangan Pelabuhan Perikanan (PP) Ukuran Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tambora	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS	
241	2021	Evaluasi	SURAT	SEKRETARAT DJPT	B.1059/IT.J.2HP.470/X/2021	Evaluasi Pengurusan Gender Tahun 2021 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	TUNTAS	
242	2021	Revisi	SURAT	PPN SUNGAILIAT	T.1060/IT.J.2HP.380/X/2021	Revisi atas Barang Misk Nelayan (BMN) dan Departemen Pertanian Yang Tidak Dikeluarkan Keberadaannya Pada PPN Sungailiat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS	
243	2021	Audit	SURAT	PPS CILACAP	R.1069/IT.J.2HP.240/X/2021	Hasil Probly Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelabuhan di PPS Cilacap TA 2021	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS	
244	2021	Audit	BAB	PPS BUNGUS	R.1089/IT.J.2HP.110/X/2021	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus TA 2021	7	20	350.631.473	7	20	350.631.473	-	-	-	-	TUNTAS	
245	2021	Audit	SURAT	DIT KAPI	5008/IT.JHP.110/VI/2021	Probly Audit atas Pengadaan Kapal 5 GT Tahun Anggaran 2021 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Dijen Perikanan Tangkap	3	6	-	3	6	-	-	-	-	-	TUNTAS	
246	2022	Audit	BAB	PPS NIZAM ZACHMAN	R.161/IT.J.2HP.130/II/2022	Audit atas Saldo Putang dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Tambak Laut pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta	3	30	-	1	25	-	2	5	-	-	PROSES	
247	2022	Pemantauan	SURAT	PPN PRIGI	R.191/IT.J.2HP.650/II/2022	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TA 2021 pada PPN Prigi	11	11	25.280.659	11	11	25.280.659	-	-	-	-	-	TUNTAS
248	2022	Revisi	SURAT	DIT KAPI	R.341/IT.J.2HP.380/II/2022	Revisi Pembayaran atas Paket Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan ANDALALIN Pengembangan PP Ukuran, SKPT Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tambora, Provinsi Maluku	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS	
249	2022	Pemantauan	SURAT	PPN BRONDONG	R.361/IT.J.2HP.550/II/2022	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ TA 2021 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong	7	9	-	7	9	-	-	-	-	-	TUNTAS	
250	2022	Revisi	SURAT	DIT KAPI	R.371/IT.J.2HP.350/II/2022	Revisi Pembayaran Termin III Konsultan Andral PP Ukuran pada Direktorat KAPI Dijen Perikanan Tangkap	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS	
251	2022	Revisi	SURAT	SEKRETARAT DJPT	R.381/IT.J.2HP.330/II/2022	Revisi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2021	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	TUNTAS	
252	2022	Revisi	SURAT	DINAS KP PROV. SULA	R.441/IT.J.2HP.550/II/2022	Revisi atas Pengadaan Bantuan Kapal 5 GT pada Salkor Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2022	1	7	-	1	7	-	-	-	-	-	TUNTAS	
253	2022	Evaluasi	SURAT	PPN PENGAMBENAN	R.471/IT.JHP.430/III/2022	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambenan	1	8	-	1	8	-	-	-	-	-	TUNTAS	
254	2022	Audit	SURAT	PPN PENGAMBENAN	R.601/IT.J.2HP.130/III/2022	Audit Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambenan TA 2021 (PNBP)	2	4	47.987.180	1	3	28.442.945	1	1	19.544.235	-	-	PROSES

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

255	2022	Audit	SURAT	PPN PENGAMBANGAN	R.61/ITJ.2HP.130/III/2022	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan TA 2021	3	7	-	3	7	-	-	-	-	-
256	2022	Revisi	SURAT	PPN KEJAWANAN	R.63/ITJ.2HP.550/II/2022	Revisi atas Dokumen Perencanaan Perikanan Area Paksi Wisata dan Pembuatan Trestle di PPN Kelayan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-
257	2022	Audit	BAB	PPN PEMANGKAT	R.66/ITJ.2HP.130/IV/2022	Audit Penanaman Negara Bukan Pajak (FNBP) TA 2021	11	26	7.317.694	11	26	7.317.694	-	-	-	-
258	2022	Audit	BAB	PPS BELAWAN	R.69/ITJHP.110/IV/2022	2022 pada PPN Pemangkat	10	29	114.343.063	10	29	114.343.063	-	-	-	-
259	2022	Audit	BAB	PPN PALABUHARANUTU	R.74/ITJ.2HP.110/IV/2022	Audit Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan TA 2022	7	17	14.276.363	7	17	14.276.363	-	-	-	-
260	2022	Audit	BAB	PPN TERNATE	R.75/ITJ.2HP.110/IV/2022	Palabuhanratu TA 2022	2	6	-	2	6	-	-	-	-	-
261	2022	Revisi	SURAT	PPS NIZAM ZACHMAN	R.84/ITJ.2HP.550/IV/2022	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-
262	2022	Audit	BAB	PPN KARANGANTU	R.91/ITJ.2HP.130/IV/2022	Revisi Dokumen Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah dan Pompa Pengendali Banjir Barat PPS Nizam Zachman	8	19	-	8	19	-	-	-	-	-
263	2022	Evaluasi	SURAT	PPS KENDARI	R.94/ITJ.2HP.350/V/2022	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu TA 2021	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-
264	2022	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DIJPT	R.104/ITJ.2HP.410/V/2022	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari	2	20	386.924.577	-	3	40.567.938	2	17	346.356.63	9
265	2022	Evaluasi	SURAT	PPS BELAWAN	R.125/ITJHP.430/IV/2022	Evaluasi Penanaman Negara Bukan Pajak (FNBP) Atas Jasa Tambat Labuh dan Pas Masuk TA 2021	1	11	-	1	11	-	-	-	-	-
266	2022	Revisi	BAB	SEKRETARIAT DIJPT	R.149/ITJ.2HP.320/V/II/2022	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan TA 2022	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
267	2022	Evaluasi	SURAT	PPN TANJUNGPANDAN	R.157/ITJ.2HP.430/III/2022	Revisi Penghapusan Barang Milik Negara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah	1	12	-	1	12	-	-	-	-	-
268	2022	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DIJPT	R.162/ITJHP.440/VIII/2022	Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) TanjungPandan	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-
269	2022	Evaluasi	SURAT	PPN TANJUNGPANDAN	R.167/ITJHP.440/VIII/2022	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal (Dijep) Perikanan Tangkap	4	10	-	4	10	-	-	-	-	-
270	2022	Evaluasi	SURAT	PPN TERNATE	R.177/ITJ.2HP.470/VIII/2022	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan	1	7	-	1	7	-	-	-	-	-
271	2022	Evaluasi	SURAT	PPN TERNATE	R.178/ITJ.2HP.440/VIII/2022	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate Tahun 2022	4	12	-	4	12	-	-	-	-	-
272	2022	Revisi	SURAT	PPN TERNATE	R.178/ITJ.2HP.380/VIII/2022	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate Tahun 2022	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
273	2022	Audit	SURAT	DIT POK	R.180/ITJ.2HP.130/VIII/2022	Revisi Usulan Penghapusan BUN Gedung Kantor Pemaman Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate	1	8	2.182.416	1	8	2.182.416	-	-	-	-
274	2022	Audit	BAB	PPP TELUK BATANG	R.182.ITJHP.110/VIII/2022	Audit Pelaksanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Pelabuhan (Timbangan Online) TA 2022	5	13	10.518.959	5	13	10.518.959	-	-	-	-
275	2022	Evaluasi	SURAT	PPP TELUK BATANG	R.183/ITJ.2HP.430/VIII/2022	Audit Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Teluk Batang Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2021-2022	1	16	-	1	16	-	-	-	-	-
276	2022	Evaluasi	SURAT	PPP TELUK BATANG	R.185/ITJHP.440/VIII/2022	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) PPP Teluk Batang	4	10	-	4	10	-	-	-	-	-
277	2022	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DIJPT	R.187/ITJHP.460/VIII/2022	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Teluk Batang Tahun 2022	5	13	-	5	13	-	-	-	-	-
278	2022	Audit	SURAT	DIT POK	R.206/ITJ.2HP.130/X/2022	Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan TA 2022 pada Dijep Perikanan Tangkap	7	13	-	1	4	-	6	9	-	-
279	2022	Revisi	SURAT	BBPI SEMARANG	R.220/ITJ.2HP.380/X/2022	Audit Kegiatan Penataan Kampung Nelayan Maju pada Direktorat Perizinan dan Kelayakanan Dijep Perikanan Tangkap TA 2022	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
280	2022	Pemantauan	SURAT	DINAS KP PROVINSI G	R.222/ITJ.2HP.550/X/2022	Revisi atas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Eks Departemen Pertanian pada Satker Balai Besar Perangkapan Ikan Semarang	3	4	-	3	4	-	-	-	-	-
281	2022	Pemantauan	SURAT	DINAS KP PROVINSI N	R.223/ITJ.2HP.550/X/2022	Pemantauan Pelaksanaan PBJ Satker Tugas Pembantuan TA 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-
282	2022	Pemantauan	SURAT	DINAS KP PROVINSI K	R.224/ITJ.2HP.550/X/2022	Pemantauan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Satker Tugas Pembantuan (TP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
283	2022	Pemantauan	SURAT	SEKRETARIAT DIJPT	R.225/ITJ.2HP.550/X/2022	Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Satker Tugas Pembantuan (TP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-
284	2022	Revisi	SURAT	PPN BRONDONG	R.226/ITJ.2HP.340/X/2022	Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDON) Lingkup Dijep Perikanan Tangkap	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-
285	2022	Pemantauan	SURAT	DIT PP	R.229/ITJ.2HP.550/X/2022	Revisi Atas Barang Milik Negara (BMN) Rusak Berat Dan Henti Guna Serta BMN Tidak Dapat Diketahui Keberadaannya pada PPN Brondong	4	12	20.068.545	2	9	20.068.545	2	3	-	-
286	2022	Pemantauan	SURAT	DIT POK	R.237/ITJ.2HP.550/X/2022	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan TA 2022	4	9	1.200.000	3	7	1.200.000	1	2	-	-
287	2022	Pemantauan	SURAT	SEKRETARIAT DIJPT	R.238/ITJ.2HP.550/X/2022	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan pada Direktorat Perizinan dan Kelayakanan TA 2022	3	7	-	-	-	-	3	7	-	-
288	2022	Evaluasi	SURAT	PPN PRIGI	R.245/ITJ.2HP.440/X/2022	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretaris Dijep Perikanan Tangkap TA 2022	3	4	-	3	4	-	-	-	-	-
289	2022	Audit	SURAT	DINAS KP PROVINSI M	R.247/ITJ.2HP.130/X/2022	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi	2	9	-	2	9	-	-	-	-	-
290	2022	Evaluasi	SURAT	PPN PEMANGKAT	R.248/ITJHP.440/X/2022	Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara TA 2022	4	6	-	4	6	-	-	-	-	-
291	2022	Evaluasi	SURAT	DIT POK	R.254/ITJ.2HP.430/X/2022	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat	1	9	-	-	8	-	1	1	-	-
292	2022	Evaluasi	SURAT	PPN AMBON	R.255/ITJ.2HP.440/X/2022	Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Perizinan dan Kelayakanan Tahun 2022	4	7	-	4	7	-	-	-	-	-
293	2022	Evaluasi	SURAT	DIT KAPI	R.256/ITJ.2HP.430/X/2022	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon Tahun 2022	1	10	-	1	10	-	-	-	-	-
294	2022	Audit	BAB	PPN AMBON	R.257/ITJ.2HP.130/X/2022	Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022	6	11	41.711.608	6	11	41.711.608	-	-	-	-
295	2022	Evaluasi	SURAT	PPN PRIGI	R.258/ITJ.2HP.430/X/2022	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon TA	1	6	-	1	6	-	-	-	-	-
296	2022	Pemantauan	SURAT	DINAS KP PROVINSI S	R.259/ITJ.2HP.550/X/2022	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Tahun 2022	5	5	-	1	1	-	4	4	-	-
297	2022	Pemantauan	BAB	DIT KAPI	R.262/ITJ.2HP.550/X/2022	Pemantauan Pelaksanaan PBJ Satker Tugas Pembantuan TA 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	2	8	8.780.000	2	8	8.780.000	-	-	-	-
298	2022	Evaluasi	SURAT	PPS BITUNG	R.266/ITJ.2HP.430/X/2022	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Bersumber dari APBN Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2022	1	11	-	1	11	-	-	-	-	-
299	2022	Evaluasi	SURAT	PPN PEMANGKAT	R.287/ITJ.2HP.430/X/2022	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung TA 2022	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
300	2022	Pemantauan	BAB	DIT PSDI	R.289/ITJ.2HP.550/X/2022	Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 pada PPN Pemangkat	4	19	87.173.631	1	15	63.436.785	3	4	23.736.846	-
301	2022	Evaluasi	SURAT	PPS BITUNG	R.297/ITJ.2HP.440/X/2022	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Bersumber dari APBN dan PHLN Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TA 2022	4	5	-	4	5	-	-	-	-	-
302	2022	Audit	BAB	DIT KAPI	R.311/ITJ.2HP.130/XII/2022	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Tahun 2022	3	6	-	3	6	-	-	-	-	-
303	2022	Revisi	SURAT	DIT KAPI	R.313/ITJ.2HP.380/XII/2022	Audit Pelaksanaan Bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2022	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-
304	2022	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DIJPT	R.316/ITJ.2HP.470/XII/2022	Revisi Pembayaran Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA 2022	2	4	-	-	-	-	2	3	-	-
305	2022	Audit	BAB	DINAS KP PROVINSI JAR	R.330/ITJHP.110/X/2022	Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DIJPT)	3	8	882.619	3	8	882.619	-	-	-	-
306	2022	Pemantauan	SURAT	PPN PENGAMBANGAN	R.318/ITJ.2HP.550/XII/2022	Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah TA 2022	2	4	-	2	4	-	-	-	-	-
307	2022	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DIJPT	R.324/ITJ.2HP.380/XII/2022	Pemantauan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Tahap II Tahun 2022 di PPN Pengembangan	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-
308	2022	Revisi	SURAT	DIT KAPI	R.329/ITJ.2HP.380/XII/2022	Revisi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2022 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
309	2022	Audit	BAB	PPN TANJUNGPANDAN	R.333/ITJ.2HP.130/XII/2022	Revisi atas Pembayaran Pengadaan Alat Penangkapan Ikan TA 2022 Tahap VI	11	17	9.479.567	11	17	9.479.567	-	-	-	-
310	2022	Pemantauan	SURAT	DINAS KP PROVINSI RI	R.344/ITJ.2HP.550/XII/2022	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan TA 2022	2	5	-	2	5	-	-	-	-	-
311	2023	Pemantauan	SURAT	PPS BELAWAN	R.23/ITJ.2HP.550/I/2023	Pemantauan Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, di Provinsi Riau	2	4	1.186.500	2	4	1.186.500	-	-	-	-
312	2023	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DIJPT	R.26/ITJ.2HP.380/II/2023	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Pengelolaan Barang Milik Negara TA 2022 pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-
313	2023	Pemantauan	SURAT	PPN PENGAMBANGAN	R.27/ITJ.2HP.550/II/2023	Revisi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-
314	2023	Revisi	SURAT	PPN PRIGI	R.29/ITJ.2HP.380/II/2023	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Pengelolaan Barang Milik Negara TA 2022 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-
315	2023	Pemantauan	SURAT	PPP TELUK BATANG	R.39/ITJ.2HP.550/II/2023	Revisi atas Perencanaan Pembangunan Pagar Kawasan dan Pemertan MOX Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
316	2023	Revisi	SURAT	PPN SIBOLGA	R.37/ITJ.2HP.380/II/2023	Pemantauan Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Teluk Batang	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-
317	2023	Evaluasi	SURAT	PPN KWANDANG	R.38/ITJ.2HP.430/III/2023	Revisi atas Dokumen Perencanaan Penetapan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu pada PPN Sibolga TA 2023	1	5	-	1	5	-	-	-	-	-
318	2023	Revisi	BAB	SEKRETARIAT DIJPT	R.39/ITJ.2HP.310/III/2023	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Tahun 2023	13	13	-	13	13	-	-	-	-	-
319	2023	Revisi	SURAT	PPN BRONDONG	R.42/ITJ.2HP.380/III/2023	Revisi Laporan Keuangan TA 2022 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-
320	2023	Pemantauan	SURAT	PPP TELUK BATANG	R.43/ITJ.2HP.550/III/2023	Revisi atas Perencanaan Rehabilitasi Bongkar Muat PPOI Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
321	2023	Revisi	SURAT	PPN KWANDANG	R.44/ITJ.2HP.550/III/2023	Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Reproduksi Menuju WBK Pada PPP Teluk Batang, Provinsi Kalimantan Barat	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-
322	2023	Audit	BAB	PPN KWANDANG	R.45/ITJ.2HP.130/III/2023	Revisi atas Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Mess Operator Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwardang	4	10	1.736.604	4	10	1.736.604	-	-	-	-
323	2023	Pemantauan	SURAT	PPN TANJUNGPANDAN	R.47/ITJ.2HP.550/III/2023	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwardang TA 2022	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-
324	2023	Evaluasi	SURAT	PPN TANJUNGPANDAN	R.50/ITJ.2HP.460/III/2023	Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada PPN Tanjungpandan, Provinsi Bangka Belitung	1	13	-	1	13	-	-	-	-	-
325	2023	Evaluasi	SURAT	PPN BRONDONG	R.62/ITJ.2HP.470/III/2023	Evaluasi Pelaksanaan FKNP pada PPN Brondong	5	12	-	5	12	-	-	-	-	-

[illegible]

326	2023	Reviu	SURAT	PPN PENGAMBENGAN	R.72/ITJ.2HP.380/III/2023	Reviu atas Pembangunan Pager Atas Gedung Pelayanan Terpadu PPN Pengembangan Provinsi Bali	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
327	2023	Pemantauan	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.81/ITJ.2HP.550/IV/2023	Pemantauan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
328	2023	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.82/ITJ.2HP.380/IV/2023	Reviu Penyelenggaraan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) pada Dijen Perikanan Tangkap Trivulian I TA. 2023	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	TUNTAS
329	2023	Reviu	SURAT	PPN PENGAMBENGAN	R.83/ITJ.2HP.380/IV/2023	Reviu atas Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Pengiraman Jalan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
330	2023	Pemantauan	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.84/ITJ.2HP.550/IV/2023	Lingkungan Pelabuhan dan Pembangunan Rumah Isidiah TA. 2023 pada Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Provinsi Nusa Tenggara Barat.	3	4	-	3	4	-	-	-	-	-	TUNTAS
331	2023	ngawasan Lainn	SURAT	PPN PEMANGKAT	R.85/ITJ.2HP.130/IV/2023	Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	3	5	-	3	5	-	-	-	-	-	TUNTAS
332	2023	Pemantauan	SURAT	DIT PP	R.88/ITJ.2HP.550/IV/2023	Asistensi Pengisian BMN PPN Pamangkat	2	5	-	2	5	-	-	-	-	-	TUNTAS
333	2023	Reviu	SURAT	DIT PP	R.89/ITJ.2HP.380/IV/2023	Pemantauan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Provinsi Maluku	1	4	-	1	4	-	-	-	-	-	TUNTAS
334	2023	Evaluasi	SURAT	PPS CILACAP	R.97/ITJ.2HP.430/IV/2023	Reviu Pembayaran Termin Keenam Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan SKPT Saumlaki, Provinsi Maluku	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
335	2023	Reviu	SURAT	DINAS KP PROVINSI S	R.103/ITJ.2HP.380/IV/2023	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2023	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
336	2023	Pemantauan	NOTA DINAS	DIT PP	R.105/ITJ.2TU.130/VIII/2023	Reviu atas Perencanaan Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Pesaran Darat Provinsi Sulawesi Tenggara	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
337	2023	Evaluasi	BAB	PPN PEMANGKAT	R.106/ITJ.2HP.470/IV/2023	Pemantauan Penerimaan Lahan pada Pelabuhan Perintis Perikanan (PPP) Teluk Awang	5	10	4.746.770	5	10	4.746.770	-	-	-	-	TUNTAS
338	2023	Evaluasi	BAB	PPS CILACAP	R.109/ITJ.2HP.470/IV/2023	Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	6	25	36.070.155	6	25	36.070.155	-	-	-	-	TUNTAS
339	2023	Pemantauan	SURAT	DIT PP	R.116/ITJ.2HP.550/IV/2023	Salabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap Hasil Pemantauan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai, Provinsi Maluku Utara	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
340	2023	Evaluasi	BAB	PPS BUNGUS	R.128/ITJ.2HP.470/VI/2023	Evaluasi Pengelolaan PNBP dan BMN pada Pelabuhan Perikanan Samudera	10	32	58.637.567	10	32	58.637.567	-	-	-	-	TUNTAS
341	2023	Evaluasi	SURAT	PPN KEJAWANAN	R.136/ITJ.2HP.430/VI/2023	Perikanan Samudera (PPS) Bungus Provinsi Sumatera Barat	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
342	2023	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.145/ITJ.2HP.320/VI/2023	Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023 pada PPN Kelawanan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
343	2023	Reviu	BAB	PPN SUNGAILIAT	R.158/ITJ.2HP.380/VI/2023	Reviu Penyelenggaraan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Trivulian II TA 2023 pada Dijen Perikanan Tangkap	1	8	-	1	8	-	-	-	-	-	TUNTAS
344	2023	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.163/ITJ.2HP.380/VI/2023	Reviu Audit atas Bangunan Eke Cold Storage dan Bangunan Toilet Umum (Sanimas) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
345	2023	Evaluasi	BAB	DIT KAPI	R.164/ITJ.2HP.640/VI/2023	Reviu atas Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A)	10	26	-	10	26	-	-	-	-	-	TUNTAS
346	2023	Reviu	SURAT	DIT PP	R.165/ITJ.2HP.380/VI/2023	Penyenggaraan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2023 Lingkup Dijen Perikanan Tangkap	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS
347	2023	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.166/ITJ.2HP.470/VI/2023	Reviu atas Usulan Pemohonan Pembayaran Termin Keempat Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Daso Majiko SKPT Morotai	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
348	2023	Reviu	SURAT	PPN TERNATE	R.170/ITJ.2HP.380/VI/2023	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal (Dijen) Perikanan Tangkap	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
349	2023	Reviu	BAB	SEKRETARIAT DJPT	R.173/ITJ.2HP.310/VI/2023	Reviu Kasus Pemutusan Kontrak atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada PPN Ternate	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	TUNTAS
350	2023	Evaluasi	BAB	PPN PENGAMBENGAN	R.176/ITJ.2HP.470/VI/2023	Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	4	8	39.120.583	3	7	30.492.481	1	1	8.628.102	-	PROSES
351	2023	Reviu	SURAT	DINAS KP PROV SULA	R.181/ITJ.2HP.380/VI/2023	Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2022-2023 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan Provinsi Bali	1	3	-	-	1	-	1	2	-	-	PROSES
352	2023	Evaluasi	BAB	PPN KEJAWANAN	R.195/ITJ.2HP.470/VI/2023	Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Darau Tondano pada Salter Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	4	13	-	4	13	-	-	-	-	-	TUNTAS
353	2023	Audit	SURAT	DINAS KP PROV. SULA	R.202/ITJ.2HP.130/IX/2023	Hasil Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2022-2023 pada Pelabuhan Perikanan Probity Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 pada Salter Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	2	7	-	1	6	-	1	1	-	-	PROSES
354	2023	Evaluasi	SURAT	DIT KAPI	R.206/ITJ.2HP.430/IX/2023	Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023	1	6	-	1	6	-	-	-	-	-	TUNTAS
355	2023	Evaluasi	SURAT	DIT PDK	R.207/ITJ.2HP.430/IX/2023	Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Perizinan dan Kelayakan Tahun 2023	1	4	-	1	4	-	-	-	-	-	TUNTAS
356	2023	Evaluasi	SURAT	PPS KENDARI	R.208/ITJ.2HP.470/IX/2023	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Tahun 2023	1	7	-	1	7	-	-	-	-	-	TUNTAS
357	2023	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	R.228/ITJ.2HP.470/IX/2023	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Tahun 2023	4	10	-	3	9	-	1	1	-	-	PROSES
358	2023	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.233/ITJ.2HP.380/X/2023	Evaluasi Kespelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023	3	4	-	3	4	-	-	-	-	-	TUNTAS
359	2023	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.235/ITJ.2HP.460/X/2023	Reviu atas Rencana Kelautan Barang Milik Negara (RKGNN) TA 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)	1	6	-	-	1	-	1	5	-	-	PROSES
360	2023	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.236/ITJ.2HP.320/X/2023	Evaluasi Penanganan Benturan Kepenitipan Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
361	2023	Evaluasi	SURAT	DIT KAPI	R.240/ITJ.2HP.470/X/2023	Reviu Penyelenggaraan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) pada Dijen Perikanan Tangkap Trivulian III TA. 2023	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS
362	2023	Evaluasi	SURAT	PPN TUAL	R.246/ITJ.2HP.430/X/2023	Evaluasi atas Pelaksanaan Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	1	7	-	1	7	-	-	-	-	-	TUNTAS
363	2023	Audit	BAB	PPN TUAL	R.248/ITJ.2HP.130/X/2023	Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara	3	21	2.577.000	3	21	2.577.000	-	-	-	-	TUNTAS
364	2023	Pemantauan	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.229/ITJ.2HP.550/X/2023	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual Provinsi Maluku TA 2023	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
365	2023	Audit	SURAT	PPS KENDARI	R.279/ITJ.2HP.130/X/2023	Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) TA. 2023	11	43	139.907.100	11	43	139.907.100	-	-	-	-	TUNTAS
366	2023	Evaluasi	SURAT	DIT KAPI	R.280/ITJ.2HP.470/X/2023	Inglup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	2	8	-	2	8	-	-	-	-	-	TUNTAS
367	2023	Pemantauan	SURAT	DIT PDK	R.286/ITJ.2HP.550/X/2023	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
368	2023	Audit	SURAT	DIT PP	R.296/ITJ.2HP.130/X/2023	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penatan Kampung Nelayan Maju TA. 2023 di Kota Bandar Lampung	3	5	-	3	5	-	-	-	-	-	TUNTAS
369	2023	Pemantauan	SURAT	DIT PDK	R.307/ITJ.2HP.550/X/2023	Probity Audit atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Uluatan SKPT Saumlaki Provinsi Maluku	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
370	2023	Pemantauan	SURAT	DIT PDK	R.308/ITJ.2HP.550/X/2023	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penatan Kampung Nelayan Maju TA. 2023 di Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS
371	2023	Pemantauan	SURAT	DIT PDK	R.312/ITJ.2HP.550/X/2023	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Maju TA. 2023 di Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
372	2023	Audit	SURAT	DIT PDK	R.321/ITJ.2HP.130/X/2023	Audit Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Maju (Kaleju) Dijen Perikanan Tangkap TA 2023	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
373	2023	Audit	SURAT	DIT PP	R.323/ITJ.2HP.130/X/2023	Probity Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana SKPT Morotai, Provinsi Maluku Utara	2	8	-	2	8	-	-	-	-	-	TUNTAS
374	2023	Evaluasi	BAB	DIT PSDI	R.332/ITJ.2HP.470/X/2023	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Hibah GEF 6 TA 2020 s.d. 2023 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) Dijen Perikanan Tangkap	13	53	115.153.591	10	48	115.153.591	3	5	-	-	PROSES
375	2023	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.329/ITJ.2HP.470/X/2023	Evaluasi Penyusunan Manajemen Risiko (MR) Tahun 2023 Lingkup Dijen Perikanan Tangkap	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
376	2023	Evaluasi	SURAT	DIT PDK	R.338/ITJ.2HP.470/X/2023	Evaluasi Kegiatan Pengembangan Koronal Nelayan pada Dijen Perikanan Tangkap TA 2023	3	11	16.263.500	3	11	16.263.500	-	-	-	-	TUNTAS
377	2023	Audit	BAB	DINAS KP PROV. JAW	R.340/ITJ.2HP.130/X/2023	Probity Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Salter Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah TA 2023	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
378	2023	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	R.348/ITJ.2HP.470/X/2023	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Hibah GEF 6 TA 2020 s.d. 2023 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) Dijen Perikanan Tangkap	6	40	33.344.640	2	31	-	4	9	33.344.640	-	PROSES
379	2023	Audit	SURAT	DINAS KP PROV SULA	R.352/ITJ.2HP.130/X/2023	Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2023	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	TUNTAS
380	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.9/ITJ.2HP.380/II/2024	Probity Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 pada Salter Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	TUNTAS
381	2024	Pemantauan	SURAT	DIT PDK	R.2/ITJ.2HP.660/I/2024	Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	TUNTAS
382	2024	Reviu	SURAT	DIT PP	R.3/ITJ.2HP.380/II/2024	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Maju TA 2023 di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	1	4	-	1	4	-	-	-	-	-	TUNTAS
383	2024	Reviu	SURAT	DKP PROV. MALUKU U	R.18/ITJ.2HP.380/II/2024	Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Pengawasan Proteksi Tang Pancing Demargo Tambahan PPI Fandi Kabupaten Bala Nurrfor.	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS
384	2024	Reviu	SURAT	PPP TELUK BATANG	R.23/ITJ.2HP.380/II/2024	Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Pemenuhan pada Salter Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Dinas KP Provinsi Maluku Utara	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
385	2024	Reviu	SURAT	PPN KWANDANG	R.28/ITJ.2HP.380/II/2024	Hasil Reviu Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Meisji (DED) PPP Teluk Batang TA 2024	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	TUNTAS
386	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.31/ITJ.2HP.380/II/2024	Hasil Reviu Rencana Pembangunan Fasilitas Pelabuhan pada PPN Kiandang TA 2024 di Prov. DKI Jakarta	2	4	-	2	4	-	-	-	-	-	TUNTAS
387	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.36/ITJ.2HP.380/II/2024	Hasil Reviu Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Pemenuhan pada PPN Kiandang TA 2024 di Prov. DKI Jakarta	1	5	-	-	-	-	1	5	-	-	PENDING
388	2024	Reviu	SURAT	DKP Prov. Aceh	R.35/ITJ.2HP.380/II/2024	Hasil Reviu atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Rehabilitasi Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Lampulo Provinsi Aceh	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	PROSES

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah

390	2024	Revisi	SURAT	PPN PRIGI	R.46/IT.J.2/HP.380/II/2024	Revisi Hasil Rekonsiliasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima kepada Pemilik Pengurus Nakhoda Kapal pada PPS Nizam Zachman	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
391	2024	Revisi	SURAT	PPN BRONDONG	R.52/IT.J.2/HP.380/II/2024	Hasil Revisi Hasil Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Outlet Penggepakan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Provinsi Jawa Timur di Prov. DKI Jakarta	5	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-
392	2024	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.116/IT.J.2/HP.380/II/2024	Hasil Revisi atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023	1	5	-	1	5	-	-	-	-	-	-
393	2024	Revisi	SURAT	PPN PRIGI	R.54/IT.J.2/HP.380/II/2024	Revisi Dokumen Perencanaan Teknik Peningkatan Gudang Keringang/Trays, Peningkatan Pagar Kawasan, dan Pembangunan Rambu Susar/Navigasi TA 2024 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi di Prov. DKI Jakarta	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-
394	2024	Pemantauan	SURAT	PPN TERNATE	R.57/IT.J.2/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada PPN Ternate	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-
395	2023	Revisi	SURAT	DIT PP	R.62/IT.J.2/HP.380/II/2024	Hasil Revisi Pemohonan Pembayaran Termin Keenam (Tahap Pendampingan Tender) Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa -	1	4	-	1	4	-	-	-	-	-	-
396	2024	Evaluasi	SURAT	PPS BUNGUS	R.63/IT.J.2/HP.470/II/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada PPS Bungus Tahun 2024	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
397	2024	Revisi	SURAT	DIT PDK	R.91/IT.J.2/HP.380/II/2024	Revisi Dokumen Perencanaan Paket Pekerjaan Pembangunan/Pemastafan Kampung Nelayan Modern Desa Warloka Pesisir Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT	2	4	-	2	4	-	-	-	-	-	-
398	2024	Revisi	SURAT	PPN TERNATE	R.94/IT.J.2/HP.380/II/2024	Revisi atas Hasil Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi TPI Higienis (Pos Pemantauan Kesayabandan) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-
399	2024	Revisi	SURAT	PPN KARANGANTU	R.99/IT.J.2/HP.380/II/2024	Revisi Hasil Perencanaan Pekerjaan Paket Rehab Gedung Perikanan pada PPN Karangantu	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-
400	2024	Audit	BAB	PPS BUNGUS	R.102/IT.J.2/HP.130/II/2024	Hasil Audit Kinerja pada PPS Bungus TA 2023/2024	7	20	-	7	20	-	-	-	-	-	-
401	2024	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.142/IT.JHP.380/II/2024	Hasil Revisi Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Tiwulan I TA 2024 pada Dijen Perikanan Tangkap	1	7	-	1	7	-	-	-	-	-	-
402	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	97/IT.J.2/HP.380/IV/2024	Hasil Revisi Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual Provinsi Maluku	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
403	2024	Pemantauan	NOTA DINAS	PPN KWANDANG	R.114/IT.J.2/HP.550/IV/2024	Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada PPN Kwandang Provinsi Gorontalo	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	-
404	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	98/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
405	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	101/IT.J.2/HP.380/V/2024	Laporan Hasil Revisi Atas Usulan Pemohonan Penghapusan Barang Milik Nusantara (BMN) dengan Cara Pemusnahan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, di Provinsi DKI Jakarta	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
406	2024	Revisi	NOTA DINAS	PPN PENGAMBENGAN	106/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Pekerjaan Konstruksi Rehab Trestel Dermaga pada PP Teluk Awang	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-
407	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	107/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Provinsi Sumatera Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
408	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	108/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Provinsi Kalimantan Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
409	2024	Evaluasi	NOTA DINAS	PPN PEKALONGAN	110/IT.J.2/HP.470/V/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
410	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	114/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Penghapusan BMN Benapa Bangunan Tugu pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kijawanan Provinsi Jawa Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
411	2024	Pemantauan	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	119/IT.J.2/HP.550/V/2024	Hasil Pemantauan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tiwulan I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Perikanan Tangkap	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-
412	2024	Evaluasi	NOTA DINAS	DIT PP	120/IT.J.2/HP.470/V/2024	Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Uluatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Provinsi Maluku	4	7	-	4	7	-	-	-	-	-	-
413	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	123/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
414	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	124/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-
415	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	127/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi atas Usulan Pemohonan Penghapusan BMN dengan Cara Pemusnahan pada Satker PPN Kwandang	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
416	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	128/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi atas Usulan Pemohonan Penghapusan BMN dengan cara Penjualan pada Satker PPN Pekalongan	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
417	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	134/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Atas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Cara Pemusnahan pada Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
418	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	153/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Atas Usulan Pemohonan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan Pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kijawanan Provinsi Jawa Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
419	2024	Audit	BAB	PPS BELAWAN	R.146/IT.J.2/HP.130/V/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan TA 2023-2024	5	15	-	5	15	-	-	-	-	-	-
420	2024	Audit	BAB	BBPI SEMARANG	R.147/IT.J.2/HP.130/V/2024	Hasil Audit Kinerja pada BBPI Semarang TA. 2023-2024	9	19	17.971.209	9	19	17.971.209	-	-	-	-	-
421	2024	Evaluasi	BAB	PPN PEMANGKAT	R.154/IT.J.2/HP.470/V/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Provinsi Kalimantan Barat	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-
422	2024	Audit	BAB	PPN PEKALONGAN	R.153/IT.J.2/HP.130/V/2024	Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2024	8	14	52.230.955	8	14	52.230.955	-	-	-	-	-
423	2024	Audit	BAB	PPN PENGAMBENGAN	R.166/IT.J.2/HP.130/V/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023-2024	6	17	49.362.854	5	15	40.098.657	1	2	9.264.197	-	-
424	2024	Revisi	SURAT	PPS BELAWAN	R.169/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi atas Aset Tidak Ditemukan Keberadaannya pada Satker Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan	1	5	-	1	5	-	-	-	-	-	-
425	2024	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.177/IT.J.2/HP.380/VI/2024	Hasil Revisi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PNPSUJ) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tiwulan II TA 2024	1	7	-	1	7	-	-	-	-	-	-
426	2024	Revisi	NOTA DINAS	PPN SUNGAILIAT	157/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Dokumen Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Talud Pemahan Pantai pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat Tahun Anggaran (TA) 2024	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-
427	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	163/IT.J.2/HP.380/VI/2024	Hasil Revisi Atas Usulan Pemohonan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan Pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
428	2024	Revisi	NOTA DINAS	SEKRETARIAT DJPT	164/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Atas Usulan Pemohonan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon.	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
429	2024	Revisi	NOTA DINAS	DIT PDK	169/IT.J.2/HP.380/V/2024	Hasil Revisi Dokumen Perencanaan Kampung Nelayan Modern (Kalmom) Desa Soure Jaya Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Kuala Raja Provinsi Aceh dan Desa Warloka Provinsi NTT pada Direktorat Perikanan dan Kelayakanan	1	7	-	-	6	-	1	1	-	-	-
430	2024	Evaluasi	BAB	DIT PP	190/IT.J.2/HP.470/VI/2024	Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	3	4	-	3	4	-	-	-	-	-	-
431	2024	Pemantauan	SURAT	PPS BUNGUS	R.181/IT.J.2/HP.550/VII/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada PPS Bungus	1	3	-	-	1	-	1	2	-	-	-
432	2024	Evaluasi	SURAT	PPN KARANGANTU	R.191/IT.J.2/HP.470/VII/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada PPN Karangantu	1	5	-	1	5	-	-	-	-	-	-
433	2024	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.193/IT.J.2/HP.380/VII/2024	Hasil Revisi Penghapusan BMN dengan Cara Pemusnahan pada Direktorat Perikanan dan Kelayakanan	447	2024	Evaluasi	SURAT	PPN PALABUHANRATU	R.259/IT.J.2/HP.470/VIII/2024	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu,				
434	2024	Audit	BAB	PPN KARANGANTU	R.200/IT.J.2/HP.130/VII/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu TA 2023-2024											
435	2024	Revisi	SURAT	DIT KAPI	R.201/IT.J.2/HP.380/VII/2024	Hasil Revisi Dokumen Penetapan Tender Pekerjaan Perbaikan Kapal Perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan											
436	2024	Revisi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.206/IT.J.2/HP.380/VIII/2024	Hasil Revisi atas Usulan Penghapusan BMN Karena Sebab Lain pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari											
437	2024	Audit	BAB	PPN PRIGI	R.219/IT.J.2/HP.130/VIII/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023-2024											
438	2024	Evaluasi	BAB	PPN SIBOLGA	R.220/IT.J.2/HP.470/VIII/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023-2024											
439	2024	Evaluasi	SURAT	PPN SIBOLGA	R.221/IT.J.2/HP.430/VIII/2024	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Tahun 2024											
440	2024	Evaluasi	SURAT	DIT KAPI	R.223/IT.J.2/HP.430/VIII/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI)											
441	2024	Revisi	SURAT	DIT PDK	R.225/IT.J.2/HP.550/VIII/2024	Hasil Pemantauan Kegiatan Kampung Nelayan Maju (Kelayu) di Kabupaten Bitir, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Maros dan Pendampingan Kalijau Kabupaten Kebumen											
442	2024	Audit	BAB	PPS BITUNG	R.232/IT.J.2/HP.130/VIII/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023-2024											
443	2024	Evaluasi	SURAT	PPN SUNGAILIAT	R.240/IT.J.2/HP.430/VIII/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada PPN Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024											
444	2024	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.250/IT.JHP.440/VIII/2023	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal (Dijen) Perikanan Tangkap											
445	2024	Revisi	SURAT	DIT PSDI	R.252/IT.JHP.470/VIII/2023	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan											
446	2024	Evaluasi	BAB	PPN SUNGAILIAT	R.258/IT.J.2/HP.470/IX/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan PNBP TA 2023 - 2024 pada											

1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	5	-	1	5	-	-	-	TUNTAS
8	19	987.409	8	19	987.409	-	-	-	11	29	40.117.563	9	27	33.557.563	2	2	6.560.000
1	4	-	1	4	-	-	-	-	1	6	-	1	6	-	-	-	TUNTAS
1	2	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	TUNTAS
7	18	13.474.330	7	18	13.474.330	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	TUNTAS
6	14	2.118.000	5	13	2.118.000	1	1	-	4	23	15.697.692	4	23	15.697.692	-	-	TUNTAS
1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	TUNTAS
1	1	-	1	1	-	-	-	-									TUNTAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah

Provinsi Jawa Barat

		Evaluasi	BAB	PPN PALABUHANRATU	R.260/ITJ.2HP.470/VIII/2024	Hasil Evaluasi Pengelolaan PNPB di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Provinsi Jawa Barat	6	21	38.513.296	6	21	38.513.296						TUNTAS	
449	2024	Evaluasi	NOTA DINAS	DIT PP	R.241/ITJHP.470/IX/2024	Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Tiakur Senta Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Msa, Provinsi Maluku	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
450	2024	Audit	SURAT	DIT KAPI	R.261/ITJ.2HP.130/IX/2024	Hasil Proby Audit Perencanaan Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan Berkurung Kurang dari 5 GT Tahun Anggaran 2024 Pada Direktorat KAPI	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
451	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.270/ITJ.2HP.380/IX/2024	Hasil Reviu Mutu/itas Penyelenggaraan SPMP Ternggas/Perjntanjan Kualitas pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024	1	4	-	1	4	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
452	2024	Evaluasi	SURAT	PPN TANJUNGPANDAN	R.271/ITJ.2HP.430/IX/2024	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan	1	1	-	4	7	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
453	2024	Evaluasi	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.278/ITJ.2HP.470/IX/2024	Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT)	4	7	-	1	2	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
454	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.302/ITJ.2HP.380/IX/2024	Hasil Reviu Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Eks.Dana Bergulir Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	2	-	5	13	-	-	-	-	-	-	PROSES	
455	2024	Evaluasi	BAB	DIT PSDI	R.364/ITJ.2HP.470/X/2024	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan oleh Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	6	14	-	1	3	-	1	1	-	-	-	TUNTAS	
456	2024	Reviu	BAB	SEKRETARIAT DJPT	R.378/ITJ.2HP.380/X/2024	Laporan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Lingkup Dijen Perikanan Tangkap Tahun 2026	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
457	2024	Reviu	SURAT	PPN KEJAWANAN	R.404/ITJ.2HP.320/X/2024	Hasil Reviu Pembayaran Tagihan Listrik Pada PPN Kajawanan	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
458	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.405/ITJ.2HP.320/X/2024	Hasil Reviu Atas Usulan Revisi Anggaran Kebutuhan Belanja Pegawai Dijen Perikanan Tangkap TA. 2024	1	2	-	1	10	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
459	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.336/ITJHP.380/X/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan III TA 2024	1	10	-	2	3	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
460	2024	Pemantauan	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.421/ITJ.2HP.550/X/2024	Hasil Pemantauan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan III Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal (Dijen) Perikanan Perikanan Tangkap	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	PROSES	
461	2024	Reviu	SURAT	PPS BELAWAN	R.438/ITJ.2HP.380/X/2024	Hasil Reviu Usulan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Instalasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	2	2	-	1	4	-	1	1	-	-	-	TUNTAS	
462	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.439/ITJ.2HP.380/X/2024	Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Definitif Tahun 2025 Lingkup Dijen Perikanan Tangkap	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
463	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.440/ITJ.2HP.380/X/2024	Hasil Reviu atas Pemohonan Penghapusan Barang Milik Negara dengan cara Pemusnahan pada PPS Blitung di Prov. DKI Jakarta	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
464	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.450/ITJ.2HP.380/X/2024	Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara dengan Cara Pemusnahan pada Satker Direktorat Kepelabuhan Perikanan Dijen Perikanan Tangkap	1	1	-	5	5	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
465	2024	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	R.464/ITJ.2HP.470/X/2024	Hasil Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKKE) Tahun 2023 - 2024 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	5	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
466	2024	Audit	BAB	DIT KAPI	R.465/ITJ.2HP.130/X/2024	Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Alat Penangkapan Ikan dan Mesin Kapal Penangkap Ikan Secara Elektronik pada Direktorat Kapal Perikanan dan	1	4	-	2	3	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
467	2024	Reviu	SURAT	DIT KAPI	R.470/ITJ.2HP.240/X/2024	Alat Penangkapan Ikan	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	PROSES
468	2024	Pemantauan	SURAT	DIT PP	R.476/ITJ.2HP.550/X/2024	Hasil Pemantauan Tidak Lanjut DG Sante Triwulan III pada Direktorat Kepelabuhan Perikanan	1	2	-	4	9	-	1	1	-	-	-	TUNTAS	
469	2024	Evaluasi	BAB	DIT PSDI	R.487/ITJ.2HP.470/X/2024	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah Global Environment Facilities (GEF) 6 Tahun 2024 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	4	9	-	2	3	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
470	2024	Evaluasi	BAB	SEKRETARIAT DJPT	R.530/ITJ.2HP.470/XII/2024	Hasil Evaluasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Dijen Perikanan Tangkap Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta	2	3	-	-	4	17	-	-	-	-	-	PROSES	
471	2024	Reviu	SURAT	DIT PSDI	R.568/ITJ.2HP.470/XI/2024	Hasil Evaluasi Kegiatan Rekomendasi Kebijakan dari Hasil Pengalihan Data Pemantauan Observer di atas Kapal Perikanan	8	22	-	1	2	-	4	5	-	-	-	TUNTAS	
472	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.589/ITJ.2HP.380/XI/2024	Hasil Reviu atas Puting Macet pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
473	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.591/ITJ.2HP.380/XI/2024	Hasil Reviu atas Koreksi Perbedaan Luas Lahan antara SIMAN dan Sertifikat Kepemilikan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong	1	3	-	1	5	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
474	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.596/ITJ.2HP.380/XI/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV pada Dijen Perikanan Tangkap	1	5	-	3	6	-	-	-	-	-	-	PROSES	
475	2024	Reviu	SURAT	DIT PP	R.606/ITJ.2HP.130/XI/2024	Hasil Proby Audit Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan le Meulee Senta Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang Provinsi Aceh	4	8	-	2	5	-	1	2	-	-	-	TUNTAS	
476	2024	Evaluasi	SURAT	DIT PDK	R.609/ITJ.2HP.470/XI/2024	Hasil Evaluasi Kegiatan Pengembangan Korporasi Nelayan pada Dijen Perikanan Tangkap TA. 2024	2	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	TUNTAS	
477	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.615/ITJ.2HP.380/XII/2024	Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PHK) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
478	2024	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.611/ITJ.2HP.380/XI/2024	Reviu Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	TUNTAS	
479	2025	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.141/ITJ.2HP.380/V/2025	Hasil Reviu atas Laporan Pengelolaan Kas Bendahara Akhir Tahun 2024 Lingkup Dijen Perikanan Tangkap	1	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
480	2025	Reviu	SURAT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	R.33/ITJ.2HP.380/V/2025	Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan BMN karena Sebab-Sebab Lain berupa Keadaan Kahar (Force Majeure) pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	1	3	-	1	1	-	4	-	-	-	-	TUNTAS	
481	2025	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.37/ITJ.2HP.380/V/2025	-	1	4	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	PROSES
482	2025	Reviu	SURAT	DIT PP	R.46/ITJ.2HP.380/V/2025	Hasil Reviu atas Pemohonan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Struktur Sewall Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Msa	1	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
483	2025	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.56/ITJHP.380/V/2025	Hasil Reviu Laporan Keuangan TA 2024 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	7	-	1	1	-	1	1	-	1	1	TUNTAS	
484	2025	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.65/ITJHP.380/V/2025	Hasil Reviu atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS	
485	2025	Reviu	SURAT	DIT PP	R.99/ITJ.2HP.380/V/2025	Hasil Reviu Dokumen Kualifikasi Tender Pekerjaan Konstruksi PPN Pengembangan dan Pekerjaan Konstruksi PPN Kajawanan	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENDING	
486	2025	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.140/ITJ.2HP.380/V/2025	Hasil Reviu atas Usulan Pemohonan Penghapusan Barang Milik Negara dengan Cara Pemusnahan pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENDING	
487	2025	Reviu	SURAT	DIT PP	B.150/ITJ.2HP.380/V/2025	Hasil Reviu atas Pemohonan COO Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan le Meulee SKPT Sabang Provinsi Aceh	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	PENDING	
488	2025	Reviu	BAB	SEKRETARIAT DJPT	R.174/ITJ.2HP.380/V/2025	Hasil Reviu Dokumen Usulan Anggaran Biaya Tambahan untuk Kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025	2	3	-	-	-	-	2	3	-	-	-	PENDING	
489	2025	Pemantauan	BAB	DIT PP	R.183/ITJ.2HP.550/V/2025	Hasil Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan le Meulee Senta Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025	4	9	-	-	-	-	4	9	-	-	-	TUNTAS	
490	2025	Reviu	SURAT	SEKRETARIAT DJPT	R.194/ITJ.2HP.380/V/2025	Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	TUNTAS	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

15 Juli 2025

Nomor : B. 2761 /DJPT.1/TU.410/VII/2025
Hal : Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama IP ASN
Semester I Tahun 2025 lingkup DJPT
Lampiran : 1 Berkas

Yth. Kepala UPT dan Balai lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
di
Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor : B.1105/SJ.3/TU.140/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Semester I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, berdasarkan hasil closing pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 10 Juli 2025 yaitu **84,93 (Kategori Tinggi)** terdiri dari **Kualifikasi 22,61 Kompetensi 30.54, Kinerja 26,78 dan Disiplin 5.**
2. Nilai Capaian IP ASN Semester I Tahun 2025 sebesar **84.93 (Kategori Tinggi)** sudah melebihi dari target Semester I sebesar 82.00. Optimalisasi dapat diperkuat pada dimensi Kompetensi atau Diklat pada Semester II Tahun 2025 dengan Target sebesar **87.00 (Kategori Tinggi)**. Capaian Pengukuran IP ASN bagi Unit Kerja yang belum mencapai target (daftar terlampir), agar mengupayakan peningkatan nilai IP ASN dengan melakukan peremajaan pada Aplikasi MyASN BKN.
3. Peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada Aplikasi MyASN masing masing pegawai diperlukan sebagai salah satu dimensi yang mempengaruhi nilai capaian IP ASN, terdapat perubahan perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional pada saat pegawai melakukan *update* data pada **Riwayat Sertifikasi** di menu "kursus" dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai yang mempengaruhi nilai IP ASN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran I

Nomor : B. 2761/ DJPT.1/TU.140/VII/2025

Tanggal : 15 Juli 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	93	22.69	90.76 %	27.35	68.38 %	25.48	84.93 %	5	100 %	80.52	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	57	22.54	90.16 %	25.98	64.95 %	25.79	85.97 %	4.95	99 %	79.26	SEDANG
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	66	23.64	94.56 %	28.73	71.83 %	27.5	91.67 %	5	100 %	84.86	TINGGI
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	70	23.43	93.72 %	26.89	67.22 %	25.5	85 %	5	100 %	80.82	SEDANG
5	DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN	32	22.97	91.88 %	28.28	70.7 %	26.56	88.53 %	5	100 %	82.81	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	73	22.95	91.8 %	29.68	74.2 %	26.64	88.8 %	5	100 %	84.27	TINGGI
7	DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	30	23	92 %	23.58	58.95 %	25.5	85 %	5	100 %	77.08	SEDANG
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA	82	22.74	90.96 %	28.39	70.97 %	27.32	91.07 %	5	100 %	83.45	TINGGI
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	72	23.26	93.04 %	32.6	81.5 %	27.29	90.97 %	5	100 %	88.15	TINGGI
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	77	22.27	89.08 %	29.26	73.15 %	26.88	89.6 %	5	100 %	83.42	TINGGI
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	50	22.3	89.2 %	33.58	83.95 %	27.5	91.67 %	5	100 %	88.38	TINGGI
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	67	22.09	88.36 %	26.08	65.2 %	27.54	91.8 %	5	100 %	80.71	SEDANG
13	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	48	23.65	94.6 %	30.34	75.85 %	26.98	89.93 %	5	100 %	85.97	TINGGI
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	55	22.64	90.56 %	29.1	72.75 %	26.91	89.7 %	5	100 %	83.65	TINGGI
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	55	22.18	88.72 %	32.99	82.48 %	27.64	92.13 %	5	100 %	87.8	TINGGI

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	45	22.44	89.76 %	28.51	71.28 %	26.89	89.63 %	5	100 %	82.84	TINGGI
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	63	21.98	87.92 %	34.88	87.2 %	27.22	90.73 %	5	100 %	89.09	TINGGI
18	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	45	22.11	88.44 %	34.81	87.03 %	25.56	85.2 %	5	100 %	87.47	TINGGI
19	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	59	22.29	89.16 %	30.79	76.97 %	27.46	91.53 %	5	100 %	85.54	TINGGI
20	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	39	22.31	89.24 %	28.13	70.32 %	27.18	90.6 %	5	100 %	82.62	TINGGI
21	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	62	21.61	86.44 %	36.69	91.72 %	27.34	91.13 %	5	100 %	90.64	TINGGI
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	65	22.69	90.76 %	29.96	74.9 %	27.38	91.27 %	5	100 %	85.03	TINGGI
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	63	22.38	89.52 %	34.96	87.4 %	27.3	91 %	5	100 %	89.64	TINGGI
24	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	46	22.72	90.88 %	31.34	78.35 %	25.65	85.5 %	5	100 %	84.71	TINGGI
25	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	41	22.07	88.28 %	33.05	82.63 %	25.61	85.37 %	5	100 %	85.74	TINGGI
26	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	52	22.4	89.6 %	33.51	83.78 %	27.5	91.67 %	5	100 %	88.42	TINGGI
27	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	39	23.08	92.32 %	32.76	81.9 %	27.44	91.47 %	5	100 %	88.27	TINGGI
28	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	28	23.04	92.16 %	34.87	87.17 %	25.71	85.7 %	5	100 %	88.62	TINGGI
29	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	27	21.85	87.4 %	33.61	84.02 %	25.56	85.2 %	5	100 %	86.02	TINGGI

No	Nama	NIP	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		Total	Keterangan	Update
			Tk. Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP			
1	IMAS MASRIAH	197504142002122003	S-2	25	25				1.5	26.5	SANGAT BAIK		0	5	86.5	TINGGI	2025-07-01
2	SIGIT PURWOKO	198601222009121001	S-2	25	25	10				35	SANGAT BAIK		0	5	95	SANGAT TINGGI	2025-07-01
3	ADI SURYANTO	199809142024211001	D-III	25	20					20	BAIK		0	5	75	SEDANG	2025-07-01
4	KRISTIAN LAMBERTH KORANO	199005132024211004	D-III	25	20					20	BAIK		0	5	75	SEDANG	2025-07-01
5	TAUFIK HIDAYAT	197508312024211001	S-1	20	20					20	BAIK		0	5	70	RENDAH	2025-07-01
6	YATIM KURNIADI	197007271997021002	S-2	25	25				5	30	SANGAT BAIK		0	5	90	TINGGI	2025-07-01
7	NARSUN	197311181998031002	S-2	25	25		10		2	37	SANGAT BAIK		0	5	97	SANGAT TINGGI	2025-07-01
8	KHOIRUL ANAM	196904021997031002	D-III	25	20		10		5	35	BAIK		0	5	90	TINGGI	2025-07-01
9	SRI RAHAYU	196901061994032006	D-II/D-I/SMA	20	20		10		5	35	BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
10	ANGGORO HARI SAPTO	197201071993031002	S-1	20	20		10		5	35	BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
11	AGUNG PRASTYO	197809242003121001	D-III	25	25				5	30	SANGAT BAIK		0	5	90	TINGGI	2025-07-01
12	ERWIN NURHUDA	197512072000031001	S-1	20	15		10		5	30	BUTUH PERBAIKAN		0	5	75	SEDANG	2025-07-01
13	YAN LUBY WIDRIYANTI	198701122010122004	S-1	20	25		10		2	37	SANGAT BAIK		0	5	92	SANGAT TINGGI	2025-07-01
14	NURUL FAJRI AL CHUSAENI	197401032002121001	D-III	25	25		10		5	40	SANGAT BAIK		0	5	100	SANGAT TINGGI	2025-07-01
15	DANIEL WAHYU SETYAWAN	197110312000031002	S-1	20	25				5	30	SANGAT BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
16	ABDUL IMAN	198303152009011002	S-2	25	25		10		5	40	SANGAT BAIK		0	5	100	SANGAT TINGGI	2025-07-01
17	LUTFI ATIKOH	198211142003122001	S-1	20	25				5	30	SANGAT BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
18	SULIS KURNIYAWATI	197305161994032001	S-1	20	25		10		5	40	SANGAT BAIK		0	5	95	SANGAT TINGGI	2025-07-01
19	CUCU SUPARI MUNTARSO	197007052000031004	D-II/D-I/SMA	20	25		10		5	40	SANGAT BAIK		0	5	95	SANGAT TINGGI	2025-07-01
20	YUSVI WIDYA ARDIANA	198404262015031002	S-1	20	20				5	25	BAIK		0	5	75	SEDANG	2025-07-01
21	FANNY JATMIKE	198602262015032004	S-1	20	20		10		5	35	BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
22	SITI NURFAIDAH	197311081998032001	D-II/D-I/SMA	20	20		10		5	35	BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
23	RISTA TRI PURNASARI	199803042022032008	S-1	20	25		10		5	40	SANGAT BAIK		0	5	95	SANGAT TINGGI	2025-07-01
24	AGUNG FERIEGHA NUGROHO	198302082009011005	D-II/D-I/SMA	20	20		10		3	33	BAIK		0	5	83	TINGGI	2025-07-01
25	HENDRIYANTO	197912112006041005	D-III	25	25				5	30	SANGAT BAIK		0	5	90	TINGGI	2025-07-01
26	NUANSA ARQOMI	199003152020121002	S-1	20	20		10		5	35	BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
27	YAYUK ERMA SURYANI	197610011998032001	D-II/D-I/SMA	20	20		10			30	BAIK		0	5	80	SEDANG	2025-07-01
28	ARIE NURFITA	199501272019022007	S-1	20	25		10		5	40	SANGAT BAIK		0	5	95	SANGAT TINGGI	2025-07-01
29	MULUD SUBARCAH	197503152009121003	S-1	25	20		10		5	35	BAIK		0	5	90	TINGGI	2025-07-01
30	SUCI MONICA	199601132020122002	D-III	25	25		10		5	40	SANGAT BAIK		0	5	100	SANGAT TINGGI	2025-07-01
31	DIAN PRIHANTARA	198702252008011003	D-II/D-I/SMA	20	20		10		5	35	BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
32	TITI MARLINAWATI	198903152008012001	D-II/D-I/SMA	20	20		10		3	33	BAIK		0	5	83	TINGGI	2025-07-01
33	WELLY YUNianto	199006252022031003	D-III	25	25		10		5	40	SANGAT BAIK		0	5	100	SANGAT TINGGI	2025-07-01
34	DANDY ASTIYAGUS	198008252008111001	D-II/D-I/SMA	20	20		10		5	35	BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
35	ISKANDAR	199212172019021004	S-1	25	20		10		5	35	BAIK		0	5	90	TINGGI	2025-07-01
36	MARCELINUS PADANG WICAKSONO	199505022023211007	D-III	25	20					20	BAIK		0	5	75	SEDANG	2025-07-01
37	ILHAM AFFANDI AJI	198409112023211011	D-III	25	20					20	BAIK		0	5	75	SEDANG	2025-07-01
38	EDI KUSNADI	198404102023211016	D-II/D-I/SMA	20	20			10	2.25	32.25	BAIK		0	5	82.25	TINGGI	2025-07-01
39	HENDRAWAN	198104272022211001	D-II/D-I/SMA	20	20				5	25	BAIK		0	5	75	SEDANG	2025-07-01
40	SARASWATI DEWI	199706032023212016	D-II/D-I/SMA	20	20					20	BAIK		0	5	70	RENDAH	2025-07-01
41	DARNO	197609042023211005	D-II/D-I/SMA	20	20					20	BAIK		0	5	70	RENDAH	2025-07-01
42	SUJUD SIAMSYAH	198704142022211001	D-II/D-I/SMA	20	20					20	BAIK		0	5	70	RENDAH	2025-07-01
43	ASTRI FILIANA SOLEHA	199508012023212031	D-II/D-I/SMA	20	20					20	BAIK		0	5	70	RENDAH	2025-07-01
44	DADI MULYAWAN	198710032023211016	D-II/D-I/SMA	20	20					20	BAIK		0	5	70	RENDAH	2025-07-01
45	TRIANANDA PRASETYO	198412222023211011	S-1	25	25					25	SANGAT BAIK		0	5	85	TINGGI	2025-07-01
46	ADIB BUDI PRABOWO	198703212023211012	S-1	25	25				5	30	SANGAT BAIK		0	5	90	TINGGI	2025-07-01
47	SIGIT ARI WIDJAYA	199308042023211010	S-1	25	20					20	BAIK		0	5	75	SEDANG	2025-07-01

48	GENTA FADILAH AKBAR	199212282023211017	S-1	25	25				25	SANGAT BAIK	0	5	85	TINGGI	2025-07-01
49	TRI AJENG PRATIWI	199108142023212037	S-1	25	25				25	SANGAT BAIK	0	5	85	TINGGI	2025-07-01
50	DICKY SETYA RACHMAWAN	199510212023211012	S-1	25	20				20	BAIK	0	5	75	SEDANG	2025-07-01
51	AHMAD ABROR	198502042022211001	S-1	25	20				20	BAIK	0	5	75	SEDANG	2025-07-01
52	SAIFUDIN	199103242023211016	S-1	25	25				25	SANGAT BAIK	0	5	85	TINGGI	2025-07-01
53	NUGROHO WAHYU KUSUMO	198407242022211001	S-1	25	25				25	SANGAT BAIK	0	5	85	TINGGI	2025-07-01
54	WISDA ANGGARA PUTRA	199107222022211002	S-1	25	20			5	25	BAIK	0	5	80	SEDANG	2025-07-01
55	KUSHARTANTO AHMAD SANTOSA	197603252002121002	S-2	25	25			5	30	SANGAT BAIK	0	5	90	TINGGI	2025-07-01
56	JULIA KOMALASARI	198007212010122001	S-1	25	25		10	5	40	SANGAT BAIK	0	5	100	SANGAT TINGGI	2025-07-01
57	EKO SUROSO	197203022000031005	S-1	25	20				20	BAIK	0	5	75	SEDANG	2025-07-01
58	ESTI PREMANA	198503172008012003	D-III	25	25				25	SANGAT BAIK	0	5	85	TINGGI	2025-07-01
59	TURWAHYUNI	198702272009012002	D-III	25	25			5	30	SANGAT BAIK	0	5	90	TINGGI	2025-07-01
60	ANANG SUPRIATMAJA	198505082009011001	D-III	25	25				25	SANGAT BAIK	0	5	85	TINGGI	2025-07-01
61	SOHARI	197012092000031002	S-1	25	20			1.25	21.25	BAIK	0	5	76.25	SEDANG	2025-07-01
62	ALI YAHMAN	198603222010121001	D-III	25	20			5	25	BAIK	0	5	80	SEDANG	2025-07-01
63	SIWAN	197404262000031003	D-II/D-I/SMA	20	25				25	SANGAT BAIK	0	5	80	SEDANG	2025-07-01
64	LYDIA DESMANIAR	198812082011012005	S-1	25	20		10	5	35	BAIK	0	5	90	TINGGI	2025-07-01
65	WARDOYO PURWO ISMOYO	196712241998031001	D-II/D-I/SMA	20	20				20	BAIK	0	5	70	RENDAH	2025-07-01
66	JOKO SULISTIONO	196810071994031004	D-II/D-I/SMA	20	20				20	BAIK	0	5	70	RENDAH	2025-07-01
67	SISWOYO	197406032000031002	D-II/D-I/SMA	20	20			5	25	BAIK	0	5	75	SEDANG	2025-07-01
68	SYAHBUDIN	197103031998031005	D-II/D-I/SMA	20	20				20	BAIK	0	5	70	RENDAH	2025-07-01
69	SENTOT ANDARJOTO	197204041999031004	D-II/D-I/SMA	20	20			5	25	BAIK	0	5	75	SEDANG	2025-07-01
70	SUTANTO	197009111998031002	D-II/D-I/SMA	20	20				20	BAIK	0	5	70	RENDAH	2025-07-01
71	AHMAD SURADI	196904162000031006	D-II/D-I/SMA	20	20				20	BAIK	0	5	70	RENDAH	2025-07-01
72	YUSUF KURNIAWAN	198112182008011012	D-III	25	15				15	BUTUH PERBAIKAN	0	5	65	RENDAH	2025-07-01
73	WARISMANTO	197208122000031003	D-II/D-I/SMA	20	25				25	SANGAT BAIK	0	5	80	SEDANG	2025-07-01
74	SUMITRO	197610101998031005	D-II/D-I/SMA	20	25			5	30	SANGAT BAIK	0	5	85	TINGGI	2025-07-01
75	N A S A M	197905101998031002	D-II/D-I/SMA	20	20		10	3	33	BAIK	0	5	83	TINGGI	2025-07-01
76	PURNOMO	197206081998031005	SMP/SD	10	20				20	BAIK	0	5	60	SANGAT RENDAH	2025-07-01
77	SLAMET ISMUDI	196707072014061001	SMP/SD	10	20				20	BAIK	0	5	60	SANGAT RENDAH	2025-07-01

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 86/SJ.7/PL.410/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 9 Juli 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 148 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 10 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 09.30 WIB, masih terdapat 2 (dua) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH TERUMUMKAN dan BELUM MENGUMUMKAN di dalam aplikasi SIRUP (sebagaimana terlampir), antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus persentase 0,00%

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya persentase 100,81%

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat segera melakukan koreksi perbaikan terhadap persentase tersebut agar menjadi persentase wajar.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Sofiyanto

Ditandatangani
Secara Elektronik

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 86/SJ.7/PL.410/VII/2025
 Tanggal : 9 Juli 2025

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
 PENGADAAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumumkan	76.00%	99.85%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumumkan	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

C	DITJEN PERIKANAN TANGKAP		1,978,583,640,800	1,975,572,169,800	1,975,572,149,800	3,011,491,000	99.85%
1	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,972,735,000	15,972,735,000	15,972,735,000	-	100.00%
2	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	219,592,991,000	219,592,991,000	219,592,991,000	-	100.00%
3	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,685,697,000	3,685,697,000	3,685,697,000	-	100.00%
4	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	435,112,613,000	435,112,613,000	435,112,613,000	-	100.00%
5	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3,940,604,800	3,940,604,800	3,940,604,800	-	100.00%
6	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,949,994,000	4,949,994,000	4,949,994,000	-	100.00%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	1,922,347,000	1,922,347,000	1,922,347,000	-	100.00%
8	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,003,286,000	2,003,286,000	2,003,286,000	-	100.00%
9	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	3,196,346,000	3,196,346,000	3,196,346,000	-	100.00%
10	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	6,498,030,000	6,498,030,000	6,498,030,000	-	100.00%
11	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,877,458,000	2,877,458,000	2,877,458,000	-	100.00%
12	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,011,491,000	3,011,491,000	-	3,011,491,000	0.00%
13	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000	2,200,792,000	2,200,792,000	-	100.00%
14	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000	2,089,461,000	2,089,461,000	-	100.00%
15	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,313,949,000	59,313,949,000	59,313,949,000	-	100.00%
16	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	36,040,719,000	36,040,719,000	36,040,719,000	-	100.00%
17	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,959,181,000	1,959,181,000	1,959,181,000	-	100.00%
18	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	3,708,065,000	3,708,065,000	3,708,065,000	-	100.00%
19	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	100.00%
20	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,806,316,000	2,806,316,000	2,806,316,000	-	100.00%
21	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,195,671,000	3,195,671,000	3,195,671,000	-	100.00%
22	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,874,832,000	1,874,832,000	1,874,832,000	-	100.00%
23	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,215,163,000	1,215,163,000	1,215,163,000	-	100.00%
24	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000	2,884,668,000	2,884,668,000	-	100.00%

 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

D	DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA		1,022,674,212,069	1,029,878,925,069	1,029,924,292,069	(7,250,080,000)	100.71%
1	632462	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	893,006,650,069	900,256,730,069	900,256,730,069	(7,250,080,000)	100.81%
2	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	41,051,068,000	41,005,701,000	41,051,068,000	-	100.00%
3	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000	11,611,482,000	11,611,482,000	-	100.00%
4	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	6,382,408,000	6,382,408,000	6,382,408,000	-	100.00%
5	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	7,843,216,000	7,843,216,000	7,843,216,000	-	100.00%
6	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,855,811,000	4,855,811,000	4,855,811,000	-	100.00%
7	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	8,938,057,000	8,938,057,000	8,938,057,000	-	100.00%
8	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000	8,049,166,000	8,049,166,000	-	100.00%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	5,836,021,000	5,836,021,000	5,836,021,000	-	100.00%
10	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	3,033,050,000	3,033,050,000	3,033,050,000	-	100.00%
11	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,414,717,000	7,414,717,000	7,414,717,000	-	100.00%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,743,509,000	6,743,509,000	6,743,509,000	-	100.00%
13	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGSEM	7,324,563,000	7,324,563,000	7,324,563,000	-	100.00%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000	1,253,261,000	1,253,261,000	-	100.00%
15	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,982,403,000	3,982,403,000	3,982,403,000	-	100.00%
16	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	5,348,830,000	5,348,830,000	5,348,830,000	-	100.00%



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sofiyanto

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

K/L/PD:	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Satuan Kerja:	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
PA/KPA	Imas Masriah, S.Pi. 197504142002122003

**Data yang terdapat pada berkas ini dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP pada tanggal 03-07-2025 16:08:11. Berkas ini berisi data paket-paket Rencana Umum Pengadaan yang telah diisi melalui sirup, baik yang sudah diumumkan atau pun yang masih berupa draf. Untuk melihat paket yang telah terumumkan dan lebih terbaru silakan kunjungi link ini <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/swakelola/satker/14465> dan http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyedia_satker/satker/14465*

1. Paket Penyedia

1.1. Paket Penyedia Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943251	52_Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Pakaian Dinas Pegawai/perawat dan Atribut pakaian dinas_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Atribut pakaian dinas	E-Purchasing	5.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943769	52_Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 Tahun_RM	APBN, APBN, APBN, APBN, APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Bahan Cetakan (12, BULAN, @ 3000000); 2. ATK (12, BULAN, @ 5000000); 3. Bahan Komputer (12, BULAN, @ 4000000); 4. Alat Rumah Tangga Kantor (12, BULAN, @ 3000000); 5. Materai (12, BULAN, @ 500000);	Pengadaan Langsung	137.023.800

[illegible]

8	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943215	52_Pelumas dan Bahan Bakar Minyak Ekskavator 1 Tahun_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Tahun TKDN: Ya 1. Pelumas dan Bahan Bakar Minyak Ekskavator (1, TAHUN, @ 31064000);	Pengadaan Langsung	23.227.000
9	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943222	52_Pelumas dan bahan bakar minyak genset 1 tahun_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Tahun TKDN: Ya 1. Pelumas dan bahan bakar minyak genset (1, TAHUN, ;	Pengadaan Langsung	14.200.000
10	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	59044200	52_Pemeliharaan bangunan gedung kantor permanen, Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Pelayanan) serta Pemeliharaan Bangunan TPI Permanen A dan Bangunan TPI Permanen B_RM	APBN, APBN, APBN, APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 paket TKDN: Ya 1. Pemeliharaan bangunan gedung kantor permanen 2. Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Pelayanan) 3. Bangunan TPI Permanen A 4. Bangunan TPI Permanen B	Pengadaan Langsung	84.009.000
11	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943483	52_Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Tengah)_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(9600, OH, @ 19000) TKDN: Ya 1. Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Tengah) (9600, OH, @ 19000);	Pengadaan Langsung	14.719.000
12	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943650	52_Pengadaan Jasa Lainnya Outsourcing Satpam_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Outsourcing Satpam (1, TAHUN,	E-Purchasing	1.238.160.000
13	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	56953948	52-Pengadaan Jasa Lainnya Outsourcing Sekretaris_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(1, TAHUN, @ 69698000) TKDN: Ya 1. Outsourcing sekretaris (1, TAHUN, @ 69698000);	Pengadaan Langsung	69.698.000
14	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943531	52_Pengadaan Jasa Lainnya Pengemudi Operasional_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(1, TAHUN, TKDN: Ya 1. Outsourcing Driver (1, TAHUN,	Pengadaan Langsung	52.902.000
15	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	54009704	Belanja Bahan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. ATK (1, PAKET, @ 400000);	Pengadaan Langsung	400.000

16	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	59933766	Belanja Bahan Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH	Pengadaan Langsung	4.260.000
17	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	59931140	Belanja Bahan Forum Konsultasi Publik dan KPI_RM	APBN, APBN, APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Makan rapat (90, OK, @ 42000); 2. Snack rapat (90, OK, @ 16000); 3. Spanduk (1, BUAH, @ 300000);	Pengadaan Langsung	6.020.000
18	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	59933732	Belanja Bahan Laporan Keuangan dan BMN_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH	Pengadaan Langsung	2.840.000
19	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	59933529	Belanja Bahan Laporan Program dan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. ATK (1, PAKET,	Pengadaan Langsung	640.000
20	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	59931251	Belanja Bahan Penggandaan Laporan Statistik Tahunan_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Penggandaan Laporan Statistik Tahunan ;	Pengadaan Langsung	8.500.000
21	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	59933804	Belanja Bahan Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan BMN_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH (80, OK, @ 55000); 2. Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH (80, OK, @ 16000); 3. Seminar Kit (80, PAKET, @ 207500);	Pengadaan Langsung	22.280.000
22	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943546	Biaya pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(12, BULAN, TKDN: Ya 1. Biaya pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas (12, BULAN,	Dikecualikan	27.000.000

23	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	54009236	Biaya Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(12, BULAN, @ 100000) TKDN: Ya 1. Biaya Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan (12, BULAN, @ 100000);	Dikecualikan	1.200.000
24	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943515	Jamuan Tamu_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(12, BULAN, @ 5000000) TKDN: Ya 1. Jamuan Tamu (12, BULAN, @ 5000000);	Pengadaan Langsung	30.000.000
25	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943489	Jasa Langganan air	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(12, BULAN, @ 6000000) TKDN: Ya 1. Langganan air (12, BULAN, @ 6000000);	Dikecualikan	30.000.000
26	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943379	Langganan air mineral (1 Tahun)_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(12, BULAN, @ 3500000) TKDN: Ya 1. Langganan air mineral (12, BULAN, @ 3500000);	Pengadaan Langsung	34.500.000
27	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943540	Langganan Listrik_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(12, BULAN, TKDN: Ya 1. Langganan Listrik (12, BULAN,	Dikecualikan	320.000.000
28	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943511	Langganan telepon_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(12, BULAN, @ 250000) TKDN: Ya 1. Langganan telepon (12, BULAN, @ 250000);	Pengadaan Langsung	2.251.000
29	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	54009204	Pelumas dan bahan bakar minyak potong rumput 1 Tahun_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Tahun TKDN: Ya 1. Pelumas dan bahan bakar minyak potong rumput (1, Tahun, @ 10000000);	Pengadaan Langsung	10.000.000
30	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943332	Pemeliharaan Jaringan Instalasi air bersih/air baku lainnya (SWRO)_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Instalasi air bersih/air baku lainnya (SWRO) (300, m2, @ 97000);	Pengadaan Langsung	10.573.000
31	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943304	Pemeliharaan Jaringan listrik Transmisi Tegangan 197 KVA_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Jaringan listrik Transmisi Tegangan 197 KVA (250, m2, @ 97000);	Pengadaan Langsung	10.767.000

32	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	56953055	Pengadaan Jasa Lainnya Outsourcing Petugas Kebersihan_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(1, TAHUN, @ 1187847000) TKDN: Ya 1. Outsourcing Petugas Kebersihan (1, TAHUN, @ 1187847000);	E-Purchasing	466.650.000
33	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	56953779	Pengadaan Jasa Lainnya Outsourcing Tenaga Pramubakti_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(1, TAHUN,) TKDN: Ya 1. Outsourcing Tenaga Pramubakti (1, TAHUN, 2 orang);	Pengadaan Langsung	103.116.000
34	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	54009211	Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference (1, TAHUN, @ 3500000);	Pengadaan Langsung	3.500.000
35	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	54009201	Restribusi sampah 1 tahun_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Tahun TKDN: Ya 1. Restribusi sampah (12, BULAN, @ 750000);	Dikecualikan	9.000.000
36	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap,	58943393	Rumah Tangga Kantor Keperluan Perkantoran (1 Tahun)_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:(12, BULAN, @ 8450000) TKDN: Ya 1. Rumah Tangga Kantor (12, BULAN, ;	Pengadaan Langsung	40.000.000
37	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	53921851	52_Belanja Jasa Lainnya Fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan Internalisasi peningkatan SDM dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi_PNBP	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan Internalisasi peningkatan SDM dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi;	Pengadaan Langsung	161.541.000
38	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	58957177	Belanja Bahan Diseminasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan_PNP	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Spanduk 2. Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH 3. Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH	Pengadaan Langsung	7.620.000

39	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	58956977	Belanja Bahan Operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sesuai SK.Dirjen di PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi_PNP	APBN, APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Makan Rapat Biasa JAWA BARAT 2. Snack Rapat Biasa JAWA BARAT 3. Spanduk (1, BUAH,	Pengadaan Langsung	5.660.000
40	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	58248351	Belanja Bahan Penanganan kebakaran, keselamatan dan keamanan kapal di Pelabuhan Perikanan Bagi Tim Internal dan Stakeholder_PNP	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Bahan-bahan pemadaman kebakaran (1, Paket, @ 6000000); 2. Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH (70, OK, @ 50000); 3. Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH (70, OK, @ 16000);	Pengadaan Langsung	3.500.000
41	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	53946914	Belanja Bahan Project Implementing Unit di PPS Cilacap (Kesekretariatan Pelaksanaan Proyek di PIU)_PLN	APBN, APBN, APBN, APBN, APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. ATK (1, PAKET, @ 1100000); 2. Snack Rapat (300, OK, @ 24200); 3. Bahan Komputer (1, PAKET, @ 1100000); 4. Penggandaan (1, PAKET, @ 1100000); 5. Makan Rapat (300, OK, @ 58300);	Pengadaan Langsung	25.500.000
42	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	58249484	Belanja Bahan Rompi Tahan Api Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Di Atas Kapal_PNP	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Rompi Tahan Api (1, BUAH, @ 948000);	Pengadaan Langsung	948.000
43	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	58246739	Belanja Barang Operasional Lainnya Penanganan kebakaran, keselamatan dan keamanan kapal di Pelabuhan Perikanan Bagi Tim Internal dan Stakeholder_PNBP	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Isi ulang APAR (144, Kg, @ 75000); 2. Perlengkapan dan Peralatan Keselamatan Kerja (1, PAKET, @ 6836000);	Pengadaan Langsung	5.400.000

44	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	58250808	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Pencetakan Blanko Kesyahbandaran di PP Cikidang_PNP	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Pencetakan Blanko Kesyahbandaran di PP Cikidang (10, Rim, @ 395000);	Pengadaan Langsung	1.500.000
45	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	58255799	Belanja Jasa Lainnya Pengadaan Tenaga Pendataan dalam menunjang pelaksanaan PNPB pasca produksi_PNP	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:4 orang TKDN: Ya 1. Pengadaan Tenaga Pendataan (52, OK, @ 2800000);	Pengadaan Langsung	109.200.000
46	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	53946916	Pengadaan Jasa Tenaga Pengadministrasi Project Implementing Unit di PPS Cilacap (Keseekretariatan Pelaksanaan Proyek di PIU)_PLN	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Pengadaan Jasa Tenaga Pengadministrasi (26, OJ, @ 3600000);	Pengadaan Langsung	93.600.000
47	Pengelolaan Sumber Daya Ikan,	58943120	Belanja Bahan Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 573 dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur di Zona Industri Perikanan RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH	Pengadaan Langsung	560.000
48	Pengelolaan Sumber Daya Ikan,	58943135	Belanja Bahan Pembinaan Nahkoda Dalam Pengisian Logbook_RM	APBN, APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Seminar Kit (40, PAKET, @ 101725); 2. Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH (40, OK, @ 16000); 3. Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH (40, OK, @ 50000);	Pengadaan Langsung	1.500.000
Total								3.940.604.800

1.2. Draf Paket Penyedia

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53947008	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		5.360.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53921852	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		17.030.000

3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53921853	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		27.400.000
4	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53921854	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		10.347.000
5	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53921855	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		3.800.000
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53946875	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		39.000.000
7	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53946876	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		10.000.000
8	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53946998	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		3.440.000
9	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53946999	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		12.369.000
10	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53947000	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		10.044.000
11	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53947001	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		68.847.000
12	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53947002	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		7.680.000
13	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53947003	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		20.350.000
14	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53947007	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		3.340.000
15	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53871522	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		11.360.000
16	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53920389	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		800.000
17	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53920392	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		10.720.000
18	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53920393	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		11.400.000
19	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53920394	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		5.212.000
20	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53920395	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		6.080.000
21	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53920396	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		3.180.000
22	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53921847	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		6.498.000

23	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53921850	Belanja Bahan	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		15.786.000
24	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53920391	Belanja Barang Operasional Lainnya	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		13.640.000
25	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53946877	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		3.053.000
26	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53920390	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		10.200.000
27	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53946881	Belanja Jasa Lainnya	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		12.900.000
28	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53921848	Belanja Jasa Lainnya	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		39.300.000
29	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53921849	Belanja Jasa Lainnya	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		16.500.000
30	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53921846	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		10.944.000
31	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53947005	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan Internalisasi peningkatan SDM dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBP Pasca Prod	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		199.810.000
32	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53946878	Pembuatan video profil PPS Cilacap	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		27.921.000
33	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53947004	Pembuatan video profil PPS Cilacap	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		7.079.000
34	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53946879	Pengembangan sistem pelayanan terpadu satu atap	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		35.000.000
35	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53947006	Sewa Bus dalam rangka kegiatan Internalisasi peningkatan SDM dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	APBN		Volume:null TKDN: Tidak		31.500.000

36	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	53919548	Blokir_Belanja Barang Non Operasional Lainnya Perlengkapan dan Peralatan lapangan Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi_PNP	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Perlengkapan dan Peralatan lapangan (1, Paket, @ 5000000);	Pengadaan Langsung	5.000.000
37	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan,	53946915	Pekerjaan Konstruksi Pengembangan PPS Cilacap_PLN	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Pekerjaan Konstruksi Pengembangan PPS Cilacap (1, PAKET, @ 116849000000);	Tender	116.849.000.000
Total								117.571.890.000



2. Paket Swakelola

2.1. Paket Swakelola Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
Total						0	

2.2. Draf Paket Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	38661558	Biaya Pengembangan, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional kegiatan Layanan Manajemen SDM_RM	APBN	Cilacap (Kab.)	Volume: (6, OK, @ 5000000) 1. Biaya Pengembangan, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional (6, OK, @ 5000000);	30.000.000
Total						30.000.000	

3. Paket Penyedia Dalam Swakelola

3.1. Paket Penyedia Dalam Swakelola Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	

3.2. Draf Paket Penvedia Dalam Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025

Tanggal : 09 Juli 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 2150/SJ.1/RC.610/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 sebesar 95,16 dari target nilai 84,00
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester I tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup unit kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS)**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Tugas Pengawasan Pengendalian Kebijakan Program Prioritas KKP
3. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.04	87.71	100.00	100.00	98.62	100.00	95.16	100%	0.00	95.16
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.76	17.54	10.00	10.00	9.86	25.00				
			Nilai Aspek	92.52		96.58				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	98.04	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.06	19.61	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	96.87		99.51				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	92.28	98.44	100.00	100.00	98.08	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.84	19.69	10.00	10.00	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	96.14		99.13				100.00				
3	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.87	95.93	100.00	100.00	100.00	100.00	97.97	100%	0.00	97.97
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.78	19.19	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	95.94		98.98				100.00				
4	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.52	97.06	100.00	100.00	97.48	100.00	97.59	100%	0.00	97.59
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.43	19.41	10.00	10.00	9.75	25.00				
			Nilai Aspek	94.76		98.64				100.00				
5	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.58	99.76	100.00	100.00	97.71	100.00	97.26	100%	0.00	97.26
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.54	19.95	10.00	10.00	9.77	25.00				
			Nilai Aspek	91.79		99.37				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	81.30	100.00	100.00	100.00	100.00	97.20	100%	0.00	97.20	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.20	20.00	10.00	10.00	10.00					25.00
			Nilai Aspek	90.65		100.00								100.00
7	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	83.71	97.99	100.00	100.00	99.52	100.00	97.11	100%	0.00	97.11
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.56	19.60	10.00	10.00	9.95	25.00				
			Nilai Aspek	91.86		99.38				100.00				
8	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	80.29	70.13	100.00	100.00	98.09	100.00	90.88	100%	0.00	90.88
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.04	14.03	10.00	10.00	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	90.15		92.06				100.00				
9	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	77.24	70.73	100.00	100.00	99.88	100.00	90.72	100%	0.00	90.72
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.59	14.15	10.00	10.00	9.99	25.00				
			Nilai Aspek	88.62		92.65				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

5	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
6	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
7	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
8	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
9	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
10	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

11	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
12	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
13	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
14	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
15	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
16	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.29	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

17	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
18	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
19	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
20	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.93	100.00	79.99	80%	0.00	99.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.97				100.00				
21	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.68	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.84				100.00				
22	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	99.95	100%	0.00	99.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

23	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.14	100.00	99.91	100%	0.00	99.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.78				100.00				
24	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.03	100.00	99.90	100%	0.00	99.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.76				100.00				
25	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	100.00	99.88	100%	0.00	99.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.70				100.00				
26	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.53	100.00	99.85	100%	0.00	99.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.63				100.00				
27	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.77	100.00	79.88	80%	0.00	99.85
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.39				100.00				
28	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.39	100.00	99.84	100%	0.00	99.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.60				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

29	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.31	100.00	99.83	100%	0.00	99.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.58				100.00				
30	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.26	100.00	79.83	80%	0.00	99.78
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				
31	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	97.81	100.00	89.78	90%	0.00	99.76
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.27				100.00				
32	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	97.65	100.00	79.77	80%	0.00	99.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.83				100.00				
33	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	100.00	99.49	0.00	0.00	98.59	100.00	79.76	80%	0.00	99.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.90	0.00	0.00	9.86	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.04				100.00				
34	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	98.53	100.00	0.00	100.00	100.00	89.71	90%	0.00	99.67
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.71	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

35	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	100.00	99.39	100.00	100.00	96.85	100.00	99.56	100%	0.00	99.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.88	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.06				100.00				
36	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.78	100.00	99.48	100%	0.00	99.48
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.70				100.00				
37	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.10	100.00	99.41	100%	0.00	99.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.52				100.00				
38	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	100.00	97.31	0.00	0.00	100.00	100.00	79.46	80%	0.00	99.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.46	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.66				100.00				
39	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.33	100.00	99.23	100%	0.00	99.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.08				100.00				
40	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.06	100%	0.00	99.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.06	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.87		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

41	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	93.23	100.00	100.00	100.00	100.00	98.98	100%	0.00	98.98	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	13.98	20.00	10.00	10.00	10.00					25.00
					Nilai Aspek	96.62		100.00								100.00
42	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	89.78	98.98	100%	0.00	98.98	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	8.98					25.00
					Nilai Aspek	100.00		97.44								100.00
43	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	94.80	100.00	0.00	0.00	99.48	79.17	80%	0.00	98.96	
					Bobot	10	15	20	0	0	10					25
					Nilai Akhir	10.00	14.22	20.00	0.00	0.00	9.95					25.00
					Nilai Aspek	97.40		99.74								100.00
44	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	92.60	100.00	100.00	100.00	99.85	98.88	100%	0.00	98.88	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	13.89	20.00	10.00	10.00	9.99					25.00
					Nilai Aspek	96.30		99.96								100.00
45	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	92.81	100.00	100.00	100.00	99.47	98.87	100%	0.00	98.87	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	10.00	10.00	9.95					25.00
					Nilai Aspek	96.41		99.87								100.00
46	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	90.62	79.06	80%	0.00	98.83	
					Bobot	10	15	20	0	0	10					25
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.06					25.00
					Nilai Aspek	100.00		95.31								100.00

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

47	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	94.07	100.00	0.00	0.00	99.31	100.00	79.04	80%	0.00	98.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	20.00	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	97.04		99.66				100.00				
48	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	93.38	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	79.01	80%	0.00	98.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.01	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.69		100.00				100.00				
49	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	91.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.55		100.00				100.00				
50	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	92.80	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.92	80%	0.00	98.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.40		100.00				100.00				
51	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.64	100%	0.00	98.64
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.46		100.00				100.00				
52	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	90.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.56	100%	0.00	98.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.56	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.19		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

53	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	90.74	99.74	100.00	100.00	99.60	100.00	98.52	100%	0.00	98.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	19.95	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	95.37		99.84				100.00				
54	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	94.60	98.59	100.00	100.00	95.99	100.00	98.51	100%	0.00	98.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	19.72	10.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	97.30		98.64				100.00				
55	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	90.96	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	88.64	90%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.48		100.00				100.00				
56	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	92.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.93	70%	0.00	98.47
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.43		100.00				100.00				
57	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	89.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.46	100%	0.00	98.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.88		100.00				100.00				
58	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	92.70	97.84	100.00	100.00	0.00	100.00	68.91	70%	0.00	98.44
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.35		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

59	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	92.47	99.29	0.00	0.00	100.00	100.00	78.73	80%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.87	19.86	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.24		99.65				100.00				
60	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	92.20	99.37	0.00	0.00	99.51	100.00	78.65	80%	0.00	98.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.83	19.87	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	96.10		99.44				100.00				
61	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	92.55	98.54	100.00	100.00	97.21	100.00	98.31	100%	0.00	98.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	19.71	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	96.28		98.94				100.00				
62	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	91.39	98.97	100.00	0.00	99.66	100.00	88.47	90%	0.00	98.30
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.71	19.79	10.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	95.70		99.54				100.00				
63	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.96	100.00	100.00	100.00	99.44	100.00	98.29	100%	0.00	98.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.34	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	94.48		99.86				100.00				
64	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	88.53	99.81	100.00	100.00	100.00	100.00	98.24	100%	0.00	98.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	19.96	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.27		99.95				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

65	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	88.38	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00	98.24	100%	0.00	98.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	19.98	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		99.98				100.00				
66	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	100.00	87.45	99.90	100.00	100.00	99.97	100.00	98.09	100%	0.00	98.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.12	19.98	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.73		99.97				100.00				
67	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	89.10	100.00	100.00	100.00	97.18	100.00	98.08	100%	0.00	98.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.37	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	94.55		99.30				100.00				
68	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	94.01	100.00	100.00	100.00	89.41	100.00	98.04	100%	0.00	98.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.10	20.00	10.00	10.00	8.94	25.00				
					Nilai Aspek	97.01		97.35				100.00				
69	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	89.84	99.52	0.00	0.00	100.00	100.00	78.38	80%	0.00	97.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.48	19.90	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.92		99.76				100.00				
70	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	86.53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.98	100%	0.00	97.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.27		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

71	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	88.60	98.13	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.63	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.30		99.53				100.00				
72	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.55	97.31	100.00	100.00	100.00	100.00	97.89	100%	0.00	97.89
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.43	19.46	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.78		99.33				100.00				
73	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	93.30	100.00	100.00	100.00	88.81	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.00	20.00	10.00	10.00	8.88	25.00				
					Nilai Aspek	96.65		97.20				100.00				
74	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	88.71	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.31	80%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.31	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.36		100.00				100.00				
75	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	88.75	100.00	0.00	0.00	99.81	100.00	78.29	80%	0.00	97.87
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.31	20.00	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.38		99.91				100.00				
76	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	85.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.84	100%	0.00	97.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.84	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.81		100.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

77	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	85.33	100.00	100.00	100.00	100.00	97.80	100%	0.00	97.80	
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.80	20.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	92.67		100.00								100.00
78	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.29	100.00	100.00	100.00	100.00	97.79	100%	0.00	97.79	
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.79	20.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	92.65		100.00								100.00
79	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	89.56	98.85	100.00	100.00	95.88	97.79	100%	0.00	97.79	
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.43	19.77	10.00	10.00	9.59					25.00
					Nilai Aspek	94.78		98.68								100.00
80	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	87.90	100.00	0.00	0.00	100.00	78.19	80%	0.00	97.73	
					Bobot	10	15	20	0	0	10					25
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	0.00	0.00	10.00					25.00
					Nilai Aspek	93.95		100.00								100.00
81	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	86.99	98.20	100.00	100.00	100.00	97.69	100%	0.00	97.69	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	13.05	19.64	10.00	10.00	10.00					25.00
					Nilai Aspek	93.50		99.55								100.00
82	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	93.11	100.00	0.00	0.00	91.05	78.07	80%	0.00	97.59	
					Bobot	10	15	20	0	0	10					25
					Nilai Akhir	10.00	13.97	20.00	0.00	0.00	9.10					25.00
					Nilai Aspek	96.56		95.52								100.00

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

83	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	100.00	90.86	0.00	0.00	98.68	100.00	78.04	80%	0.00	97.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.17	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		94.77				100.00				
84	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	85.15	98.42	100.00	100.00	100.00	100.00	97.46	100%	0.00	97.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.77	19.68	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.58		99.61				100.00				
85	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.45	94.59	0.00	0.00	99.73	100.00	77.91	80%	0.00	97.39
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	18.92	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	96.73		97.16				100.00				
86	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	86.48	97.09	100.00	100.00	100.00	100.00	97.39	100%	0.00	97.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	19.42	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		99.27				100.00				
87	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	82.58	100.00	100.00	100.00	99.89	100.00	97.38	100%	0.00	97.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.39	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	91.29		99.97				100.00				
88	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	86.72	100.00	100.00	99.60	100.00	97.30	100%	0.00	97.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	17.34	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.58				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

89	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	86.88	98.97	0.00	0.00	100.00	100.00	77.83	80%	0.00	97.28
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	19.79	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.44		99.49				100.00				
90	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	100.00	81.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.19	100%	0.00	97.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.63		100.00				100.00				
91	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	84.43	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.66	80%	0.00	97.08
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.66	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.22		100.00				100.00				
92	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	86.91	100.00	100.00	100.00	90.34	100.00	97.07	100%	0.00	97.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	20.00	10.00	10.00	9.03	25.00				
					Nilai Aspek	93.46		97.59				100.00				
93	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	86.91	96.60	100.00	0.00	100.00	100.00	87.36	90%	0.00	97.06
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	19.32	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.46		98.87				100.00				
94	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	85.49	100.00	100.00	100.00	92.09	100.00	97.03	100%	0.00	97.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	92.75		98.02				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

95	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	82.46	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.37	80%	0.00	96.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.37	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.23		100.00				100.00				
96	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	77.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.70	100%	0.00	96.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.70	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.99		100.00				100.00				
97	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	78.27	100.00	100.00	100.00	98.53	100.00	96.59	100%	0.00	96.59
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.74	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	89.14		99.63				100.00				
98	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.16	95.51	100.00	100.00	94.03	100.00	96.58	100%	0.00	96.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.07	19.10	10.00	10.00	9.40	25.00				
					Nilai Aspek	93.58		97.38				100.00				
99	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	83.01	100.00	0.00	0.00	97.73	100.00	77.22	80%	0.00	96.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.45	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	91.51		98.87				100.00				
100	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	78.47	100.00	100.00	100.00	97.17	100.00	96.49	100%	0.00	96.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.77	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	89.24		99.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

101	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	100.00	99.85	100.00	100.00	100.00	86.01	96.47	100%	0.00	96.47
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.97	10.00	10.00	10.00	21.50				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				86.01				
102	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	81.08	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.16	80%	0.00	96.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.16	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.54		100.00				100.00				
103	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	83.33	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	67.50	70%	0.00	96.43
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.67		100.00				100.00				
104	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	86.12	97.55	0.00	0.00	97.05	100.00	77.13	80%	0.00	96.42
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	19.51	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	93.06		97.30				100.00				
105	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	85.44	95.62	100.00	100.00	94.75	100.00	96.41	100%	0.00	96.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	19.12	10.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	92.72		97.59				100.00				
106	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	82.83	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	67.42	70%	0.00	96.32
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.42	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.42		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

107	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	81.97	98.76	0.00	0.00	100.00	100.00	77.05	80%	0.00	96.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.30	19.75	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.99		99.38				100.00				
108	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	89.90	100.00	0.00	0.00	85.57	100.00	77.04	80%	0.00	96.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	20.00	0.00	0.00	8.56	25.00				
					Nilai Aspek	94.95		92.79				100.00				
109	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	86.47	100.00	0.00	0.00	90.18	100.00	76.99	80%	0.00	96.24
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	20.00	0.00	0.00	9.02	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		95.09				100.00				
110	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	86.48	96.92	0.00	0.00	94.70	100.00	76.83	80%	0.00	96.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	19.38	0.00	0.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		95.81				100.00				
111	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	84.28	100.00	0.00	100.00	87.56	100.00	86.40	90%	0.00	96.00
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.64	20.00	0.00	10.00	8.76	25.00				
					Nilai Aspek	92.14		95.85				100.00				
112	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.41	100.00	0.00	0.00	89.87	100.00	76.80	80%	0.00	96.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.81	20.00	0.00	0.00	8.99	25.00				
					Nilai Aspek	92.71		94.93				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

113	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	84.22	100.00	0.00	0.00	90.82	100.00	76.71	80%	0.00	95.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.63	20.00	0.00	0.00	9.08	25.00				
					Nilai Aspek	92.11		95.41				100.00				
114	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	90.94	85.77	100.00	100.00	100.00	100.00	95.80	100%	0.00	95.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	17.15	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.47		96.44				100.00				
115	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	78.39	100.00	0.00	0.00	98.39	100.00	76.60	80%	0.00	95.75
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	0.00	0.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	89.20		99.20				100.00				
116	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	79.11	96.97	100.00	100.00	94.55	100.00	95.72	100%	0.00	95.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.39	10.00	10.00	9.46	25.00				
					Nilai Aspek	89.56		97.88				100.00				
117	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	82.68	100.00	0.00	0.00	90.36	100.00	76.44	80%	0.00	95.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.40	20.00	0.00	0.00	9.04	25.00				
					Nilai Aspek	91.34		95.18				100.00				
118	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	81.43	100.00	100.00	100.00	91.47	96.07	95.38	100%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.21	20.00	10.00	10.00	9.15	24.02				
					Nilai Aspek	90.72		97.87				96.07				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

119	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	75.93	99.26	0.00	0.00	100.00	100.00	76.24	80%	0.00	95.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	19.85	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.97		99.63				100.00				
120	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	76.48	100.00	0.00	0.00	96.90	100.00	76.16	80%	0.00	95.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.47	20.00	0.00	0.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	88.24		98.45				100.00				
121	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	73.48	95.86	100.00	100.00	99.75	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.02	19.17	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	86.74		98.90				100.00				
122	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	68.31	100.00	100.00	100.00	99.06	100.00	95.15	100%	0.00	95.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.25	20.00	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	84.16		99.76				100.00				
123	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	85.06	91.74	100.00	100.00	89.75	100.00	95.08	100%	0.00	95.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.76	18.35	10.00	10.00	8.98	25.00				
					Nilai Aspek	92.53		95.37				100.00				
124	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	84.96	100.00	0.00	0.00	100.00	91.25	75.56	80%	0.00	94.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.74	20.00	0.00	0.00	10.00	22.81				
					Nilai Aspek	92.48		100.00				91.25				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

125	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	90.98	100.00	100.00	100.00	93.54	84.93	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	20.00	10.00	10.00	9.35	21.23				
					Nilai Aspek	95.49		98.39				84.93				
126	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	78.23	98.87	0.00	0.00	88.52	100.00	75.36	80%	0.00	94.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.73	19.77	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	89.12		93.69				100.00				
127	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	80.61	100.00	100.00	100.00	67.63	100.00	93.85	100%	0.00	93.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	20.00	10.00	10.00	6.76	25.00				
					Nilai Aspek	90.31		91.91				100.00				
128	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	79.93	100.00	0.00	0.00	80.69	100.00	75.06	80%	0.00	93.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.99	20.00	0.00	0.00	8.07	25.00				
					Nilai Aspek	89.97		90.34				100.00				
129	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	82.99	95.37	100.00	100.00	100.00	87.67	93.44	100%	0.00	93.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.45	19.07	10.00	10.00	10.00	21.92				
					Nilai Aspek	91.50		98.84				87.67				
130	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	100.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.20	100%	0.00	93.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.20	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		91.50				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

131	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	88.29	71.46	100.00	100.00	99.75	100.00	92.51	100%	0.00	92.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	14.29	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.15		92.80				100.00				
132	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	100.00	60.09	100.00	100.00	100.00	100.00	92.02	100%	0.00	92.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	12.02	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		90.02				100.00				
133	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	94.20	100.00	0.00	0.00	100.00	77.31	73.46	80%	0.00	91.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	0.00	10.00	19.33				
					Nilai Aspek	97.10		100.00				77.31				
134	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	100.00	58.59	100.00	100.00	97.36	100.00	91.45	100%	0.00	91.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	11.72	10.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		88.99				100.00				
135	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	100.00	55.86	100.00	100.00	99.41	100.00	91.11	100%	0.00	91.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	11.17	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		88.82				100.00				
136	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	85.46	97.56	100.00	100.00	100.00	74.91	91.06	100%	0.00	91.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	19.51	10.00	10.00	10.00	18.73				
					Nilai Aspek	92.73		99.39				74.91				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

137	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	73.34	100.00	100.00	100.00	89.26	83.20	90.73	100%	0.00	90.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.00	20.00	10.00	10.00	8.93	20.80				
					Nilai Aspek	86.67		97.32				83.20				
138	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	84.45	69.62	100.00	0.00	100.00	100.00	81.59	90%	0.00	90.66
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.67	13.92	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.23		89.87				100.00				
139	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	55.90	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.39	70%	0.00	90.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.39	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.95		100.00				100.00				
140	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	74.12	72.15	100.00	100.00	100.00	100.00	90.55	100%	0.00	90.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.12	14.43	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.06		93.04				100.00				
141	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	55.48	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.32	70%	0.00	90.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.32	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.74		100.00				100.00				
142	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	100.00	51.95	100.00	100.00	100.00	100.00	90.39	100%	0.00	90.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		87.99				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

143	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	70.18	87.71	100.00	100.00	87.11	94.17	90.32	100%	0.00	90.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.53	17.54	10.00	10.00	8.71	23.54				
					Nilai Aspek	85.09		93.70				94.17				
144	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	53.34	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.00	70%	0.00	90.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.67		100.00				100.00				
145	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	52.88	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.93	70%	0.00	89.90
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.93	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.44		100.00				100.00				
146	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	51.12	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.67	70%	0.00	89.53
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.67	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.56		100.00				100.00				
147	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	67.22	71.44	100.00	100.00	100.00	100.00	89.37	100%	0.00	89.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.08	14.29	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.61		92.86				100.00				
148	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	89.03	100.00	0.00	0.00	99.40	72.73	71.48	80%	0.00	89.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.35	20.00	0.00	0.00	9.94	18.18				
					Nilai Aspek	94.52		99.70				72.73				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

149	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
150	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
151	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
152	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
153	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	83.39	100.00	100.00	100.00	100.00	63.21	88.31	100%	0.00	88.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.51	20.00	10.00	10.00	10.00	15.80				
					Nilai Aspek	91.70		100.00				63.21				
154	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	100.00	68.97	100.00	100.00	83.78	82.20	87.72	100%	0.00	87.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.79	10.00	10.00	8.38	20.55				
					Nilai Aspek	100.00		88.19				82.20				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

155	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	69.09	64.61	100.00	0.00	100.00	100.00	78.29	90%	0.00	86.98
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.36	12.92	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.55		88.20				100.00				
156	039	032	690993	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
157	016	032	690995	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
158	015	032	690998	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
159	009	032	691000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
160	065	032	691001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

161	095	032	029090	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
162	134	032	039017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
163	134	032	039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
164	030	032	049033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
165	014	032	119038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
166	045	032	159037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

167	046	032	169034	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
168	051	032	189036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
169	136	032	199035	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
170	037	032	229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
171	038	032	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
172	039	032	249086	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

173	062	032	289028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
174	020	032	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
175	015	032	309039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
176	009	032	329011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
177	009	032	329088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
178	065	032	330094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

179	178	032	340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
180	178	032	691002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
181	134	032	691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
182	008	032	691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
183	012	032	691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
184	042	032	691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

185	061	032	691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
186	037	032	691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
187	009	032	691038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
188	175	032	691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
189	095	032	691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
190	030	032	691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

191	135	032	691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
192	001	032	691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
193	123	032	691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
194	010	032	691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
195	008	032	691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
196	012	032	691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

197	014	032	691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
198	017	032	691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
199	042	032	691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
200	043	032	691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
201	045	032	691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
202	046	032	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

203	049	032	691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
204	051	032	691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
205	136	032	691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
206	060	032	691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
207	061	032	691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
208	037	032	691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

209	038	032	691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
210	039	032	691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
211	063	032	691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
212	016	032	691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
213	062	032	691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
214	020	032	691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

215	015	032	691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
216	050	032	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
217	009	032	691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
218	065	032	691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
219	178	032	691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
220	185	032	691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

221	134	032	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
222	012	032	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
223	020	032	690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
224	175	032	690970	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
225	095	032	690971	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
226	134	032	690972	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

227	030	032	690973	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
228	135	032	690974	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
229	001	032	690975	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
230	123	032	690976	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
231	008	032	690978	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
232	012	032	690979	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

233	014	032	690980	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
234	043	032	690983	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
235	045	032	690984	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
236	046	032	690985	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
237	049	032	690986	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
238	051	032	690987	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

239	136	032	690988	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
240	060	032	690989	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
241	037	032	690991	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
242	038	032	690992	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
243	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	82.87	96.65	100.00	100.00	84.74	61.35	85.57	100%	0.00	85.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.43	19.33	10.00	10.00	8.47	15.34				
					Nilai Aspek	91.44		95.35				61.35				
244	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.99	95.41	0.00	0.00	100.00	72.00	68.33	80%	0.00	85.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.25	19.08	0.00	0.00	10.00	18.00				
					Nilai Aspek	87.50		97.71				72.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

245	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	81.96	99.39	0.00	0.00	0.00	80.09	42.32	50%	0.00	84.63
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02				
					Nilai Aspek	90.98		99.39				80.09				
246	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	67.73	63.17	0.00	0.00	93.18	100.00	67.11	80%	0.00	83.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.16	12.63	0.00	0.00	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	83.87		78.17				100.00				
247	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	78.41	100.00	100.00	100.00	78.55	49.15	81.90	100%	0.00	81.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	10.00	10.00	7.86	12.29				
					Nilai Aspek	89.21		94.64				49.15				
248	063	032	690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
249	008	032	099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
250	061	032	219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

251	060	032	209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
252	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	54.82	57.45	0.00	0.00	0.00	100.00	54.71	70%	0.00	78.16
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.22	11.49	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.41		57.45				100.00				
253	175	032	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
254	095	032	029173	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
255	030	032	049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
256	135	032	059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

257	001	032	069145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
258	001	032	069146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
259	123	032	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
260	010	032	089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
261	012	032	109132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
262	014	032	119142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

263	017	032	129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
264	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
265	042	032	139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
266	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
267	043	032	149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
268	045	032	159118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

269	045	032	159119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
270	046	032	169124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
271	046	032	169125	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
272	049	032	179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
273	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
274	051	032	189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

275	136	032	199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
276	038	032	239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
277	039	032	249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
278	016	032	269120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
279	016	032	269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
280	015	032	309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

281	050	032	319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
282	065	032	339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
283	065	032	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
284	185	032	632335	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
285	175	032	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
286	095	032	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

287	030	032	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
288	135	032	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
289	001	032	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
290	123	032	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
291	008	032	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
292	014	032	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

293	017	032	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
294	042	032	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
295	043	032	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
296	045	032	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
297	046	032	690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
298	051	032	690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

299	061	032	690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
300	037	032	690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
301	038	032	690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
302	039	032	690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
303	016	032	690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
304	062	032	690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

305	015	032	690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
306	050	032	690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
307	009	032	690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
308	065	032	690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
309	178	032	690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
310	185	032	690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

311	068	032	690962	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
312	068	032	690969	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
313	062	032	690996	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
314	020	032	690997	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
315	175	032	691008	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
316	095	032	691009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

317	030	032	691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
318	135	032	691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
319	001	032	691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
320	123	032	691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
321	010	032	691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
322	014	032	691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

323	017	032	691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
324	043	032	691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
325	045	032	691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
326	046	032	691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
327	049	032	691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
328	051	032	691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

329	136	032	691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
330	060	032	691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
331	038	032	691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
332	039	032	691031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
333	063	032	691032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
334	016	032	691033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

335	062	032	691034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
336	020	032	691035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
337	015	032	691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
338	050	032	691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
339	065	032	691039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
340	178	032	691040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

341	185	032	691041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
342	134	032	691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
343	185	032	691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
344	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	52.00	100.00	0.00	0.00	0.00	47.68	49.72	70%	0.00	71.03
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.80	20.00	0.00	0.00	0.00	11.92				
					Nilai Aspek	76.00		100.00				47.68				
345	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	53.02	100.00	0.00	0.00	0.00	37.61	47.36	70%	0.00	67.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.95	20.00	0.00	0.00	0.00	9.40				
					Nilai Aspek	76.51		100.00				37.61				
346	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	56.57	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.99	70%	0.00	65.69
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.49	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	78.29		100.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

347	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	53.12	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.47	70%	0.00	64.95
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.97	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	76.56		100.00				30.00				
348	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	51.94	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.29	70%	0.00	64.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.79	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.97		100.00				30.00				
349	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				30.00				
350	060	032	209033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
351	017	032	129034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
352	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

353	010	032	089004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
354	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				
355	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				
356	050	032	690999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
357	063	032	690994	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
358	061	032	690990	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

359	010	032	690977	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
360	050	032	319033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
361	063	032	259038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
362	061	032	219030	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
363	050	032	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
364	185	032	691003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

365	049	032	690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
366	136	032	690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
367	060	032	690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
368	066	032	690959	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
369	113	032	690960	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
370	085	032	690961	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

371	066	032	690966	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
372	113	032	690967	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
373	017	032	690981	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
374	062	032	289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
375	062	032	289112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
376	063	032	259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

377	063	032	259107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
378	042	032	690982	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
379	085	032	690968	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
380	010	032	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.2647/DJPT.1/OT.710/VII/2025 8 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Hal : Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen
Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun 2025

Yth.
(daftar terlampir)

di-
tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Validasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap periode pelaksanaan Triwulan II Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hasil sebagai berikut:

1. Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
2. Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan II Tahun 2025 yang dilakukan tanggal 1 s.d. 8 Juli 2025;
3. Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan II Tahun 2025 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II).
4. Analisis atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut:
 - a. Jumlah responden sebanyak 4.871 dengan hasil SKM **92,47** (kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**);
 - b. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 38 berdasarkan Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2022. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP;
 - c. Nilai SKM tertinggi diperoleh PPS Bungus dengan nilai sebesar 98,62. Sedangkan, nilai terendah diperoleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dengan nilai 88,70;
 - d. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultasi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,70;
5. Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau agar masing-masing UPP untuk dapat:
 - a. Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporan;
 - b. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas

- dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP;
- c. Memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 - d. Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan II Tahun 2025 melalui media sosial dan sarana prasarana yang tersedia paling lambat tanggal **20 Juli 2025**.
 - e. memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada menu Download pada Tools SKM KKP.
6. Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan II Tahun 2025 dapat diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM KKP. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sesditjen Perikanan Tangkap



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Tembusan
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1

Nomor : B.2647/DJPT.1/OT.710/VII/2025

Tanggal : 8 Juli 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
4. Direktur Usaha Penangkapan Ikan
5. Plt. Kepala BBPI Semarang
6. Kepala PPS Belawan
7. Kepala PPS Bungus
8. Kepala PPS Nizam Zacham
9. Kepala PPS Cilacap
10. Kepala PPS Kendari
11. Kepala PPS Bitung
12. Kepala PPN Sibolga
13. Kepala PPN Tanjungpandan
14. Kepala PPN Palabuhanratu
15. Kepala PPN Kejawanan
16. Kepala PPN Pekalongan
17. Kepala PPN Brondong
18. Kepala PPN Prigi
19. Kepala PPN Ternate
20. Kepala PPN Pemangkat
21. Kepala PPN Ambon
22. Plt. Kepala PPN Tual
23. Kepala PPN Pengambengan
24. Kepala PPN Sungailiat
25. Kepala PPN Karangantu
26. Kepala PPN Kwandang
27. Kepala PPP Teluk Batang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Lampiran
 Nomor : B.2647/DJPT.1/OT.710/VII/2025
 Tanggal : 8 Juli 2025

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan II tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
BBPI Semarang	181	3,779	3,735	3,702	3,740	3,724	3,735	3,785	3,740	3,751	93,59
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	674	3,657	3,614	3,680	3,737	3,574	3,593	3,625	3,570	3,625	90,76
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	12	3,917	3,833	3,917	3,833	3,833	3,833	3,917	3,917	3,917	96,99
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	801	3,583	3,543	3,513	3,547	3,571	3,536	3,547	3,527	3,566	88,70
PPN Ambon	117	3,821	3,803	3,761	3,701	3,769	3,795	3,812	3,752	3,846	94,61
PPN Brondong	133	3,669	3,632	3,602	3,632	3,617	3,556	3,669	3,549	3,534	90,16
PPN Karangantu	216	3,722	3,657	3,694	3,755	3,708	3,704	3,722	3,569	3,486	91,72
PPN Kejawanan	145	3,821	3,855	3,828	3,745	3,821	3,807	3,848	3,786	3,807	95,33
PPN Kwandang	179	3,922	3,860	3,860	3,894	3,883	3,670	3,832	3,849	3,682	95,70
PPN Palabuhanratu	173	3,821	3,751	3,838	3,728	3,827	3,855	3,827	3,821	3,734	95,01
PPN Pekalongan	98	3,755	3,735	3,745	3,724	3,673	3,755	3,816	3,602	3,449	92,38
PPN Pemangkat	220	3,827	3,777	3,814	3,845	3,764	3,768	3,841	3,786	3,764	94,96
PPN Pengambengan	123	3,829	3,821	3,789	3,805	3,805	3,805	3,846	3,797	3,813	95,30
PPN Prigi	155	3,813	3,794	3,761	3,723	3,748	3,665	3,716	3,768	3,684	93,53
PPN Sibolga	210	3,690	3,705	3,714	3,690	3,705	3,681	3,705	3,714	3,705	92,53
PPN Sungailiat	153	3,810	3,850	3,824	3,804	3,771	3,791	3,810	3,686	3,719	94,63

PPN Tanjungpandan	88	3,943	3,886	3,898	3,886	3,864	3,920	3,909	3,841	3,761	3,943
PPN Ternate	213	3,723	3,681	3,671	3,662	3,704	3,667	3,695	3,657	3,695	3,723
PPN Tual	90	3,911	3,789	3,767	3,822	3,800	3,789	3,822	3,767	3,700	3,911
PPP Teluk Batang	67	3,791	3,761	3,672	3,701	3,731	3,701	3,701	3,672	3,687	3,791
PPS Belawan	168	3,643	3,607	3,643	3,685	3,583	3,619	3,607	3,577	3,524	3,643
PPS Bitung	127	3,772	3,756	3,630	3,717	3,717	3,654	3,732	3,693	3,646	3,772
PPS Bungus	173	3,936	3,948	3,954	3,948	3,936	3,942	3,954	3,948	3,936	3,936
PPS Cilacap	118	3,746	3,695	3,619	3,686	3,686	3,712	3,737	3,712	3,653	3,746
PPS Kendari	92	3,641	3,652	3,663	3,663	3,609	3,565	3,587	3,576	3,587	3,641
PPS Nizam Zachman	145	3,800	3,766	3,731	3,779	3,759	3,759	3,814	3,807	3,752	3,800
DJPT	4871	3,736	3,703	3,701	3,719	3,696	3,682	3,716	3,673	3,664	92,47



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: B.573/MEN-KP/VI/2025

Penghargaan diberikan kepada:

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

sebagai unit organisasi berpredikat

Terbaik

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Jakarta, 21 Mei 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Standar Nasional



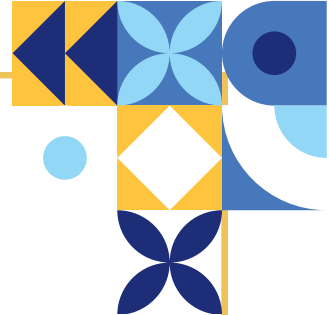

Prestasi Perikanan Samudra Cilacap
dalam
Kategori Perikanan Samudra
dalam Kompetisi Internasional 2024

KOIN MAS



**Satuan Kerja Kolaborator
(Project Grand Finalis dan Terbaik)**

Kompetisi Inovasi Manajer Aset DJKN 23/24



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

KODE SATKER 518117

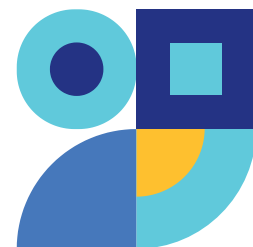
Sebagai **Peringkat Ketiga** Satuan Kerja Terbaik

“Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2024, **Satker Pagu Besar**”

CILACAP, 20 FEBRUARI 2025
KEPALA KANTOR



Ditandatangani secara elektronik
LUQMAN JOYO KARTONO





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap

KODE SATKER 518117

Sebagai **Peringkat Ketiga** Satuan Kerja Terbaik

“Kategori Nilai Transaksi Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Semester II Tahun 2024”

CILACAP, 20 FEBRUARI 2025
KEPALA KANTOR



Ditandatangani secara elektronik
LUQMAN JOYO KARTONO



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA :

PPS Cilacap

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
Maret 2025 dengan kategori :

BAIK



Direktur
Kepelabuhanan Perikanan

Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si





pipp

SERTIFIKAT

Penghargaan

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPS Cilacap

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
bulan Februari 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



SERTIFIKAT

PENGHARGAAN



Dengan bangga diberikan kepada :

PPS Cilacap

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
April 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK

Direktur
Kepelabuhanan Perikanan



Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si



pipp



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPS Cilacap

untuk hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan
periode Januari 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK

Jakarta, 8 Februari 2025



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA :

PPS Cilacap

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
Juni 2025 dengan kategori :

SANGAT BAIK



DIREKTUR
KEPELABUHAN PERIKANAN

DR. ADY CANDRA, S.PI, M.SI



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



DENGAN BANGGA diberikan kepada :

PPS Cilacap

*Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan periode
Mei 2025 dengan kategori :*

SANGAT BAIK

Direktur
Kepelabuhanan Perikanan



Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si





BUPATI CILACAP



SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
ATAS PARTISIPASI & DUKUNGAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Pada Kegiatan Cilacap UKM Expo 2025
Di Lapangan Krida Nusantara Pada Tanggal 17 - 20 April 2025

Cilacap, 20 April 2025

BUPATI CILACAP



[Signature]
SYAMSUL AULIYA RACHMAN



SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Gekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Baik**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **106,73**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Direktorat Pengelolaan Gumpur Daya Ikan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Baik**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **108,11**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **114,39**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Baik**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **109,12**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Baik**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **104,72**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Balai Besar Penangkapan Ikan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **112,87**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Gamudera Nizam Zachman Jakarta

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **116,93**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Gamudera Kendari

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **114,36**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Gamudera Cilacap

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **114,55**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Gamudera Bungus

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **117,03**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Gamudera Belawan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **115,98**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Gamudera Bitung

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **116,41**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nuzantara Ambon

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **117,14**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nizantara Palabuhanratu

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **117,07**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nysantara Ternate

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **113,43**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **114,26**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Baik**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **107,77**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nysantara Gibolga

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **116,38**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nizantara Tual

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **116,01**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nizantara Kejawan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **115,54**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **117,54**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nizantara Brondong

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **111,29**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Baik**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **109,71**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Gungailiat

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Baik**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **107,47**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **116,58**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Istimewa**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **117,11**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Baik**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **106,30**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana





SERTIFIKAT

NOMOR: B.1848/DJPT.1/KP.540/V/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan predikat **Baik**
di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024
dengan nilai sebesar **105,19**

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

